



**KONSTRUKSI PEMBERITAAN MARITIM DI MEDIA ONLINE
KOMPAS.COM**

**(THE CONSTRUCTION OF MARITIME NEWS IN ONLINE MEDIA
KOMPAS.COM)**

SKRIPSI

Oleh

Tri Sulis Setyoningrum

NIM 110910302002

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2015



KONSTRUKSI PEMBERITAAN MARITIM DI MEDIA ONLINE

KOMPAS.COM

(THE CONSTRUCTION OF MARITIME NEWS IN ONLINE MEDIA

KOMPAS.COM)

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Studi Ilmu Sosial dan Politik (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

Tri Sulis Setyoningrum

NIM 110910302002

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

2015

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda tercinta Zaenal Abidin dan Ibunda terkasih Herminingsih, yang tidak pernah lelah mendoakan dan memberi kasih sayang serta pengorbanan selama ini;
2. Adik-adikku Hamdani Ansori dan Muhammad Mujahidin, serta keluarga besar yang telah memberikan doa, kasih sayang, dan keceriaan dalam hidup ini;
3. Guru-guruku sejak TK sampai PT terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
4. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan.”¹

(Q.S. Al ‘Alaq:1)

“Media adalah entitas yang paling kuat di dunia. Mereka memiliki kekuatan membuat bersalah yang tidak bersalah dan membuat yang tidak bersalah menjadi bersalah dengan kekuatan itu. Karena media mengendalikan pikiran massa”

“The media’s the most powerful entity on earth. They have the power to make the innocent guilty and to make the guilty innocent, and that’s power. Because they control the minds of the masses.”²

-Malcolm X-

¹ Departemen Agama Republik Indonesia. 2006. *Qur’an Tajwid dan Terjemahannya*. Jakarta: Magfirah Pustaka.

² Diambil dari <http://www.goodreads.com/quotes/74430-the-media-s-the-most-powerful-entity-on-earth-they-have>

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Sulis Setyoningrum

NIM : 110910302002

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: *Konstruksi Pemberitaan Maritim Di Media Online Kompas.com (The Construction of Maritime News in Online Media Kompas.com)* adalah benar-benar karya tulis sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Agustus 2015

Yang menyatakan,

Tri Sulis Setyoningrum

NIM 110910302002

SKRIPSI

**KONSTRUKSI PEMBERITAAN MARITIM DI MEDIA ONLINE
KOMPAS.COM**

Oleh :

Tri Sulis Setyoningrum

NIM 110910302002

Pembimbing :

Dosen Pembimbing : Raudlatul Jannah, S.Sos, M.Si

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

2015

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “*Konstruksi Pemberitaan Maritim Di Media Online Kompas.com (The Construction of Maritime News in Online Media Kompas.com)*” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada:

hari : Jumat

tanggal : 18 September 2015

tempat : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Joko Mulyono, M.Si

Raudlatul Jannah, S.Sos., M.Si

NIP 196406201990031001

NIP 198206182006042001

Anggota,

Nurul Hidayat, S.Sos., MUP

NIP 197909142005011002

Mengesahkan

Dekan,

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Prof. Dr. Hary Yuswadi M.A

NIP 130 935 420

RINGKASAN

Konstruksi Pemberitaan Maritim Di Media Online Kompas.com. Tri Sulis Setyoningrum; 110910302002; 111 halaman; Program Studi Sosiologi; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Universitas Jember.

Maritim adalah sebuah kata yang hari ini hangat diperbincangkan bagi sebagian besar masyarakat. Hal ini disebabkan oleh gencarnya pemberitaan mengenai isu kemaritiman di Indonesia yang banyak digulirkan oleh pemerintahan Joko Widodo sejak masa kampanye hingga hari ini. Penelitian ini mengambil isu-isu kemaritiman yang ada di salah satu media online kredibel Kompas.com sejak terpilihnya presiden Joko Widodo hingga 100 hari kepemimpinannya.

Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kritis dengan pendekatan analisis wacana kritis (AWK) atau *critical discourse analysis* (CDA) Norman Fairclough. Paradigma penelitian kritis dipilih sebab penulis menganggap media bukanlah medium yang netral dalam menggambarkan realitas melalui pemberitaan yang dipublikasikan dan media memiliki ideologi-ideologi tertentu yang dianutnya sehingga diperlukan analisis wacana kritis untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemberitaan maritim di media online Kompas.com dengan menggunakan AWK Fairclough. Analisis wacana kritis Norman Fairclough menggunakan tiga hal dalam menganalisis sebuah wacana baik tulis seperti berita di Kompas.com yakni representasi, relasi dan identitas. Representasi berhubungan dengan penggunaan kosa kata dan tata bahasa yang digunakan untuk mengkonstruksi realitas, relasi berhubungan dengan hubungan para subjek yang ditampilkan dalam teks berita

sedangkan identitas adalah posisi wartawan dalam teks berita maritim yang ada di Kompas.com menunjukkan keberpihakan kepada siapa.

Penulis dalam penelitian ini mengkategorikan isu kemaritiman yang ada di media online Kompas.com ke dalam empat kategori yang masih berhubungan dengan disiplin ilmu sosiologi khususnya dalam peminatan sosiologi maritim. Kategori tersebut antara lain pembangunan infrastruktur maritim, keamanan laut, kesejahteraan nelayan dan kesadaran masyarakat sebagai negara maritim.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis dapat mendeskripsikan beberapa hal. Pertama, dalam kategori isu maritim pembangunan infrastruktur maritim. Pemerintah dalam hal ini dicitrakan positif dengan keberhasilan menarik investor dari beberapa negara melalui pelbagai forum internasional untuk bekerja sama dalam membangun infrastruktur maritim. Negara yang tertarik menjadi investor di sektor pembangunan infrastruktur maritim antara lain Tiongkok, Rusia, Amerika Serikat, Jepang, Myanmar dan Cina. Kedua, mengenai keamanan laut. Pemerintah dikonstruksikan Kompas.com dengan baik terlihat dari berita-berita-berita mengenai kasus *illegal fishing*, kapal ilegal dan moratorium yang dihasilkan telah berhasil mengurangi kapal asing di perairan Indonesia. Serta pembentukan lembaga yang dikhususkan untuk memberantas *illegal fishing* yakni Bakamla. Ketiga, mengenai kesejahteraan nelayan. Kesejahteraan nelayan berkaitan erat dengan posisi nelayan dan konstruksi atas kelompok sosial nelayan, Kompas.com merepresentasikan nelayan sebagai kelompok sosial yang marginal. Konstruksi ini berakibat bagi pemerintah, pemerintah telah gagal dalam menyejahterakan rakyatnya. Keempat, mengenai kesadaran masyarakat sebagai negara maritim. Tingkat konsumsi ikan yang rendah juga dipengaruhi oleh beberapa hal dan dalam media Kompas.com digambarkan bahwa peran aktif pemerintah dalam membuat kegiatan atau acara yang berkaitan dengan kemaritiman seperti hari nusantara, dan sebagainya sebagai ekowisata berbasis maritim.

Secara garis besar, relasi dan identitas dalam pemberitaan di Kompas.com mengarah kepada pemerintahan dan masyarakat. Pemerintahan dikonstruksikan oleh Kompas.com dengan ambiguitas tetapi lebih besar keberpihakan kepada pemerintah dengan citra positif yang ditampilkan melalui keberhasilan beberapa program maritim dan kasus kriminalitas di laut yang dapat diselesaikan. Kompas.com juga mengkonstruksi masyarakat pesisir dan kelompok sosial nelayan. Masyarakat pesisir dikonstruksikan memiliki solidaritas sosial yang tinggi seperti menjaga kelestarian laut tempat mereka tinggal tetapi, disisi lain kelompok sosial nelayan dikonstruksikan sebagai kelompok yang rentan secara ekonomi.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul “*Konstruksi Pemberitaan Maritim Di Media Online Kompas.com*”. Karya tulis ilmiah ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada :

1. Ibu Raudlatul Jannah, S.Sos. M.Si selaku Dosen Pembimbing.
2. Bapak Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Ahmad Ganefo, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember sekaligus Dosen Pembimbing Akademik.
4. Bapak Drs. Joko Mulyono, M.Si dan Nurul Hidayat, S.Sos. MUP terima kasih untuk kritik dan saran.
5. Semua dosen pengajar program studi Sosiologi terima kasih atas ilmu dan pengalaman berharga yang telah dibagikan.
6. Staf administrasi yang telah banyak membantu untuk keperluan akademis.
7. Seluruh keluarga penulis khususnya Ayah, Ibu, Kakek, Nenek, dan Adekku yang tiada henti melantunkan do'a untukku. Terima kasih atas kesabaran, materi, kasih sayang serta cinta kalian terhadapku. Serta seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas doanya.

8. Teman-teman Sosiologi 2011, terima kasih banyak atas memori yang kalian berikan.
9. Teman-teman KKNku tercinta, terima kasih atas semangatnya. Aku pasti akan merindukan kebersamaan kita.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 10 Agustus 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persembahan	ii
Halaman Motto.....	iii
Lembar Pernyataan.....	iv
Halaman Pembimbingan.....	v
Halaman Pengesahan.....	vi
Ringkasan.....	vii
Prakata.....	x
Daftar Isi.....	xii
Daftar Tabel	xiv
Daftar Bagan	xv
Daftar Lampiran	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pengertian Maritim.....	9
2.2 Pengertian Wacana	10
2.3 Jenis Wacana.....	11
2.4 Konstruksi Media Melalui Wacana	14
2.5 Pengertian Berita.....	15
2.6 Gambaran Umum Kompas.com.....	16
2.7 Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough.....	25

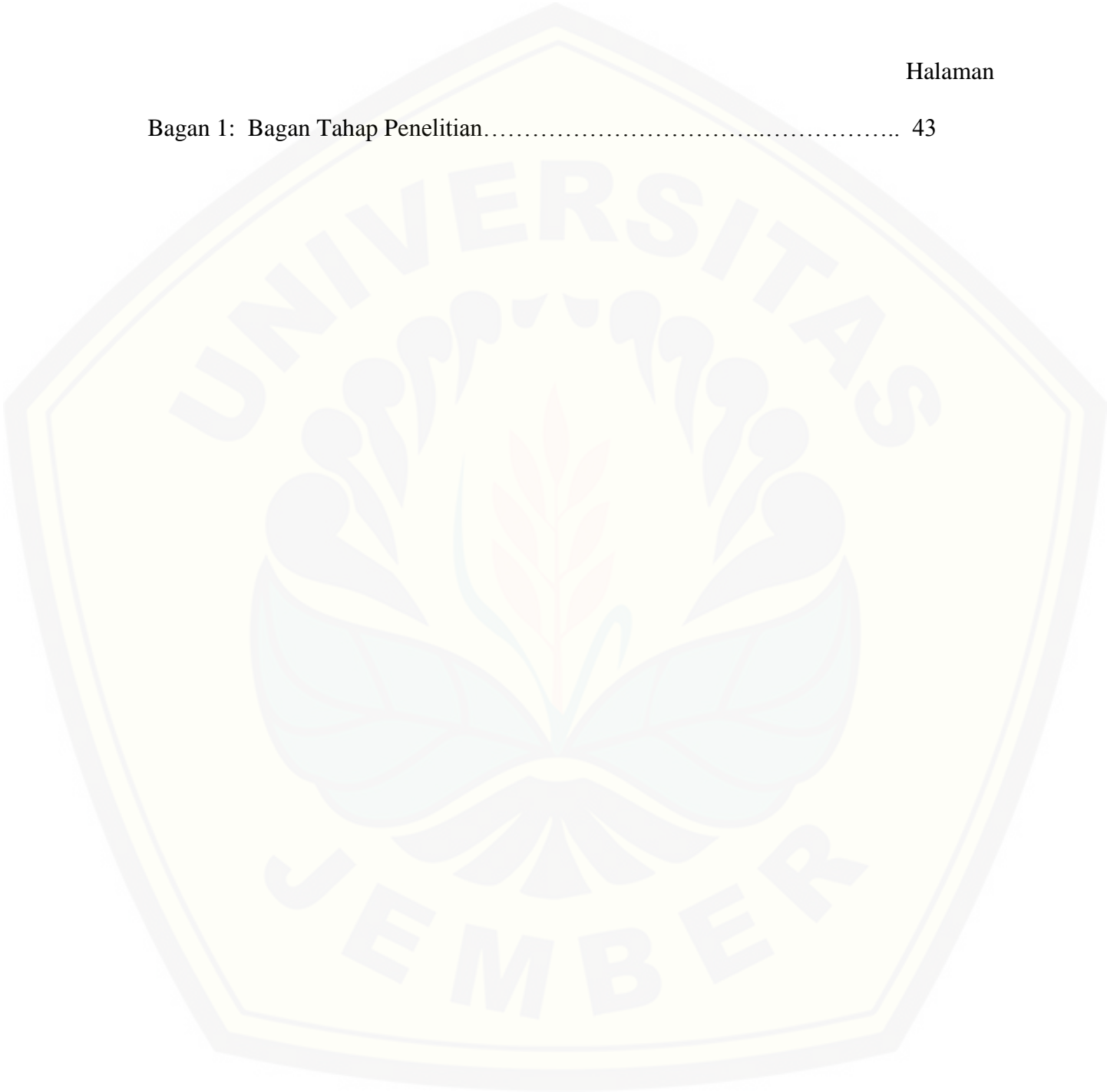
2.8 Analisis Wacana Kritis Pada Level Teks.....	28
2.9 Pandangan Kritis Melihat Media.....	30
2.10 Konstruksi Pemberitaan Maritim.....	32
2.11 Penelitian Terdahulu.....	37
BAB 3. METODE PENELITIAN	39
3.1 Desain Penelitian	39
3.2 Obyek Penelitian	40
3.3 Sumber Data dan Batasan Waktu Penelitian.....	40
3.4 Kerangka Analisis	41
3.5 Metode Analisa Data.....	42
3.6 Bagan Tahap Penelitian	43
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	44
4.1 Gambaran Umum Berita Maritim Di Kompas.com.....	44
4.2 Konstruksi Berita Maritim Di Kompas.com.....	45
4.2.1 AWK Teks Berita Tentang Pembangunan Infrastruktur Maritim.....	46
4.2.2 AWK Teks Berita Tentang Keamanan Laut.....	69
4.2.3 AWK Teks Berita Tentang Kesejahteraan Nelayan.....	84
4.2.4 AWK Teks Berita Tentang Kesadaran Sebagai Negara Maritim.....	94
BAB 5. PENUTUP	105
5.1 Kesimpulan	105
5.2 Rekonstruksi Wacana	107
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Artikel Tentang Pembangunan Infrastruktur Maritim	48
Tabel 4.2 Pernyataan Saling Menentang Kompas.com.....	49
Table 4.3 Perbandingan Kata Jajajakan dan Tawarkan	68
Tabel 4.4 Artikel Berita Tentang Keamanan Laut	70
Tabel 4.5 Pernyataan Saling Mendukung	76
Tabel 4.6 Artikel Berita Tentang Kesejahteraan Nelayan	85
Tabel 4.7 Bukti Kesejahteraan Nelayan Rendah.....	91
Tabel 4.8 Berita Tentang Kesadaran Masyarakat Sebagai Negara Maritim....	95
Tabel 4.9 Representasi Masyarakat Akibat Kurang Konsumsi Ikan	96
Tabel 4.10 Representasi Masyarakat Terhadap Festival Budaya Maritim	101

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1: Bagan Tahap Penelitian.....	43



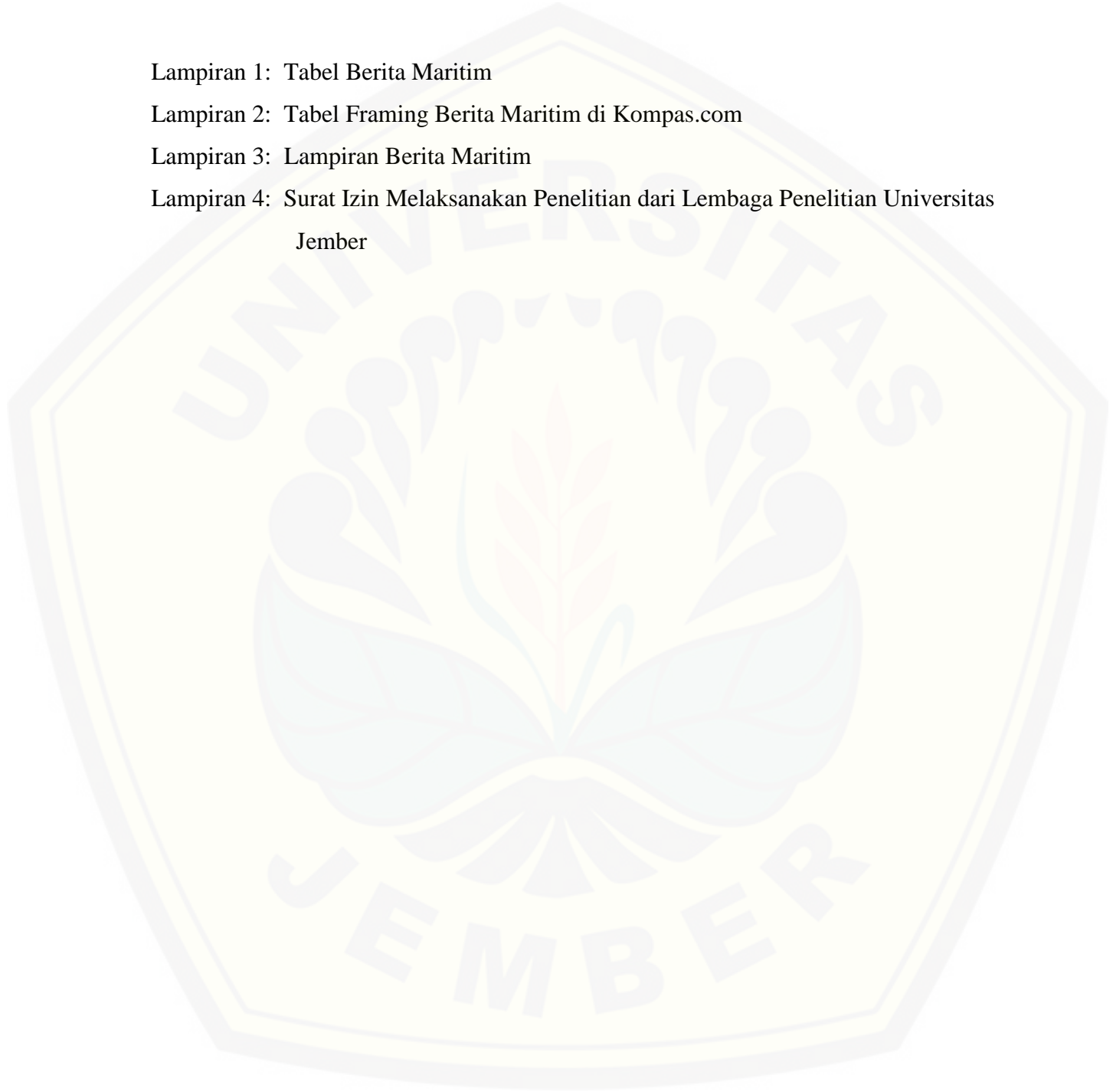
DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Tabel Berita Maritim

Lampiran 2: Tabel Framing Berita Maritim di Kompas.com

Lampiran 3: Lampiran Berita Maritim

Lampiran 4: Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas
Jember



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Negara Indonesia juga dikenal sebagai negara yang memiliki laut yang lebih besar daripada daratan. Sehingga negara Indonesia memiliki potensi maritim yang cukup besar. Hal ini seperti yang dimuat dalam media online Tribun News dengan judul berita “*Rokhmin Dahuri, 80% Potensi Maritim Indonesia Belum Terjamah*” disebutkan bahwa Indonesia sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia, memiliki kekayaan maritim yang luar biasa. Mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Rokhmin Dahuri menyebutkan bahwa 11 sektor, potensi maritim Indonesia mampu menghasilkan 1,2 triliun Dollar Amerika. Bahkan mampu menyerap 40 juta tenaga kerja. Berdasarkan penelitian, laut Indonesia baru 20% yang dimanfaatkan, 80% sisanya belum terjamah. Menurut menteri yang menjabat di era presiden Megawati Soekarnoputri, dari seluruh potensi yang ada baru 20% yang digali pemerintah dan hanya fokus pada perikanan. Sementara potensi lainnya seperti sumber daya manusia kelautan, transportasi laut dan pelayaran, ekowisata bahari, budidaya perikanan dan lain sebagainya, belum dimanfaatkan dengan baik. Dalam teknologi penangkapan ikan di Indonesia, dari 650 ribu kapal yang dimiliki, hanya sekitar 1,3% yang modern. Sehingga nelayan harus 'berjudi' untuk mencari ikan. Tak hanya itu, ikan yang didapat, cara penanganan dari kapal hingga di darat pun tidak memenuhi standar (dimuat <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/09/12/rokhmin-dahuri-80-persen-potensi-maritim-indonesia-belum-terjamah>).

Potensi maritim yang ada seharusnya dioptimalkan sebaik mungkin demi mewujudkan cita-cita bangsa menjadi negara yang makmur. Namun, hal itu tidak serta merta menjadi acuan utama pembangunan Indonesia dalam pemerintahan sebelumnya. Pemerintah terlihat hanya memfokuskan pembangunan pada daratan hingga mengabaikan besarnya potensi maritim yang harusnya digali. Sedikitnya kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mengatasi masalah maritim dan kurangnya ketegasan pemerintah dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan laut seperti pencurian ikan, perusakan terumbu karang, penggunaan jaring tangkap yang merusak lingkungan seperti *trawl*, dan sebagainya. Hal ini juga tak dapat dilepaskan dari salah satu medium bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik yakni media. Media merupakan salah satu penunjang iklim demokrasi yang baik. Kurangnya sorotan media terhadap isu-isu maritim yang ada membuat masyarakat ‘lupa’ jika kekayaan terbesar negara Indonesia ada di lautan.

Tahun 2014 menjadi panggung politik yang besar karena terjadi proses demokrasi yaitu pemilihan legislatif (DPR) sekaligus eksekutif (Presiden dan Wakilnya). Sejak kampanye salah satu kandidat eksekutif Joko Widodo aktif membahas mengenai masalah kelautan dan maritim. Media gencar sekali menyorot mengenai gagasan Jokowi untuk mengembalikan kejayaan maritim yang masih redup. Hingga terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden Indonesia, pemberitaan maritim banyak disorot khususnya di media online. Gagasan pemerintahan presiden Joko Widodo dalam kabinet kerja mengenai Indonesia sebagai poros maritim dunia banyak menjadi sorotan media. Hal ini seperti yang disebutkan dalam media online *Republika.com* dengan judul berita “*Di EAS, Jokowi Beberkan Lima Poros Maritim Dunia*” yang berisi mengenai Presiden Joko Widodo dalam pertemuan puncak Asia Timur mengutarakan bahwa akan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan melaksanakan kelima pilar pembangunan maritim antara lain pembangunan kembali budaya maritim Indonesia sebagai negara yang terdiri

atas 17 ribu pulau, bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya, dan masa depannya, sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola samudera. Pilar kedua adalah komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Pilar ketiga adalah komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim. Diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan adalah pilar keempat agenda pembangunan itu. Terakhir adalah sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudera, Indonesia berkewajiban membangun kekuatan pertahanan maritim guna mewujudkan cita-cita berbangsa (<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/11/13/neyu7b-di-eas-jokowi-beberkan-lima-poros-maritim-dunia>). Gagasan mengenai Indonesia sebagai poros maritim dunia banyak dimuat dalam media massa baik cetak maupun elektronik. Hal ini membuat isu maritim yang sebelumnya “mati suri” di media menjadi banyak diterbitkan kembali mengenai langkah maupun kerja presiden Joko Widodo melalui Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti serta dengan terbentuknya Menteri Koordinator Maritim yang diketuai oleh Indroyono Soesilo yang diharapkan mampu mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Media massa mengambil peranan penting dalam mengabarkan situasi dan kondisi terkini yang ada di masyarakat. Media massa (*mass media*) adalah sarana yang membawa pesan. Media massa utama adalah buku, majalah, koran, televisi, radio, rekaman, film dan web dalam Vivian (2008:453). Dewasa ini, *website* atau internet mengambil peranan penting dalam sarana komunikasi masyarakat. Interaksi yang terjalin antar individu., antar kelompok maupun individu dengan kelompok saat ini banyak menggunakan

media berupa internet. Berita pun sekarang tidak hanya diproduksi secara cetak melalui koran atau surat kabar. Surat kabar merupakan salah satu media massa cetak yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam mencari informasi karena media tersebut sudah melalui serangkaian proses ilmiah dan mendapat legitimasi hukum sebagai bagian dari pemberi informasi masyarakat. Negara Indonesia memiliki ribuan surat kabar nasional maupun lokal yang berfungsi sebagai pembawa pesan atau informasi kepada masyarakat atau khalayak media. Surat kabar online (*daring*) menjadi salah satu media massa yang digunakan oleh khalayak dalam mencari informasi terkait peristiwa-peristiwa yang terjadi. Salah satu media online yang kredibel di Indonesia dalam menyampaikan berita yakni media online Kompas.com. Media online ini sudah bertahun-tahun mengelola berita dan dikenal luas oleh masyarakat sebagai sumber pemberi informasi mengenai isu ekonomi, politik, gaya hidup, kesehatan, otomotif dan lainnya.

Maritim memiliki arti kata berkenaan dengan laut; berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut (<http://kbbi.web.id/maritim>). Doktrin mengenai Indonesia sebagai poros maritim didapat ketika Indonesia pernah berjaya sebagai negara maritim kala jaman kerajaan Majapahit dan menjadi kekuatan militer terbesar di tahun 1960-an. Gagasan mengenai Indonesia sebagai negara maritim telah ada sebelum negara Indonesia resmi diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, gagasan tersebut seakan lenyap ketika munculnya paradigma pembangunan baru saat rezim Soeharto berkuasa yang dikenal dengan revolusi hijau. Kedatangan revolusi hijau sebagai *mainstream* pembangunan baru memfokuskan pada pengelolaan lahan didaratan untuk swasembada pangan. Tetapi, saat rezim Soesilo Bambang Yudhoyono berkuasa muncul istilah baru dalam pembangunan yang dikenal sebagai revolusi biru. Doktrin Indonesia sebagai negara maritim mulai memiliki pamor lagi ketika presiden Joko Widodo mengagas ide mengenai Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan

membangun lima pilar maritim. Sehingga media massa mulai gencar memberitakan kembali mengenai isu maritim dalam berbagai media elektronik maupun cetak tak terkecuali dalam media online Kompas.com. Media massa juga merupakan salah satu saluran komunikasi politik dan sosial pada suatu masyarakat. Isi media pada hakikatnya adalah hasil konstruksi realitas dengan bahasa sebagai perangkat dasarnya. Sedangkan bahasa bukan saja sebagai alat merepresentasikan realitas, namun juga bisa menentukan relief seperti apa yang akan diciptakan oleh bahasa tentang realitas tersebut. Akibatnya, media massa mempunyai peluang yang sangat besar untuk mempengaruhi makna dan gambaran yang dihasilkan dari realitas yang dikonstruksikannya dalam Sobur (2004: 88). Media massa tidak luput dari rentannya rekayasa wacana yang dilakukan oleh penguasa wacana. Pihak-pihak yang berkepentingan menunggangi independensi media massa untuk memuluskan tujuan-tujuan elit mereka dalam Antoni (2012: 43).

Pemberitaan mengenai maritim dalam media online nasional seperti yang ada dalam media online Kompas.com, rupanya sangat gencar memberitakan mengenai pembangunan infrastruktur maritim, masalah pertahanan dan keamanan laut serta kerjasama yang dilakukan oleh presiden Jokowi mengenai maritim dengan beberapa negara. Pembentukan suatu berita dalam media massa pada dasarnya adalah penyusunan realitas-realitas terhadap suatu peristiwa sehingga membentuk sebuah cerita atau wacana yang bermakna. Dengan demikian, seluruh isi media adalah realitas yang dikonstruksikan (*constructed reality*) dalam bentuk wacana yang bermakna (Hamad, 2004: 10). Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, serta hendak dibawa kemana berita tersebut dalam Bimo (1999: 21). Teks berita yang ada dalam media online Kompas.com merupakan bagian dari wacana yang memiliki makna. Pemberitaan terkait maritim yang ditampilkan atau disorot dalam setiap media dapat membentuk realitas

sosiokultural tersendiri yang bermakna. Karena pada dasarnya media merepresentasikan realitas yang ada, dan bukan merefleksikannya. Belum terbangunnya wawasan kemaritiman nasional yang kuat telah berpengaruh besar terhadap kepedulian kemaritiman dari berbagai pihak. Akibatnya, kemiskinan publikasi, khususnya publikasi yang berbasis disiplin keilmuan, seperti antropolog-sosiologi maritim, ekonomi maritim, industri maritim, hukum laut atau hak ulayat laut, politik masyarakat maritim, komunikasi masyarakat maritim, dan sejarah maritim dalam Kusnadi (2007: 114).

Wacana yang ditampilkan dalam bentuk teks berita dalam media online Kompas.com tidak dapat dianggap sebagai wacana yang netral yang hanya memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi maritim di Indonesia. Tetapi lebih dari itu, wacana yang ditampilkan mengandung serangkaian pertarungan kekuasaan yang termanifestasikan melalui bahasa. Hal ini yang seringkali disebut Fairclough bahwa bahasa sebagai praktik kekuasaan. Bahasa secara sosial dan historis adalah bentuk tindakan, dalam hubungan dialektik dengan struktur sosial dalam Eriyanto (2001: 285). Pemakai bahasa membawa nilai ideologis tertentu sehingga wacana yang dihasilkan tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang apa adanya termasuk dalam teks berita yang ditampilkan dalam media online Kompas.com.

1.2 Rumusan Masalah

Pertarungan politik tahun 2014 lalu membawa angin segar bagi pembangunan negara Indonesia ke depan khususnya pada sektor maritim karena salah satu kandidat presiden Joko Widodo ingin menjadikan negara Indonesia sebagai poros maritim dunia melalui lima pilar pembangunan. Visi misi tersebut semakin *terblow-up* melalui berita-berita pada beberapa media online khususnya Kompas.com, ketika kandidat presiden Joko Widodo terpilih menjadi presiden dan membentuk Kementerian baru untuk difokuskan dalam pembangunan pada bidang maritim yaitu Kementerian Koordinator

Maritim dengan diketuai oleh Indroyono Soesilo serta menunjuk Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru. Pemberitaan maritim menjadi isu yang hangat diperbincangkan publik hari ini di berbagai media massa khususnya media online (internet). Hal ini tak lepas dari kekuatan media untuk mengarahkan pola pikir masyarakat melalui berita-berita yang ditampilkan. Pemberitaan maritim yang ada di media online Kompas.com sebenarnya tidak murni menggambarkan realitas maritim yang ada di masyarakat melainkan hanya membingkai beberapa realitas saja yang dianggap penting sesuai dengan ideologi media yang dianutnya. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk menjadikan hal tersebut sebagai objek penelitian dengan menggunakan analisis wacana kritis pada level teks. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konstruksi pemberitaan maritim yang ada dalam media online Kompas.com.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan mengenai konstruksi pemberitaan maritim yang ada dalam media online Kompas.com dengan menggunakan perspektif *critical discourse analysis* atau analisis wacana kritis Norman Fairclough pada level analisis mikro yakni tingkat teks.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritik maupun praksis. Manfaat teoritik dalam penelitian ini adalah sebagai penambah khazanah pengetahuan dalam disiplin ilmu sosiologi yang bertema kemaritiman, khususnya pada kajian akademik mengenai konstruksi berita dalam media massa online dengan menggunakan analisis wacana kritis pendekatan atau perspektif Norman Fairclough. Sedangkan secara praksis

bermanfaat sebagai bahan acuan bagi media massa untuk menghasilkan berita yang lebih berimbang khususnya dalam isu mengenai kemaritiman dan membangun kesadaran masyarakat bahwa media bukan medium yang netral tanpa ada pertarungan kekuasaan di dalamnya dalam menampilkan realitas melalui berita-berita yang dipublikasikan.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Maritim

Maritim didefinisikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan laut dan angkatan laut atau pelayaran dalam Kurniawan (2000: 176). Maritim memiliki arti kata berkenaan dengan laut; berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut (<http://kbbi.web.id/maritim>). Konsep mengenai maritim digunakan dalam *mainstream* pembangunan Indonesia sejak berjayanya kerajaan Majapahit. Namun, konsep ini semakin memudar sejak bangkitnya revolusi hijau di era Soeharto. Pembangunan kala itu hanya berfokus pada daratan dengan serangkaian program swasembada pangan sehingga meninggalkan potensi maritim yang harusnya menjadi bagian dalam menunjang kesejahteraan masyarakat secara ekonomi. Tetapi, saat ini *mainstream* pembangunan berbasis maritim telah digagas kembali oleh presiden Joko Widodo dengan menjadikan negara Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Maritim bukan hanya mengenai laut yang merupakan fakta geografis semata.

Pertama, secara geopolitik wilayah laut kita masih rentan. Kedua, secara sosial-ekonomis aktivitas di laut masih dikuasai asing, dan seolah kita adalah tamu di rumah sendiri. Kapal asing yang terus mengeruk sumberdaya laut, baik secara legal maupun ilegal. Ketiga, kita rela “menjual” harga diri bangsa ketika harus mengeruk pasir laut yang merusak lingkungan hanya untuk memenuhi kepentingan perluasan wilayah Singapura yang justru diduga mengancam kita secara geopolitik dalam Satria (2009: 80).

Gagasan mengenai negara maritim Indonesia adalah sebagai aktualisasi wawasan nusantara untuk memberi gerak pada pola pikir, pola sikap dan pola tindak bangsa Indonesia secara bulat dalam aktualisasi

wawasan nusantara. Pengembangan konsepsi negara maritim Indonesia sejalan dengan upaya peningkatan kemampuan bangsa kita menjadi bangsa yang modern dan mandiri dalam teknologi kelautan dan kedirgantaraan bagi kesejahteraan bangsa dan negara. Bumi maritim Indonesia adalah bagian dari sistem planet bumi yang merupakan kesatuan alami antara darat dan laut di atasnya tertata secara unik, menampilkan ciri-ciri negara dengan karakteristik sendiri yang menjadi wilayah yuridiksi negara Republik Indonesia. Menurut Suroto (2009: 12) Indonesia sebagai negara maritim harus mampu menguasai dan menjaga keutuhan seluruh wilayahnya baik darat, laut maupun udara, terutama wilayah lautnya. Bangsa Indonesia harus mampu memanfaatkan seluruh ruang lautnya sebagai sumber kehidupan, sarana penghubung dan pemersatu bangsa dan pulau-pulau.

Pemanfaatan wilayah perairan atau laut Indonesia seharusnya dilakukan secara optimal. Mengingat, Indonesia memiliki wilayah lautan lebih luas daripada daratan. Pengoptimalan wilayah laut Indonesia dapat menjadi tulang punggung bagi pencapaian kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang ekonomi. Oleh sebab itu, konsep mengenai maritim harus tertanam kuat pada diri masing-masing individu sehingga individu-individu di masyarakat memiliki kesadaran bahwa laut dapat dioptimalkan guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya pada masyarakat pesisir. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa banyak wilayah pesisir yang memiliki masyarakat dengan keterbatasan ekonomi dan tingkat pendidikan yang rendah.

2.2 Pengertian Wacana

Wacana adalah wujud atau bentuk bahasa yang bersifat komunikatif, interpretatif dan kontekstual. Artinya, pemakai bahasa ini selalu mengandaikan terjadi secara dialogis, perlu adanya kemampuan menginterpretasikan dan memahami konteks terjadinya wacana. Pemahaman

terhadap konteks wacana, diperlukan dalam proses menganalisis wacana secara utuh dalam Mulyana (2005: 21). Wacana adalah tentang produksi pengetahuan melalui bahasa. Wacana mengkonstruksi sebuah topik. Wacana mendefinisikan dan menghasilkan obyek pengetahuan kita. Wacana mengarahkan cara sebuah topik dapat dibicarakan dan dinalar secara bermakna. Wacana juga mempengaruhi bagaimana ide diletakkan ke dalam praksis dan digunakan untuk mengatur perilaku masyarakat atau orang lain dalam Santoso (2011: 22).

Wacana merupakan alat komunikasi sekaligus propaganda yang mampu menciptakan realitas baru atas opini publik. Wacana mampu menghegemoni realitas. Artinya, realitas bukan lagi apa yang nampak dan kasat mata. Wacana bermetamorfosis menjadi sebuah opini yang direalitas. Dengan didalangi oleh pengaruh wacana yang digulirkan oleh arus utama atau pemegang kuasa wacana, maka realitas menjadi sesuatu yang sengaja diciptakan, bukan lagi sesuatu yang sudah ada sedemikian rupa. Wacana dimungkinkan menjadi sesuatu yang bisa diolah atau direayasa berdasarkan kepentingan dalam Antoni (2012: 42-43). Wacana dipahami secara peristiwa bahasa dengan empat ciri yang menyertainya (1) wacana selalu terkait dengan tempat dan waktu, (2) wacana selalu memiliki subyek, yakni “siapa yang berbicara”, (3) wacana selalu menunjuk pada sesuatu yang sedang dibicarakan, merujuk pada dunia yang sedang digambarkan dan (4) wacana merupakan lokus bagi terjadinya proses komunikasi, pertukaran pesan-pesan dan peristiwa dalam Santoso (2011: 18).

2.3 Jenis Wacana

Berdasarkan media yang digunakan maka wacana dapat dibedakan menjadi dua yakni wacana tulis dan wacana lisan. Wacana merupakan wujud komunikasi verbal. Dari segi bentuk bahasa yang dipakai wacana terbagi dua, yakni wacana lisan dan wacana tulis. Wacana lisan (ujaran) merupakan wujud

komunikasi lisan yang melibatkan pembaca dan penyimak, sedangkan wacana tulis (teks) merupakan wujud komunikasi tulis yang melibatkan penulis dan pembaca. Aktivitas penyapa (pembicara atau penulis) bersifat produktif, ekspresif, kreatif, sedangkan aktivitas pesapa (pendengar atau pembaca) bersifat reseptif. Aktivitas di dalam diri pesapa internal sedangkan hubungan penyapa dan pesapa bersifat interpersonal dalam Sudaryat (2009: 106). Salah satu gagasan penting dari Fairclough adalah mengenai intertekstualitas, yang dikembangkan dari pemikiran Julia Kristeva dan Michael Bakhtin. Intertekstualitas adalah sebuah istilah dimana teks dan ungkapan dibentuk oleh teks yang datang sebelumnya, saling menanggapi dan salah satu bagian dari teks tersebut mengantisipasi lainnya.

a. Wacana Tulis

Wacana tulis artinya wacana yang disampaikan dengan bahasa tulis atau melalui media tulis. Untuk dapat menerima dan memahami wacana tulis maka sang penerima atau pesapa harus membacanya. Di dalam wacana tulis terjadi komunikasi secara tidak langsung antara penulis dengan pembaca. Wacana tulis (*written discourse*) adalah jenis wacana yang disampaikan melalui tulisan. Berbagai bentuk wacana sebenarnya dapat dipresentasikan atau direalisasikan melalui tulisan. Sampai saat ini, tulisan masih merupakan media yang sangat efektif dan efisien untuk menyampaikan gagasan, wawasan, ilmu pengetahuan, atau apapun yang dapat mewakili kreatifitas manusia dalam Mulyana (2005: 51-52). Wujud wacana dalam bentuk tulisan dalam Aliah (2009: 11) sebagai berikut

1. Sebuah teks tertulis yang dibentuk oleh lebih dari satu alinea yang menggunakan sesuatu secara berurutan dan utuh, misalnya sebuah cerita, sebuah uraian sepucuk surat dan sebagainya;

2. Sebuah alinea merupakan sebuah wacana apabila teks itu hanya terdiri dari satu alinea, atau apabila kandungan sebuah alinea itu memiliki kesatuan misi korelasi dan di situasi yang utuh;
3. Sebuah wacana mungkin dapat dibentuk oleh sebuah kalimat majemuk beranak cucu atau dengan kalimat majemuk rapatan atau sistem elips unsur tertentu.

Goody mengemukakan bahwa bahasa tulis mempunyai dua fungsi: yang pertama adalah fungsi penyimpanan yang memungkinkan komunikasi tanpa tergantung pada waktu dan ruang, dan yang kedua adalah 'memindahkan bahasa dari bidang oral ke bidang visual' dan memungkinkan kata-kata serta kalimat-kalimat diamati lepas dari konteks aslinya, 'yang di situ tampil dalam konteks yang sangat berbeda dan sangat 'abstrak' dalam Brown (1996: 13).

b. Wacana Lisan

Wacana lisan (*spoken discourse*) adalah jenis wacana yang disampaikan secara lisan atau langsung dengan bahasa verbal. Jenis wacana ini sering disebut sebagai tuturan (*speech*) atau ujaran (*utterance*). Adanya kenyataan bahwa pada dasarnya bahasa kali pertama lahir melalui mulut atau lisan. Oleh karena itu, wacana yang utama, primer, dan sebenarnya adalah wacana lisan dalam Mulyana (2005:52). Sementara itu, wacana lisan berarti wacana yang disampaikan dengan bahasa lisan atau media lisan. Untuk dapat menerima dan memahami wacana lisan maka sang penerima atau pesapa harus menyimak atau mendengarkannya. Di dalam wacana lisan terjadi komunikasi secara langsung antara pembicara dan pendengar dalam Sumarlam (2003: 16). Wujud wacana dalam bentuk lisan dalam Aliah (2009: 10) sebagai berikut

1. Sebuah percakapan atau dialog yang lengkap dari awal sampai akhir, misalnya satu obrolan singkat dalam satu situasi;
2. Suatu penggalan percakapan dalam rangkaian percakapan yang lengkap yang telah menggambarkan suatu situasi, maksud, dan rangkaian penggunaan bahasa.

2.4 Konstruksi Media Melalui Wacana

Dalam penjelasan ontologi paradigma konstruktivis, realitas merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Individu mengkonstruksi realitas sosial, dan mengkonstruksikannya dalam dunia realitas, memantapkan realitas itu berdasarkan subjektivitas individu lain dalam institusi sosialnya dalam Bungin (2006: 191-193). Berger dan Luckmann (1990) mengatakan, terjadi dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Proses dialektika ini terjadi melalui eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi dalam Bungin (2006: 195). Menurut Frans M. Parera, dialektika ini berlangsung dalam proses dengan tiga momen simultan, (1) *ekternalisasi* (penyesuaian diri) dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia; (2) *objektivasi*, yaitu interaksi sosial yang terjadi dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi; sedangkan (3) *internalisasi*, yaitu proses yang mana individu mengidentifikasi dirinya dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya dalam Bungin (2006: 197). Pendekatan konstruksi sosial atas realitas terjadi secara simultan. Proses konstruksi sosial media massa melalui tahap-tahap sebagai berikut: (a) tahap menyiapkan materi konstruksi; (b) tahap sebaran konstruksi; (c) tahap pembentukan konstruksi; dan (d) tahap konfirmasi dalam Bungin (2006: 207).

Pendekatan Fairclough intinya menyatakan bahwa wacana merupakan bentuk penting praktik sosial yang mereproduksi dan mengubah pengetahuan, identitas dan hubungan sosial yang mencakup hubungan kekuasaan dan sekaligus dibentuk oleh struktur dan praktik sosial yang lain dalam Jorgensen (2007: 123). Media massa mengkonstruksi cara individu memandang teks berita sesuai dengan ideologi yang dianut oleh media massa. Berita mengenai maritim yang ada dalam surat kabar baik cetak, elektronik dan internet merupakan bagian dari wacana yang diproduksi oleh media massa. Wacana berkontribusi pada pengonstruksian antara lain identitas sosial, hubungan sosial dan sistem pengetahuan dan makna dalam Jorgensen (2007: 126).

2.5 Pengertian Berita

Berita secara sosiologis dapat digambarkan sebagai segala hal yang terjadi di dunia. Dalam gambaran yang sederhana, seperti digambarkan oleh pakar jurnalistik, berita adalah apa yang ditulis surat kabar, apa yang disiarkan radio, dan apa yang ditayangkan televisi. Berita menampilkan realitas yang dikonstruksikan oleh pemakai bahasa dengan pertaruhan wacana didalamnya. Menurut Charnley dan James M. Neal menyatakan bahwa berita adalah laporan tentang suatu peristiwa, opini, kecenderungan, situasi, kondisi, interpretasi yang penting, menarik masih baru dan harus secepatnya disampaikan kepada khalayak dalam Sumadiria (2005: 64). Sedangkan menurut Paul De Massenner dalam buku “*Here’s The News: Unesco Associate*”, menyatakan bahwa “*news*” atau berita adalah sebuah informasi yang penting dan menarik perhatian serta minat khalayak pendengar dalam Sumadiria (2005: 65).

Berita dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori yakni berita berat (*hard news*) dan berita ringan (*soft news*). Selain itu, berita juga dapat dibedakan menurut lokasi peristiwanya, di tempat terbuka atau tertutup.

Sedangkan berdasarkan sifatnya, berita bisa dipilah menjadi berita diduga dan tidak diduga. Selebihnya, berita juga bisa dilihat menurut materi isinya yang bermacam-macam dalam Sumadiria (2005: 65).

Berdasarkan materi isinya, berita dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori dalam Sumadiria (2005: 67) antara lain

1. Berita pernyataan pendapat, ide atau gagasan (*talking news*)
2. Berita ekonomi (*economic news*)
3. Berita keuangan (*financial news*)
4. Berita politik (*political news*)
5. Berita sosial kemasyarakatan (*social news*)
6. Berita pendidikan (*education news*)
7. Berita hukum dan keadilan (*law and justice news*)
8. Berita olah raga (*sport news*)
9. Berita kriminal (*crime news*)
10. Berita bencana dan tragedi (*tragedy and disaster news*)
11. Berita perang (*war news*)
12. Berita ilmiah (*scientific news*)
13. Berita hiburan (*entertainment news*)
14. Berita tentang aspek-aspek ketertarikan manusiawi atau minat insani (*human interest*)

2.6 Gambaran Umum Kompas.com

2.6.1 Sejarah Kompas.com

Kompas.com dimulai pada tahun 1995 dengan nama *kompas online*. Kompas online pada awalnya hanya berperan sebagai edisi internet dari harian Kompas. Di tahun 1998, *kompas online* bertransformasi menjadi Kompas.com yang berfokus pada pengembangan isi desain dan strategi pemasaran yang baru. Pada tahun 2008, Kompas.com mengusung ide *reborn*

dengan membawa logo, tata letak dan konsep yang baru. Kompas.com sebagai media online yang membawa sumber informasi yang lengkap tidak hanya melalui teks, tetapi menyediakan gambar, video dan *live streaming*. Perubahan yang dilakukan oleh Kompas.com mendorong bertambahnya pengunjung aktif Kompas.com di awal 2008 yang mencapai 20 juta pembaca aktif per bulan dan total 40 juta *page views/impression* per bulan. Kompas.com telah mencapai 120 juta pengunjung per bulan.

Di tahun 2008, Kompas.com menampilkan *channel-channel* atau kanal-kanal di halaman depan yang didesain sesuai dengan tema berita dan dikelompokkan dengan karakter berita yang sama antara lain

- a. Kompas *female*
merupakan salah satu kanal yang memuat informasi seputar dunia wanita, tips-tips seputar karir, kehamilan, trik keuangan dan informasi belanja;
- b. Kompas bola
merupakan salah satu kanal yang menjadi tempat untuk mengetahui *update* skor, berita seputar tim dan pertandingan sepak bola;
- c. Kompas *health*
merupakan salah satu kanal yang memuat tentang tips-tips dan artikel kesehatan, informasi media terbaru beserta fitur informasi kesehatan interaktif;
- d. Kompas tekno
memuat mengenai ulasan seputar *gadget* terbaru di pasaran, menampilkan *review* produk dan beragam berita teknologi;
- e. Kompas *entertainment*
merupakan salah satu kanal yang menyajikan informasi atau berita-berita selebriti, ulasan film, musik dan hiburan dalam dan luar negeri;

- f. Kompas otomotif
memuat berita-berita seputar kendaraan, tren mobil dan motor terbaru serta tips-tips merawat kendaraan;
- g. Kompas properti
menampilkan direktori lengkap properti dan artikel tentang rumah, apartemen serta hunian;
- h. Kompas *images*
merupakan salah satu kanal yang menyajikan foto-foto berita berkualitas dalam resolusi tinggi hasil pilihan editor foto Kompas.com;
- i. Kompas karir
merupakan kanal yang tak hanya berfungsi sebagai direktori lowongan kerja, namun juga sebagai *one stop career solution* bagi para pencari kerja maupun karyawan.

Kompas.com juga telah menciptakan komunitas menulis dengan konsep *citizen journalism* dalam kompasiana. Setiap warga kompasiana dapat mewartakan peristiwa, menyampaikan pendapat dan gagasan serta menyalurkan aspirasi dalam bentuk tulisan, gambar ataupun rekaman audio dan video. Kompasiana juga melibatkan kalangan jurnalis Kompas Gramedia dan para tokoh masyarakat, pengamat serta pakar dari berbagai bidang keahlian dan disiplin ilmu untuk ikut berbagi informasi, pendapat dan gagasan. Kompasiana telah berhasil membangun komunitas jurnalisme warga yang mencapai lima puluh ribu anggota dengan setiap harinya mengeluarkan tiga ratus hingga empat ratus tulisan. Kompas.com juga dapat diakses melalui *handphone* atau dapat diunduh sebagai aplikasi gratis di *smartphone blackberry* dan IPAD.

Tahun 2013, Kompas.com kembali melakukan perubahan tampilan halaman yang lebih rapi dan bersih serta fitur baru yang lebih personal. Pembaca Kompas.com dapat menggunakan fitur personalisasi yang dapat memudahkan pembaca untuk memilih sendiri berita apa yang ingin dibaca. Tahun 2013 juga merupakan tahun perubahan identitas bagi Kompas.com. Perubahan tidak hanya dapat dinikmati pada halaman muka Kompas.com, tetapi juga logo. Kompas.com mengambil simbol 2 (dua) segitiga yang tumpang tindih sebagai bentuk representasi panah penunjuk arah yang sejalan dengan nilai dari Kompas.com sebagai pedoman berita bagi pembacanya. Perbedaan sudut rotasi di antara kedua segitiga diartikan sebagai kebebasan dalam memilih pandangan dan pendapat bagi pembacanya. Sementara, 3 (tiga) warna dasar dan masing-masing turunannya dimaksudkan untuk menggambarkan beragamnya individu pembaca Kompas.com. Tipe logo dari Kompas.com merupakan perpaduan dari dua unsur, yaitu tulisan "Kompas" yang menjadi simbol historis serta merupakan bagian dari grup Kompas Gramedia dan ".com" yang merupakan identitas bisnis perusahaan sekaligus alamat URL dari portal berita digital ini. Kompas.com juga menggunakan *tagline* "rayakan perbedaan" sebagai wujud semangat menghargai perbedaan dan keberagaman dalam memenuhi kebutuhan berita berbagai pembacanya. (<http://inside.kompas.com/about-us>)

2.6.2 Pemimpin Kompas.com

Kompas.com merupakan bagian dari Kompas Gramedia (KG) yang saat ini dipimpin oleh Agung Adiprasetyo. Sedangkan Kompas.com saat ini dibawah kepemimpinan Edi Taslim. Edi Taslim lahir di Pulau Tello pada tanggal 15 Juli 1974. Edi Taslim juga memiliki akun jejaring sosial Twitter dengan nama akun @etaslim. Tahun 1983-1984 ia menjadi anak didik di TK Santa Mariana (Padang, Indonesia) kemudian tahun 1984-1989 belajar di SD

Santa Theresia (Padang, Indonesia), tahun 1989-1991 belajar di SMP Santa Maria (Padang, Indonesia). tahun 1991-1993 belajar di SMAK Stella Maris (Surabaya, Indonesia) dan melanjutkan jenjang pendidikan tinggi diploma Sastra Jerman di Universitas Indonesia pada tahun 1993-1996.

Edi Taslim memiliki jenjang karir yang baik. Pada November 1996-Oktober 2003 ia menjabat sebagai *Founder/Editor* Majalah CHIP (PT. Elex Media Komputindo Jakarta, Indonesia). Bulan Oktober 2003-Mei 2008 menjabat sebagai *Group Editor-in-Chief of IT Magazine* (PT. Elex Media Komputindo Jakarta, Indonesia). Selain menjabat di perusahaan tersebut, ia juga menjadi *CEO dan Editorial Director* pada Januari 2004-Juli 2005 (CHIP Media Sdn. Bhd Kuala Lumpur, Malaysia dan CHIP Media Pte. Ltd Singapore). Pada Juli 2007-Mei 2008 menjadi Wakil GM Bisnis Kompas.com (PT. Kompas Cyber Media Jakarta, Indonesia) kemudian naik jabatan menjadi GM Bisnis Kompas.com pada Mei 2008-Juli 2011. Tidak hanya sebagai orang penting di Kompas.com juga memiliki posisi Wakil Direktur Bisnis di Harian Kompas pada Februari 2010-Juli 2011. Pada Agustus 2011-sekarang menjadi Wakil Direktur Kompas.com. Pada Juli 2011-November 2013 menjadi Direktur Midazz.com (PT. Midazz Cyber Asia Jakarta, Indonesia). Pada April 2012-sekarang menjadi Direktur Urbanesia.com (PT. Ayoklik Jakarta, Indonesia) disusul menjadi Direktur Grazera.com (PT. Gramedia Digital Jakarta, Indonesia) pada Juni 2012-sekarang. Pada April 2013-sekarang menjabat sebagai Komisaris mandiri e-cash (PT. Digital Artha Media Jakarta, Indonesia) dan Komisaris SCOOP Apps Foundry Pte. Lte. Singapore. Pada Juni 2013-sekarang menjabat sebagai Digital Group Director Kompas Gramedia Jakarta, Indonesia. pada Mei 2015-sekarang menjabat sebagai Direktur Juara.net (PT. Uninet Bhaktinusa Jakarta, Indonesia).

Edi Taslim memulai karirnya di Kompas Gramedia (KG) pada akhir tahun 1996 sebagai pendiri dan editor majalah CHIP, majalah komputer dengan lisensi dari Jerman. Dengan kesuksesan CHIP di Indonesia, ia memimpin ekspansi perusahaan pada tahun 2004-2006 dengan menerbitkan majalah CHIP lewat perusahaan di Singapura dan Malaysia sebagai CEO sekaligus Direktur Editorial. Tahun 2007, ia kembali menetap di Jakarta dan berperan utama dalam memformulasikan ulang dan rebranding KCM menjadi Kompas.com, situs berita terkemuka di Indonesia. Akhir 2008, Kompas.com meluncurkan Kompasiana sebagai *journalist's blog network* yang sukses menjadi *citizen journalism site* terbesar di Indonesia.

Edi Taslim yang lahir pada tanggal 15 Juli 1974 ini juga pernah bertugas sebagai Wakil Direktur Bisnis di Harian Kompas sejak awal 2010-2011. Lewat inisiatif Kompas MMM (Multimedia, Multichannel, Multiplatform), ia bertugas menggerakkan strategi digital lewat sinergi antara Harian Kompas, Kompas.com dan Kompas TV. Bersama jajaran manajemen tertinggi di Kompas Gramedia, Edi Taslim mengarahkan strategi dan kebijakan bisnis digital sebagai Digital Group Director sejak 2012. Ia mulai memperluas jaringan Kompas Gramedia Digital Group dengan melakukan investasi di Urbanesia, situs direktori dan gaya hidup, sebagai pemilik saham mayoritas. Bekerja sama dengan penerbit buku Gramedia, ia melanjutkan portfolio digital dengan meluncurkan GramediaShop.com, toko buku online, yang berubah nama menjadi Grazer pada Juni 2013.

Pada awal 2013, Kompas Gramedia Digital Group memimpin Series B funding round SCOOP, digital newsstand populer berbasis di Singapura yang juga dipimpin oleh Edi Taslim sebagai Direktur. Pada tahun 2014, ia turut membidani peluncuran mandiri e-cash, solusi pembayaran digital berbasis mobile, melalui perusahaan joint-venture. Pada kuartal 1 2015, Edi Taslim

memimpin pengembangan vertical di Kompas.com dengan meluncurkan 3 bisnis digital baru, yaitu Otomania.com (situs informasi dan panduan otomotif) dan Nextren.com (situs tren teknologi). Baru-baru ini, pada awal Juni 2015, Kompas.com bersama Harian dan Tabloid Bola melakukan sinergi dan rebranding Bolanews.com menjadi situs olahraga Juara.net yang dipimpin oleh Edi Taslim sebagai Direktur. (<http://itkp.ac.id/itkpfounder?founder=edi>)

2. 6.3 Penghargaan yang Pernah Diraih Kompas.com

- a. Majalah SWA (2008) sebagai pemenang portal berita paling populer;
- b. CAKRAM Award (2008) sebagai pemenang perusahaan pengelola news portal;
- c. Adam Malik Award (2009) sebagai pemenang media online terbaik dalam pemberitaan luar negeri;
- d. *Empowering Talent* (2010) sebagai pemenang ke empat *English Debate Competition*;
- e. WAN IFRA (2010) menjadikan Kompasiana meraih *Silver Award* sebagai *User Generated Content*;
- f. Kompas Gramedia Award (2010) sebagai pemenang *The Best Performance Company 2009*;
- g. WAN IFRA (2011) memenangkan *Silver Award* sebagai *Best Newspaper Website in Asia*;
- h. Anugerah Warta Citra Adiwahana (2011) sebagai pemenang *Best Online News*;

- i. Gadget (2012) sebagai pemenang *The Most Favourite News Portal*;
- j. Majalah *Marketeers* dan *Markplus Insight* (2012) sebagai pemenang *Most Popular News Provider Brand*;
- k. *Batikday.com* (Kementerian BUMN) (2012) sebagai pemenang *Most Favorite Portal's Batik Cover Design*;
- l. Granat Award (2012) sebagai pemenang pemberitaan yang konsisten memerangi kejahatan narkoba.

2.6.4 Tim Manajemen Kompas.com

- a. Edi Taslim sebagai direktur;
- b. Ahmad Subechi sebagai manajer umum isi dari kompas.com;
- c. Tri Wahono sebagai editor pengolah berita;
- d. Agustinus Wisnubrata dan J. Heru Margianto sebagai asisten editor pengolah berita;
- e. Pepih Nugraha sebagai manajer kompasia;
- f. Dhanang Radityo sebagai manajer umum periklanan digital;
- g. Santi Rahayu dan Roro Sekar Wening sebagai asisten manajer periklanan digital;
- h. Tommy Anugroho sebagai asisten manajer pengembangan bisnis;
- i. Petrus Sarjito sebagai manajer grazer;
- j. Naomi Oktiva Corthyna Naibaho sebagai manajer kompas karir;
- k. Eberhard Nove Ojong dan Frank Gerard Jacobus Silitonga sebagai penasehat bagian media digital;
- l. Romi Dandiawan sebagai spesialis pengolahan produk;
- m. M. Trinovita sebagai manajer umum sumberdaya manusia;
- n. Holly Emalia sebagai asisten manajer keuangan;

- o. Murfi Abbas Hatumena dan Ihwan Santoso sebagai asisten manajer teknologi informasi;
- p. Riki Kurniadi sebagai manajer kreatif;
- q. Anastasia Angeline K sebagai sekretaris direktur.

2.6.5 Departemen Editorial Kompas.com

- a. Ahmad Subechi sebagai manajer umum isi kompas.com;
- b. Tri Wahono sebagai editor pengolah berita;
- c. Agustinus Wisnubrata dan J. Heru Margianto sebagai asisten editor pengolah berita;
- d. Laksono Hari Wiwoho, Fidel Ali Permana, Glori Kyrious Wadrianto, Farid Assifa, Caroline Sondang Andhikayani Damanik, Ana Shofiana Syatiri, Kistyarini, Hindra, Palupi Annisa Auliani, Desy Afrianti, Egidius Patnistik, Ervan Hardoko, Pipit Puspita Rini, Erlangga Djumena, Bambang Priyo Jatmiko, Albertus Tjatur Wiharyo, Aloysius Gonsaga Angi Ebo, Wicaksono Surya Hidayat, Muhammad Reza Wahyudi, Taslimah Widianti Kamil, Aris Fertony Harvenda, Lusia Kus Anna Maryati, Deasy Syafrina, I Made Asdhiana, Moh. Latip, Hilda Hastuti, Jodhi Yudono, dan Fikria Hidayat sebagai editor;
- e. Sandro Gatra Sinaga, Icha Rastika, Sabrina Asril, Fabian Januarius Kuwado, Robertus Belarminus Goo, Indra Akuntono, Josephus Primus, Antonius Tjahjo Sasongko, Yunanto Wiji Utomo, Ferril Dennys Sitorus, Okky Herman Dilaga, Ary Wibowo, Unoviana Kartika S, Oik Yusuf Araya, Maullana, Agung Kurniawan, Donny Apriliananda, Ichsan Suhendra, Christina Andhika Setyanti, Ni Luh

Made Pertiwi Finlandiari, Tabitha Diela, Febri Ardani Saragih, Dian Maharani, Azwar Ferdian, Reska Koko, dan Kurnia Sari Azizah sebagai reporter;

- f. Dino Oktaviano Sami Putra, Heribertus Kristianto Purnomo, dan Roderick Adrian Mozes sebagai editor foto dan fotografer;
- g. Erwin Kusuma Oloan Hutapea, Dimas Wahyu Trihardjanto, dan Eris Eka Jaya sebagai editor bahasa
- h. Tania Frederika Titaley, dan Ira Fauziah sebagai sekretaris administrasi

2.7 Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough

Analisis wacana, tentunya, adalah analisis atas bahasa yang digunakan. Maka, analisis itu tidak dapat dibatasi pada deskripsi bentuk bahasa yang tidak terikat pada tujuan dan fungsi yang dirancang untuk menggunakan bentuk tersebut dalam urusan-urusan manusia dalam Brown (1996: 1). Analisis terhadap wacana media biasanya menggunakan pendekatan analisis ragam tingkat (*multilevel analysis*). Dalam konteks ini, Fairclough menyatakan bahwa seorang peneliti, disamping memperhatikan hal-hal yang bersifat tekstual, ia juga harus memperhatikan hal-hal yang bersifat kontekstual dan ekstra media. Ia mengungkapkan konsep analisis antarteks (*intertextuality analysis*) dengan istilah “Analisis Wacana Kritis” (*Critical Discourse Analysis* atau CDA). Pendekatan ini disebut “wacana” (*discourse*) karena merupakan konsep yang digunakan oleh para ahli dan peneliti ilmu sosial dan ahli bahasa. Sedangkan disebut “kritis” (*critical*) karena keberadaannya diakui, baik dalam praktik sosial secara umum maupun dalam penggunaan bahasa secara khusus, memiliki hubungan sebab akibat yang

telah disadari sekalipun dalam kondisi yang normal. Wacana ini selalu merujuk pada penggunaan bahasa, baik lisan maupun tulisan dalam Zen (2004: 87).

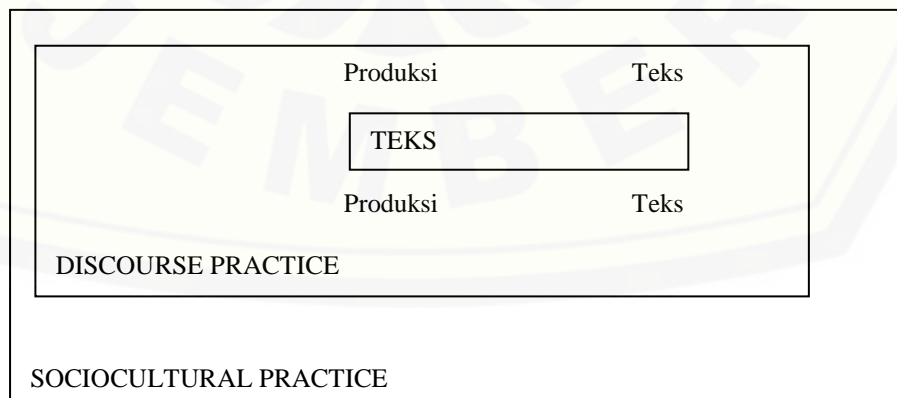
Analisis wacana kritis (AWK) adalah sebuah upaya atau proses (penguraian) untuk memberi penjelasan dari sebuah teks (realitas sosial) yang mau atau sedang dikaji oleh seseorang atau kelompok dominan yang kecenderungannya mempunyai tujuan tertentu untuk memperoleh apa yang diinginkan. Artinya dalam sebuah konteks harus disadari akan adanya kepentingan dalam Aliah (2009: 49). Menurut Fairclough dan Wodak, analisis wacana kritis melihat wacana-pemakai bahasa dalam tuturan dan tulisan-sebagai bentuk dari praktik sosial, menggambarkan wacana sebagai praktik sosial menyebabkan hubungan dialektis diantara peristiwa diskursif tertentu dengan situasi, institusi, dan struktur sosial yang membentuknya. Praktik wacana bisa jadi menampilkan efek ideologi: ia dapat memproduksi dan mereproduksi hubungan kekuasaan yang tidak imbang antara kelas sosial, laki-laki dan wanita, kelompok mayoritas dan minoritas melalui mana perbedaan itu direpresentasikan dalam posisi sosial yang ditampilkan dalam Eriyanto (2001: 7).

Menurut Fairclough dan Wodak (1997) AWK melihat pemakai bahasa baik tuturan maupun tulisan yang merupakan bentuk dari praktik sosial. Menggunakan wacana sebagai praktik sosial menyebabkan sebuah hubungan dialektis diantara peristiwa deskriptif tertentu dengan situasi, institusi, dan struktur sosial yang membentuknya. Praktik wacana bisa jadi menampilkan efek ideologi dalam Aliah (2009: 51). AWK dipakai untuk mengungkapkan tentang hubungan ilmu pengetahuan dan kekuasaan. Selain itu, AWK dapat digunakan untuk mengkritik. AWK dalam konteks sehari-hari digunakan untuk membangun kekuasaan, ilmu pengetahuan baru, regulasi dan normalisasi dan hegemoni (pengaruh satu bangsa terhadap bangsa lain). AWK

juga digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu, menerjemahkan, menganalisis dan mengeritik kehidupan sosial yang tercermin dalam teks atau ucapan dalam Aliah (2009: 53).

Titik perhatian Fairclough adalah melihat bagaimana pemakai bahasa membawa ideologi tertentu. Dalam hal ini dibutuhkan analisis yang menyeluruh. Bahasa secara sosial dan kritis adalah bentuk tindakan, dalam hubungan dialektik dengan struktur sosial. Fairclough membuat suatu model yang mengintegrasikan secara bersama-sama analisis wacana yang didasarkan pada lingustik, pemahaman sosial dan politik, dan secara umum diintegrasikan pada perubahan sosial. Oleh karena itu, model yang dikemukakan oleh Fairclough ini sering juga disebut model perubahan sosial (*social change*) dalam Aliah (2009: 89).

Fairclough membagi analisis wacana ke dalam tiga dimensi antara lain teks, praktik wacana dan praktik sosial budaya. Teks disini dianalisis secara lingustik, dengan melihat kosakata, semantik dan tata kalimat. Praktik wacana menitikberatkan pada proses produksi dan konsumsi teks. Sedangkan praktik sosial budaya berhubungan dengan konteks diluar teks. Konteks disini memasukkan banyak hal, seperti konteks situasi, lebih luas adalah konteks dari praktik institusi dari media sendiri dalam hubungannya dengan masyarakat atau budaya dan politik tertentu. Ketiga dimensi tersebut dapat digambarkan dalam Eriyanto (2001: 288) sebagai berikut



Sebelum dimensi tersebut dianalisis, kita perlu melihat praktik diskursif dari komunitas bahasa yang disebut sebagai *order of discourse*. *Order of discourse* adalah hubungan di antara tipe yang berbeda, seperti tipe diskursif, ruang kelas, dan kerja, semuanya memberikan batas-batas bagaimana teks diproduksi dan dikonsumsi dalam Eriyanto (2001: 288). Bukan hanya pada struktur wacana, apa yang dibicarakan, tetapi juga pemakaian bahasa yang berbeda-beda pula. Pemakai bahasa menyesuaikan dengan praktik diskursif di tempat mana ia berada, ia tidak bebas memakai bahasa. Ketika menganalisis teks berita perlu dilihat dulu *order of discourse* dari berita tersebut: apakah berita tersebut berbentuk *hardnews*, *features*, artikel, ataukah editorial. Ini akan membantu peneliti dalam memaknai teks.

2.8 Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough Pada Level Teks

Fairclough melihat teks dalam berbagai tingkatan. Sebuah teks bukan hanya menampilkan bagaimana suatu objek digambarkan tetapi juga bagaimana suatu objek digambarkan tetapi juga bagaimana hubungan antarobjek didefinisikan dalam Eriyanto (2001: 289). Dalam model Fairclough, teks dianalisis secara linguistik, dengan melihat kosakata, semantik dan tata kalimat. Ia juga memasukkan koherensi dan kohesivitas, bagaimana antara kata atau kalimat tersebut digabung sehingga membentuk pengertian, semua elemen yang dianalisis tersebut dipakai untuk melihat tiga masalah tersebut dalam Aliah (2009: 89).

2.8.1 Representasi

a. Representasi dalam anak kalimat

Aspek ini berhubungan dengan bagaimana seseorang, kelompok, peristiwa, dan kegiatan ditampilkan dalam teks, dalam hal ini bahasa yang dipakai. Menurut Fairclough, pemakai bahasa dihadapkan pada paling tidak dua pilihan. Pertama, pada tingkat kosakata (*vocabulary*): kosakata apa yang dipakai untuk menampilkan dan menggambarkan

sesuatu, yang menunjukkan bagaimana sesuatu tersebut dimasukkan dalam satu set kategori. Kedua, pilihan yang didasarkan pada tingkat *grammar* (tata bahasa) dalam Eriyanto (2001: 290). Pemakai bahasa dapat memilih, apakah seseorang, kelompok, atau kegiatan tertentu hendak ditampilkan sebagai sebuah tindakan (*action*) ataukah sebagai sebuah peristiwa (*event*). Pemilihan kosakata sangat menentukan karena berhubungan dengan pertanyaan bagaimana realitas ditandakan dalam bahasa dan bagaimana bahasa itu memunculkan realitas bentukan tertentu. Sedangkan pada tingkat tata bahasa mengarah pada dua hal yaitu tata bahasa merujuk pada bentuk proses atau partisipan.

b. Representasi dalam kombinasi anak kalimat

Realitas terbentuk lewat bahasa dengan gabungan antara satu anak kalimat dengan anak kalimat yang lain. Gabungan antara anak kalimat ini akan membentuk koherensi lokal, yakni pengertian yang didapat dari gabungan anak kalimat satu dengan yang lain, sehingga kalimat itu memiliki arti. Koherensi ini pada titik tertentu menunjukkan ideologi dari pemakai bahasa dalam Eriyanto (2001: 294).

c. Representasi dalam rangkaian antarkalimat

Representasi ini berhubungan dengan bagian mana dalam kalimat yang lebih menonjol dibandingkan dengan bagian yang lain. Salah satu aspek penting adalah apakah partisipan dianggap mandiri ataukah ditampilkan memberikan reaksi dalam teks berita dalam Eriyanto (2001: 296). Disini, pemakai bahasa dapat membentuk wacana melalui berita yang diproduksi dengan menunjuk siapa yang ingin ditampilkan secara dominan.

2.8.2 Relasi

Relasi berhubungan dengan bagaimana partisipan dalam media berhubungan dan ditampilkan dalam teks. Media di sini dipandang sebagai

suatu arena sosial, di mana semua kelompok, golongan, dan khalayak yang ada dalam masyarakat saling berhubungan dan menyampaikan versi pendapat dan gagasannya. Paling tidak, menurut Fairclough, ada tiga kategori partisipan utama dalam media: wartawan (memasukkan diantaranya reporter, redaktur, pembaca berita untuk televisi dan radio), khalayak media, dan partisipan publik, memasukkan diantaranya politisi, pengusaha, tokoh masyarakat, artis, ulama, ilmuwan, dan sebagainya dalam Eriyanto (2001: 300). Titik perhatian dari analisis hubungan, bukan pada bagaimana partisipan publik tadi ditampilkan dalam media (representasi), tetapi bagaimana pola hubungan di antara ketiga aktor tadi ditampilkan dalam teks dalam Eriyanto (2001: 300).

2.8.3 Identitas

Aspek identitas ini terutama dilihat oleh Fairclough dengan melihat identitas wartawan ditampilkan dan dikonstruksi dalam teks pemberitaan. Posisi wartawan dapat diidentifikasi dengan keterlibatan dalam kelompok sosial atau masalah yang diberitakan dalam Eriyanto (2001: 303). Identitas ini akan menentukan bagaimana teks itu dibuat, bagaimana bahan-bahan itu ditulis ke dalam teks berita. Identitas bukan hanya dilekatkan dan berkaitan dengan wartawan, tetapi juga bagaimana partisipan publik tersebut diidentifikasi, dan bagaimana khalayak diidentifikasi. Identifikasi ini akan menentukan bagaimana wacana yang ingin ditampilkan kepada khalayak dalam Eriyanto (2001: 305).

2.9 Pandangan Kritis Melihat Media dan Berita

2.9.1 Fakta

Bagi kaum kritis, realitas merupakan kenyataan semu yang telah terbentuk oleh proses kekuatan sosial, politik dan ekonomi. Oleh karena itu, mengharapkan realitas apa adanya tidak mungkin, karena sudah tercelup oleh

kelompok ekonomi dan politik yang dominan dalam Eriyanto (2001: 34). Mengutip Stuart Hall, realitas tidaklah secara sederhana dapat dilihat sebagai satu set fakta, tetapi hasil dari ideologi atau pandangan tertentu. Definisi mengenai realitas ini diproduksi secara terus-menerus melalui praktik bahasa (yang dalam hal ini) selalu bermakna sebagai pendefinisian secara selektif realitas yang hendak ditampilkan dalam Eriyanto (2001: 34);

2.9.2 Posisi media

Pandangan kritis melihat media bukan hanya alat dari kelompok dominan, tetapi juga memproduksi ideologi dominan. Media membantu kelompok dominan menyebarkan gagasannya, mengontrol kelompok lain, dan membentuk konsensus antar anggota komunitas. Lewat medialah, ideologi dominan, apa yang baik dan apa yang buruk dimapankan dalam Eriyanto (2001: 36);

2.9.3 Posisi wartawan

Aspek etika, moral, dan nilai-nilai tertentu tidak mungkin dihilangkan dari pemberitaan media. Wartawan bukanlah robot yang meliput apa adanya, apa yang dia lihat. Moral yang dalam banyak hal berarti keberpihakan pada satu kelompok atau nilai tertentu-umunya dilandasi oleh keyakinan tertentu-adalah bagian yang integral dan tidak terpisahkan dalam membentuk dan mengkonstruksi realitas dalam Eriyanto (2001: 40). Pandangan kritis bahkan menilai bahwa wartawan pada dasarnya adalah partisipan dari kelompok yang ada dalam masyarakat. Wartawan adalah bagian dari kelompok atau kelas tertentu dalam masyarakat, sehingga pemberitaan yang dilakukan oleh wartawan pada dasarnya sukar dihindari sikap partisipan. Wartawan mempunyai nilai-nilai tertentu yang hendak dia perjuangkan yang berpengaruh besar dalam isi pemberitaan. Hasil akhirnya tentu saja adalah pemihakan pada kelompok sendiri dan memperburuk kelompok lain dalam Eriyanto (2001: 41);

2.9.4 Hasil liputan

Wartawan adalah bagian terkecil saja dari struktur sosial, ekonomi, dan politik yang lebih besar. Pengaruh modal dan kepemilikan, politik kelas sangat mempengaruhi fakta apa yang harus diambil dan bagaimana berita itu dibahasakan. Persoalannya bukan wartawan tidak objektif, tetapi struktur di luar diri wartawan tersebut yang mempropagandakan nilai-nilai tertentu. Struktur yang secara umum menindas tersebut yang berpengaruh dalam pemberitaan dalam Eriyanto (2001: 45).

2.10 Konstruksi Pemberitaan Maritim

Pemberitaan mengenai maritim di media online merupakan salah satu bagian dari wacana tulis yang digunakan oleh media untuk mengkonstruksi realitas yang ada di masyarakat. Pemberitaan merupakan bagian dari wacana tulis yang bermanfaat besar bagi masyarakat karena berita yang muncul melalui media massa berpengaruh besar bagi masuknya pengetahuan akan realitas sosial yang berada jauh di luar individu. Media massa merupakan salah satu medium komunikasi politik dan sosial pada masyarakat. Isi media pada hakikatnya adalah hasil konstruksi realitas dengan bahasa sebagai perangkat dasarnya. Sedangkan bahasa bukan saja sebagai alat merepresentasikan realitas, namun juga bisa menentukan relief seperti apa yang akan diciptakan oleh bahasa tentang realitas tersebut. Akibatnya, media massa mempunyai peluang yang sangat besar untuk mempengaruhi makna dan gambaran yang dihasilkan dari realitas yang dikonstruksikannya (Sobur, 2004: 88).

Pemberitaan mengenai maritim dalam media online nasional khususnya pada media online Kompas.com, rupanya sangat gencar memberitakan mengenai pembangunan infrastruktur maritim, masalah pertahanan laut dan kerjasama yang dilakukan oleh presiden Jokowi mengenai

maritim dengan beberapa negara. Pemberitaan tersebut pada dasarnya bukan hanya peristiwa yang terjadi di negara dan masyarakat semata. Tetapi pembentukan berita maritim yang ada di media online merupakan susunan dari realitas-realitas terhadap suatu peristiwa sehingga membentuk sebuah wacana yang bermakna. Dengan demikian, seluruh isi media adalah realitas yang dikonstruksikan (*constructed reality*) dalam bentuk wacana yang bermakna (Hamad, 2004:10). Proses konstruksi sosial media massa melalui tahap-tahap sebagai berikut: (a) tahap menyiapkan materi konstruksi; (b) tahap sebaran konstruksi; (c) tahap pembentukan konstruksi; dan (d) tahap konfirmasi dalam Bungin (2006: 207). Wacana berkontribusi pada pengonstruksian antara lain identitas sosial, hubungan sosial dan sistem pengetahuan dan makna dalam Jorgensen (2007: 126).

Pemberitaan di media online khususnya Kompas.com banyak mempublikasikan berita yang berhubungan dengan pembangunan. Pembangunan dalam bidang maritim mengambil peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan di segala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan rencana tertentu dalam Soekanto (2007: 358). Pembangunan wilayah maritim adalah pembangunan seluruh wilayah perairan Indonesia dengan segenap sumberdaya alam yang terkandung didalamnya untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Hal ini berimplikasi pada pembuatan kebijakan dan strategi pembangunan yang dibuat pemerintah. Pembangunan maritim yang dilakukan oleh pemerintah dapat berupa pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi seperti pelabuhan, pabrik pengolahan ikan, pabrik pembuatan kapal, dan lain-lain. Pembangunan infrastruktur dalam sebuah sistem menjadi penopang kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam lingkup tertentu. Infrastruktur merupakan wadah sekaligus katalisator dalam sebuah pembangunan. Ketersediaan infrastruktur dapat

meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya sehingga dapat meningkatkan produktivitas dalam kegiatan perekonomian. Pembangunan infrastruktur khususnya di bidang maritim diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat pada umumnya dan kesejahteraan masyarakat nelayan pada khususnya.

Kesejahteraan masyarakat nelayan di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh minimnya program-program pemerintah yang pro dengan nasib nelayan. Untuk itu, asuransi bagi nelayan dapat dijadikan alternatif solusi.

Program asuransi sebagai tulang-punggung jaminan sosial bagi nelayan memiliki alasan yang kontekstual untuk diikuti oleh nelayan. Pertama, kegiatan melaut adalah kegiatan yang memiliki nilai spekulatif tinggi sehingga nelayan tidak bisa memprediksi jumlah pendapatan yang bisa dibawa pulang. Kedua, investasi di sektor perikanan memerlukan biaya yang besar sehingga dibutuhkan biaya yang besar pula, misalnya untuk operasional, rekrutmen nelayan buruh, dan pemeliharaan alat tangkap. Ketiga, kegiatan melaut sangat beresiko terhadap keselamatan jiwa dan kesehatan badan. Keempat, kawasan pesisir umumnya rawan penyakit dan kualitas sumber daya manusianya rendah jika dilihat dari rata-rata tingkat pendidikan masyarakatnya dalam Kusnadi (2007: 14).

Keamanan wilayah perairan Indonesia juga menjadi bagian penting dalam isu kemaritiman. Dalam keamanan maritim, keamanan tidak hanya merujuk pada pertahanan laut terhadap ancaman militer asing tetapi telah meluas ke dalam perlindungan terhadap keletarian alam, jalur perdagangan, pemberantasan aksi ilegal di laut. Keamanan laut atau maritim bukan hanya menyangkut penegakan hukum di laut saja, melainkan laut dapat menjadi wilayah yang aman digunakan oleh pengguna dan bebas dari ancaman atau gangguan terhadap berbagai aktifitas pemanfaatan laut, antara lain :

1. Laut bebas dari ancaman kekerasan, termasuk ancaman penggunaan kekuatan bersenjata yang dinilai dapat mengganggu dan membahayakan kedaulatan negara;
2. Laut yang bebas dari ancaman terhadap navigasi, yaitu ancaman yang ditimbulkan oleh kondisi geografi dan hidrografi yang membahayakan keselamatan pelayaran;
3. Laut yang bebas dari pencemaran dan perusakan ekosistem, yaitu ancaman terhadap kelestarian lingkungan yang dampaknya merugikan masyarakat sekitar dan generasi yang akan datang;
4. Laut yang bebas dari ancaman pelanggaran hukum, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan hukum nasional dan internasional yang berlaku seperti *illegal fishing* dan lain-lain.

Masalah penangkapan ikan secara ilegal masih marak terjadi di perairan Indonesia. Kemampuan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian dinilai kurang memadai karena keterbatasan sarana dan prasarana yang kita miliki. Pemerintah cukup banyak menghadapi masalah dalam hal perusakan dan pencemaran lingkungan laut seperti penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, pengambilan terumbu karang secara besar-besaran dan pembuangan zat-zat yang berbahaya dari kapal-kapal. Bahkan praktek IUU Fishing (*illegal, unreported, unregulated fishing*) di wilayah laut Indonesia ini menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perekonomian negara serta membahayakan harga diri dan kedaulatan bangsa Indonesia. Belum terbangunnya wawasan kemaritiman nasional yang kuat telah berpengaruh besar terhadap kepedulian kemaritiman dari berbagai pihak.

Kesadaran masyarakat Indonesia sebagai bangsa bahari atau maritim masih tergolong rendah. Hal ini dapat disaksikan dengan minimnya tingkat konsumsi ikan. Mengingat, wilayah laut Indonesia lebih luas dari daratan. Ada beberapa variabel yang ternyata menyebabkan rendahnya minat masyarakat kita untuk makan ikan.

Pertama, problem sosiologis. Di kalangan masyarakat pesisir, pola makan ternyata ada kaitannya dengan status sosial. Semakin sering orang makan daging (*red meat*) maka semakin tinggi pula status sosialnya sehingga orang berlomba-lomba untuk mengonsumsi daging hanya karena status sosial. Kedua, problem ekonomi, yakni rendahnya daya beli masyarakat. Ini umumnya terjadi kepada masyarakat yang secara geografis tinggal di wilayah pedalaman (*up land*) dan jauh dari laut. Ketiga, pengaruh globalisasi pangan dalam Satria (2009: 234-235).

Tidak hanya dalam hal mengonsumsi ikan, potensi wisata bahari atau laut Indonesia belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Peran serta pemerintah sebagai *stake holder* untuk menumbuhkan kesadaran akan keindahan laut Indonesia penting dilakukan dengan beberapa program maritim seperti peringatan hari Nusantara. Membangun kesadaran masyarakat mengenai isu kemaritiman tidak dapat dibebankan kepada pemerintah saja. Media mengambil peranan penting dalam mengkonstruksi realitas tanpa terkecuali mengenai isu kemaritiman. Dalam hal ini, untuk membantu memasyarakatkan wawasan maritim adalah peranan media massa elektronik dalam pemberitaan isu-isu tentang masyarakat pesisir atau masyarakat kontemporer dalam Kusnadi (2007:117). Publikasi isu-isu aktual dan kontemporer kemaritiman atau persoalan pembangunan kawasan pesisir dan laut secara konsisten sangat berperan besar membentuk opini publik dan memupuk kepedulian masyarakat Indonesia terhadap kebijakan nasional kemaritiman dalam Kusnadi (2007:125). Namun, realita yang ada mengatakan hal yang lain. Ini terlihat dari sedikitnya ruang yang diberikan media dalam mengangkat isu-isu kemaritiman. Akibatnya, kemiskinan publikasi, khususnya publikasi yang berbasis disiplin keilmuan, seperti antropologi-sosiologi maritim, ekonomi maritim, industri maritim, hukum laut atau hak ulayat laut, politik masyarakat maritim, komunikasi masyarakat maritim, dan sejarah maritim dalam Kusnadi (2007: 114).

2.11 Penelitian Terdahulu

2.11.1 Skripsi Raudlatul Jannah

Sasaran yang ditelaah	Penelitian
Judul Penelitian	Prostitusi, pengkuan dan kriminalitas konstruksi identitas waria oleh media
Pertanyaan penelitian	Bagaimana media mengkonstruksi identitas waria dalam pemberitannya?
Temuan penelitian	Waria dikonstruksi melalui berita tentang prostitusi, waria dikonstruksi melalu pemberitaan yang mendiskriminasi, media juga mengonstruksi waria dalam pemberitaan mengenai kriminalitas.
Metode	Analisis wacana teks (CDA) pada level teks saja
Penelitian terdahulu sebagai acuan	Koeswinarno (2004) mengenai waria; Suryakusumah (2011) mengenai waria
Teori yang dipakai	Foucault tentang sejarah seksualitas
Perbedaan dengan penelitian ini	Mengenai kekhususannya pada konstruksi waria oleh media
Keunggulan penelitian	Menjelaskan mengenai konstruksi media terhadap identitas waria
Persamaan dengan penelitian ini	Mengenai penggunaan metode CDA

*ide tabel diadopsi dari skripsi Ellen, 2013

2.11.2 Konstruksi Identitas Korban dan Pelaku Pemerkosaan di Media *Online* Detik.com

Penelitian dengan judul di atas diteliti oleh Ellen Nur Aprilia (2013) yang menggunakan desain penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan perspektif kritis dengan metode analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) Norman Fairclough pada level teks. Hal ini dilakukan karena peneliti menganggap bahwa tujuan penelitian telah terpenuhi hanya dengan menganalisis pada tataran teks saja. Subyek dalam penelitian ini adalah teks-teks berita mengenai kasus pemerkosaan di media Detik.com. Teks berita yang ada diinterpretasi dengan melihat representasi, relasi dan identitas yang tergambar dalam teks.

Dari temuan peneliti, terdapat dua konsep yaitu pemerkosaan oleh anggota keluarga dan di luar anggota keluarga. Media Detik.com mengkonstruksi perbuatan pemerkosaan sebagai perilaku yang rendah dan negatif. Sedangkan konstruksi identitas terhadap korban pemerkosaan oleh keluarga yang dilakukan oleh Detik.com tidaklah secara khusus tetapi lebih memberikan toleransi kepada pelaku pemerkosaan. Hal ini, membuat masyarakat menilai perempuan bersalah dan memandang perempuan sebagai makhluk yang lemah.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kritis dengan pendekatan analisis wacana kritis atau *critical discourse analysis* (CDA) yang mengacu pada perspektif Norman Fairclough. Perspektif Fairclough mengarah pada pendekatan perubahan sosial (*sociocultural change approach*). Analisis wacana ini terutama memusatkan perhatian pada bagaimana wacana dan perubahan sosial. Fairclough banyak dipengaruhi oleh Foucault dan pemikiran intertekstualitas Julia Kresteva dan Bakhtin. Wacana di sini dipandang sebagai praktik sosial, ada hubungan dialektis antara praktik diskursif tersebut dengan identitas dan relasi sosial. Wacana juga melekat dalam situasi, institusi, dan kelas sosial tertentu. Memaknai wacana demikian, menolong menjelaskan bagaimana wacana dapat memproduksi dan mereproduksi *status quo* dan mentransformasikannya dalam Eriyanto (2001: 17).

Analisis wacana kritis merupakan bagian dari metode kualitatif yang dilakukan secara eksplanatif. Pendekatan penelitian ini akan difokuskan pada aspek kebahasaan dan konteks yang terkait. Konteks diartikan sebagai aspek kebahasaan yang digunakan untuk tujuan dan praktik tertentu. Analisis wacana berita dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis secara deskriptif teks berita yang ada. Analisis secara deskriptif dipilih karena analisis wacana kritis yang digunakan hanya berada dalam tingkatan teks. Namun, penelitian dengan analisis wacana kritis sebenarnya akan semakin berkualitas jika memperhatikan konteks historis, sosial, budaya, ekonomi dan politik dari teks yang diteliti.

3.2 Obyek Penelitian

3.2.1 Obyek atau sasaran dalam penelitian ini adalah teks berita mengenai maritim yang dimuat dalam media online Kompas.com;

3.2.2 Literatur terkait.

3.3 Sumber Data dan Batasan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah teks berita yang didapat secara online mengenai masalah-masalah maritim yang diterbitkan oleh media online Kompas.com. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mencari berita-berita yang terkait isu kemaritiman melalui *website* atau internet dengan alamat url Kompas.com dan dibatasi kurun waktu 100 hari setelah pelantikan presiden Joko Widodo yaitu sejak 20 Oktober 2014 hingga 27 Januari 2015. Hal ini, mengingat gencarnya pemberitaan mengenai maritim yang diterbitkan oleh media massa khususnya secara online semenjak presiden Joko Widodo menyebutkan ingin mengembalikan kejayaan maritim Indonesia dengan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kompas.com dipilih menjadi sumber data karena menjadi salah satu media online Indonesia yang memiliki kredibilitas yang tinggi dalam memberikan berita-berita mengenai situasi dan kondisi yang terjadi di tengah masyarakat. Media online ini telah berdiri hampir dua puluh tahun dan telah memenangkan beberapa penghargaan bergengsi dari organisasi-organisasi yang bergerak di bidang media dan publikasi. Kompas.com juga memiliki cukup banyak penggemar atau khalayak media, hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah *like* (suka) mencapai 280.000 ribu orang. Banyaknya khalayak media yang menyukai Kompas.com dapat dijadikan titik balik bahwa ratusan ribu orang tersebut juga percaya pada berita-berita yang dipublikasikan dan tak dapat dipungkiri sedikit banyak akan mempengaruhi sistem pengetahuan mereka terhadap sebuah realitas sosial.

3.4 Kerangka Analisis

Norman Fairclough berusaha menghubungkan antara analisis teks pada level mikro dengan konteks sosial yang lebih besar, dalam hal ini *sociocultural practice*. Pada tahap analisis ketiga tahapan itu dilakukan secara bersama-sama sebagai berikut

Tingkatan	Metode
Teks	<i>Critical linguistics</i>
<i>Discourse practice news room</i>	Wawancara mendalam
<i>Sociocultural practice</i> sejarah	Studi pustaka, penelusuran

Ada tiga tahap analisis yang digunakan. Pertama, deskripsi, yakni menguraikan isi dan analisis secara deskriptif atas teks. Di sini, teks dijelaskan tanpa dihubungkan dengan aspek yang lain. Analisis disini mengenai isi dan bahasa yang dipakai dalam tajuk tersebut. Kedua, interpretasi, yakni menafsirkan teks dihubungkan dengan praktik wacana yang dilakukan. Disini teks tidak dianalisis secara deskriptif, tetapi ditafsirkan dengan menghubungkannya dengan bagaimana produksi teks dibuat. Ketiga, tahap eksplanasi, bertujuan untuk mencari penjelasan atas hasil penafsiran kita pada tahap kedua. Penjelasan itu dapat diperoleh dengan menghubungkan produksi teks itu dengan praktik sosiokultural di mana suatu media berada dalam Eriyanto (2001: 327). Dalam penelitian ini penulis hanya melakukan analisis secara deskriptif terhadap teks berita maritim yang ada di media online Kompas.com. Analisis pada level mikro dengan mendeskripsikan dan menganalisis teks dipilih karena keterbatasan waktu peneliti dan tujuan

penelitian telah terpenuhi hanya dengan menganalisis pada level mikro atau analisis wacana kritis pada tingkat teks saja.

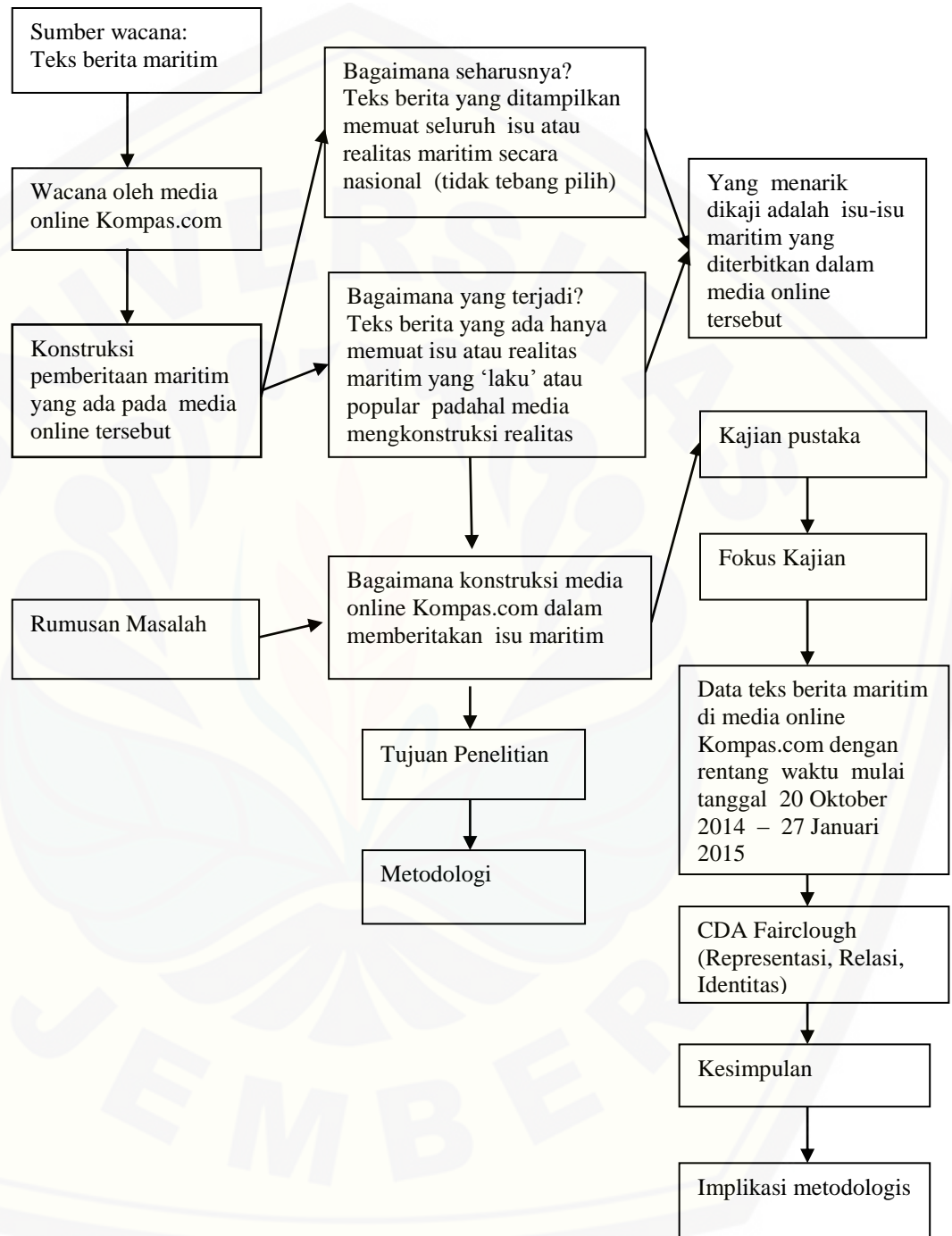
3.5 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, teks berita akan dianalisis menggunakan analisis wacana kritis menggunakan dimensi pada level mikro yakni analisis tingkat teks dengan melihat representasi, relasi dan identitas yang tercermin dalam berita-berita maritim di media online Kompas.com. Fairclough melihat teks dalam berbagai tingkatan. Sebuah teks bukan hanya menampilkan bagaimana suatu objek digambarkan tetapi juga bagaimana hubungan antar objektif didefinisikan. Ada tiga elemen dasar dalam model Fairclough, yang dapat digambarkan dalam tabel berikut dalam Eriyanto (2001: 289).

Unsur	Yang Ingin Dilihat
Representasi	Bagaimana peristiwa, orang, kelompok, situasi, keadaan, atau apa pun ditampilkan dan digambarkan dalam teks.
Relasi	Bagaimana hubungan antara wartawan, khalayak, dan partisipan berita ditampilkan dan digambarkan dalam teks.
Identitas	Bagaimana identitas wartawan, khalayak, dan partisipan berita ditampilkan dan digambarkan dalam teks.

Ketiga elemen dasar (representasi, relasi dan identitas) dalam analisis wacana kritis pada level mikro (teks) dapat dilihat dari setiap wacana tulis atau berita yang dipublikasikan oleh Kompas.com. Setelah proses analisis data, penulis akan menarik kesimpulan mengenai pandangan, keberpihakan, dan strategi wacana yang tercermin dalam media online Kompas.com.

3.6 Bagan Tahapan Penelitian



*Ide bagan berasal dari skripsi Raudlatul Jannah, 2005

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Berita Maritim di Kompas.com

Berita-berita maritim di media online Kompas.com banyak mengulas mengenai kinerja pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh presiden Joko Widodo. Setiap langkah pemerintah dalam mewujudkan paradigma pembangunan Indonesia yang baru atau dikenal dengan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia banyak mendapat sorotan Kompas.com. Wacana yang digulirkan melalui berita-berita maritim yang dipublikasikan oleh Kompas.com merupakan bagian dari konstruksi media massa terhadap masyarakat atau khalayak media. Mengingat, media massa merupakan salah satu medium bagi individu untuk menyerap pengetahuan terhadap sebuah realitas yang berada di luar dirinya melalui konsumsi atas wacana tulis atau berita yang dibaca. Media online Kompas.com termasuk ke dalam media online yang memiliki kredibilitas yang tinggi. Kredibilitas yang dimiliki Kompas.com tidak menutup kemungkinan dapat diragukan ketika melihat dari sudut pandang kritis. Karena media bukanlah wadah yang hampa dan tidak disusupi kepentingan-kepentingan atas ideologi tertentu.

Ideologi media online Kompas.com menggunakan *tagline* "rayakan perbedaan" sebagai wujud semangat menghargai perbedaan dan keberagaman dalam memenuhi kebutuhan berita berbagai pembacanya. Dengan *tagline* Kompas.com tersebut dapat dilihat bahwa media online Kompas.com menjunjung tinggi multikulturalisme. Paham untuk menghargai keberagaman ditunjukkan Kompas.com dengan tidak tebang pilih dalam menghadirkan informasi melalui berita yang dipublikasikan, termasuk berita-berita maritim.

Berita maritim yang dipublikasikan oleh media online Kompas.com menyangkut banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan laut dan pelayaran seperti definisi yang dari kata 'maritim'. Namun, penulis memilih dan memilah pemberitaan yang masih berkaitan dengan sosiologi maritim. Pemberitaan tersebut antara lain isu kemaritiman mengenai pemerintahan seperti program-program yang diusung oleh dinas KKP, pembentukan Menko Maritim, forum-forum internasional yang dihadiri presiden guna mempromosikan pembangunan infrastruktur, penambahan alutsista sebagai bagian dari upaya pertahanan laut, pembentukan undang-undang bongkar muat kapal, dan pemberitaan yang mengacu kepada peran aktif pemerintah dalam merealisasikan paradigma pembangunan yang baru yakni Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sedangkan pemberitaan mengenai masyarakat banyak menggambarkan mengenai keterbatasan kelompok sosial nelayan dalam hal ekonomi, perayaan-perayaan pada masyarakat pesisir, kearifan lokal masyarakat pesisir dalam menjaga kelestarian laut, serta berita-berita yang menampilkan keindahan wisata laut yang dimiliki oleh Indonesia.

4.2 Konstruksi Berita Maritim di Kompas.com

Media mengambil peranan kunci dalam masyarakat saat ini, realitas yang diciptakan oleh media melalui berita yang berisi berbagai macam wacana dapat dengan mudah dikonsumsi oleh masyarakat. Berita yang diterbitkan oleh media massa merupakan bagian dari wacana tulis. Wacana tulis berperan besar dalam merekonstruksi realitas. Sampai saat ini, tulisan masih merupakan media yang sangat efektif dan efisien untuk menyampaikan gagasan, wawasan, ilmu pengetahuan, atau apapun yang dapat mewakili kreatifitas manusia dalam Mulyana (2005: 51-52). Masyarakat dalam mengkonsumsi media, tidak dapat dipandang sepele karena media tanpa disadari dapat mengarahkan dan mengubah pola pikir individu dalam melihat

realitas. Realitas yang dihadirkan oleh Kompas.com mengenai isu-isu kemaritiman tidak dapat dipandang sebelah mata. Banyaknya berita yang diterbitkan secara online mengenai wacana-wacana kemaritiman di Indonesia membuka peluang bagi individu dan masyarakat untuk menganalisis lebih dalam mengenai konstruksi yang ingin dibangun Kompas.com terkait kemaritiman.

Selama seratus hari periode kepemimpinan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia, sorotan media atas wacana kemaritiman berhembus kencang. Mengingat, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya mengatakan bahwa ingin melakukan pembangunan dengan menggunakan perspektif kemaritiman. Dari sekian banyak teks berita yang dipublikasikan oleh media online Kompas.com, peneliti memfokuskan analisis pada isu kemaritiman di Kompas.com kedalam empat kategori wacana yang paling banyak mendapat sorotan Kompas.com dan secara sosiologis memiliki hubungan dengan disiplin ilmu sosiologi dalam peminatan sosiologi maritim. Kategori wacana mengenai isu kemaritiman yang diangkat oleh Kompas.com antara lain pembangunan infrastruktur maritim, keamanan laut, kesejahteraan nelayan dan kesadaran masyarakat Indonesia sebagai negara maritim. Dengan adanya empat wacana besar tersebut dalam teks berita di Kompas.com dapat dianalisis menggunakan analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) dengan perspektif Norman Fairclough. Analisis wacana kritis Fairclough dapat melihat kekuasaan (*power*) dan ideologi (*ideology*) yang ditampilkan media dalam menampilkan realitas.

4.2.1 Analisis Wacana Kritis Teks Berita Tentang Pembangunan Infrastruktur Maritim

Berita merupakan bagian dari wacana tulis yang diproduksi oleh media massa baik cetak maupun online. Kompas.com banyak menyorot isu

kemaritiman yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan di segala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan rencana tertentu dalam Soekanto (2007:358). Pembangunan infrastruktur maritim diharapkan mampu meningkatkan akses untuk mempermudah kegiatan ekonomi di pelbagai daerah di Indonesia. Pembangunan infrastruktur maritim juga merupakan pilar ketiga dalam paradigma pembangunan Indonesia yang digagas oleh presiden Joko Widodo yang dikenal dengan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Media online Kompas.com banyak mewacanakan mengenai kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dengan negara lain guna merealisasikan pembangunan tol laut dan 24 pelabuhan guna menunjang konektivitas laut sebagai penunjang kegiatan ekonomi.

Media online Kompas.com dalam mengangkat isu pembangunan infrastruktur maritim banyak mempublikasikan berita yang dapat digolongkan kedalam *hardnews*. Kompas.com juga banyak mewacanakan mengenai peran aktif pemerintah dalam forum internasional untuk mewujudkan visi misi maritim pemerintahan yang baru dan positif negatif mengenai pembangunan tol laut . Hal ini terlihat dari beberapa artikel yang dipublikasikan oleh Kompas.com seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini

Tabel 4.1 Artikel Tentang Pembangunan Infrastruktur Maritim

No.	Judul Artikel di Kompas.com	Tanggal Publikasi di Kompas.com
1.	Tiongkok dan Indonesia Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Maritim	10 November 2014
2.	Investor Jepang Tertarik bangun Pabrik Mesin Kapal	1 Desember 2014
3.	Singapura Kepincut Ikut Garap Tol Laut	24 November 2014

	Indonesia	
4.	Rusia Tertarik dengan Gagasan Poros Maritim Jokowi	12 November 2014
5.	Presiden Jokowi Bertolak ke Myanmar	11 November 2014
6.	Ada 12 Kesepakatan yang Dibawa Jokowi dari Beijing	17 November 2014
7.	Jokowi Diminta Siapkan <i>Guidance</i> untuk Wujudkan Tol Laut	21 Oktober 2014
8.	Bangun Sektor Maritim Butuh Dana Rp 2.000 Triliun	21 Oktober 2014
9.	Soal Infrastruktur, Pemerintah Harus Jadi <i>Contracting Agency</i>	1 November 2014
10.	Andrinof, Pemikir <i>Out of The Box</i>	26 Oktober 2014
11.	Tol Laut Naikkan Efektivitas Pengiriman Mobil ke Daerah	27 Oktober 2014
12.	Jokowi: Subsidi BBM Rp 714 Triliun, Sangat Boros.	7 November 2014
13.	Blusukan Jokowi ke Tianjin, dari Kereta Cepat Hingga Pembangkit Listrik	11 November 2014
14.	Menko Indroyono Jajakan Infrastruktur pada Investor AS	12 November 2014

Judul artikel di atas merupakan berita yang dipublikasikan oleh media online Kompas.com mengenai pembangunan infrastruktur maritim. Pembangunan infrastruktur maritim dalam berita-berita diatas dapat dianalisis menggunakan analisis wacana kritis (AWK) pada tingkat teks untuk mengetahui representasi, relasi dan identitas guna mengetahui konstruksi yang dilakukan oleh Kompas.com.

a. Tiongkok dan Indonesia Sepakat Tingkatkan Kerjasama Maritim

Artikel berita berjudul *Tiongkok dan Indonesia Sepakat Tingkatkan Kerjasama Maritim* ini membahas mengenai pertemuan presiden Joko Widodo dengan presiden Xi Jinping di Beijing menjelang pertemuan di APEC. Kantor berita Xinhua melaporkan Joko Widodo mengatakan kepada Xi Jinping ia berharap Tiongkok akan terus meningkatkan kerja sama dengan prioritas maritim dan infrastruktur. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, mengatakan dalam pertemuan APEC, Indonesia juga akan mendorong agar kelautan menjadi salah satu isu utama dalam pembahasan berbagai kerja sama.

Representasi. Analisis wacana kritis level teks yang pertama mengenai representasi. Representasi dapat terlihat dalam penggunaan kosa kata dan tata bahasa. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa terjadi kesepakatan untuk meningkatkan kerjasama di bidang maritim antara Indonesia dengan Tiongkok. Kompas.com menyatakan bahwa kesepakatan terjadi antara presiden Joko Widodo dengan presiden Xi Jinping. Namun, hal ini bertolak belakang dengan laporan dari kantor berita Xinhua bahwa Jokowi hanya menyatakan kepada Xi Jinping bahwa ia berharap untuk melakukan kerjasama. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 4.2 Pernyataan Saling Menentang Kompas.com

No.	Representasi	Pernyataan Bertentangan
1.	Kompas.com	Presiden Joko Widodo dan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, sepakat untuk meningkatkan kerjasama, khususnya di bidang maritim dan prasarana (paragraf ke 1, baris ke1-2, artikel Kompas.com, 10 November 2014)

2.	Kantor Berita Xinhua	Kantor berita Xinhua melaporkan Joko Widodo mengatakan kepada Xi Jinping ia berharap Tiongkok akan terus meningkatkan kerja sama dengan prioritas maritim dan infrastruktur (paragraf ke-3, baris ke-1-3, artikel Kompas.com, 10 November 2014)
----	----------------------	--

Penggunaan kata **sepakat** menunjukkan bahwa telah terjadi komunikasi antara presiden Jokowi dengan presiden Xi Jinping yang mengarah kepada kesepakatan terkait pembangunan maritim. Hal menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam melakukan kerjasama bilateral dengan Tiongkok untuk merealisasikan program kemaritiman presiden Joko Widodo seperti pembangunan infrastruktur. Namun, dalam artikel yang sama dikutip pernyataan dari kantor berita Xinhua yang melaporkan bahwa Jokowi mengatakan kepada Xi Jinping, ia **berharap** Tiongkok akan terus melakukan meningkatkan kerjasama dengan prioritas maritim. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi perbedaan pemaknaan yakni kesepakatan apakah benar-benar terjadi seperti yang dilansir Kompas.com atau hanya harapan Jokowi kepada Xi Jinping untuk meningkatkan kerjasama seperti yang dilansir oleh kantor berita Xinhua.

Relasi. Relasi dalam artikel berita diatas terjadi antara presiden Joko Widodo dan presiden Xi Jinping. Hubungan yang tercermin dari teks berita ini yakni antara kepala negara Indonesia dengan kepala negara Tiongkok digambarkan harmonis, karena presiden Xi Jinping dan presiden Joko Widodo menjalin kerjasama bilateral dengan memprioritaskan pembangunan sektor maritim. Serta Kompas.com dengan kantor berita Xinhua. Laporan dari kantor berita Xinhua yang dikutip Kompas.com dalam teks berita tersebut mengarah kepada keragu-raguan yang dihadirkan kepada khalayak media

Kompas.com mengenai kebenaran terjadinya kesepakatan presiden Jokowi dengan presiden Xi Jinping atau hanya harapan dari presiden Jokowi.

Identitas. Identitas yang ditunjukkan dalam teks berita ini memiliki keberpihakan kepada pemerintah. Hal ini terlihat dari, judul artikel yang positif. Analisis secara deskriptif mencerminkan bahwa Kompas.com turut serta membangun citra positif pemerintah dengan menunjukkan keberhasilan kerjasama bilateral presiden Jokowi dengan presiden Xi Jinping. Keberhasilan kerjasama di sektor maritim yang ditunjukkan oleh Kompas.com tidak mengarah kepada satu investor asing dari satu negara saja melainkan banyak negara-negara di kawasan Asia, Eropa dan Amerika yang juga tertarik berinvestasi pada sektor maritim di Indonesia. Hal ini tercermin jelas dalam beberapa artikel berita.

b. Investor Jepang Tertarik Bangun Pabrik Mesin Kapal

Artikel berita berjudul *Investor Jepang Tertarik Bangun Pabrik Mesin Kapal* membahas mengenai ajakan berinvestasi yang dilakukan oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Yusron Ihza Mahendra kepada salah satu investor asal Jepang, IHI Group. IHI Group merupakan salah satu investor yang sudah lama berinvestasi di Indonesia dan ingin meningkatkan investasi yang sudah ada dan melebarkan sayapnya dalam industri lain, khususnya industri kapal. Faktor pendorong yang membuat investor Jepang tertarik adalah arah kebijakan presiden Joko Widodo yang gencar menggairahkan sektor maritim.

Representasi. Teks berita tersebut mengkonstruksikan bahwa Kompas.com menampilkan keberhasilan pemerintah dalam menarik investor Jepang dan meningkatkan jalinan kerjasama direpresentasikan dalam kalimat pernyataan Duta Besar Indonesia untuk Jepang di bawah ini

“Mereka ingin lebih kuatkan lagi investasi yang sudah ada, **berinvestasi baru...**” (paragraf ke-5, baris ke-1, artikel Kompas.com, 1 Desember 2014)

Dalam kalimat tersebut, nampak jelas bahwa pemerintah berhasil dalam bekerjasama dengan salah satu investor dari negara Jepang sehingga terjadi peningkatan investasi dengan melakukan investasi baru di bidang maritim khususnya untuk mesin kapal. Berinvestasi baru mengindikasikan ketertarikan investor asal Jepang kepada gagasan pembangunan Indonesia yang baru yakni pembangunan yang berbasis pada maritim.

Relasi. Relasi yang terjalin dalam teks berita diatas terjadi antara negara dan pasar. Negara Indonesia melalui Duta Besar RI untuk Jepang, Yusron dengan investor asal Jepang, IHI Group. Hubungan yang ditunjukkan oleh pemerintah kepada investor asal Jepang berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari Duta Besar Indonesia untuk Jepang diatas. Keterbukaan negara (pemerintah) dalam hal investasi dilakukan dengan menyambut investor yang datang ke Indonesia yakni IHI Group. Sambutan pemerintah yang baik menegaskan bahwa keterbukaan dalam investasi mengindikasikan negara sedang diarahkan kepada ekonomi neoliberalisme.

Identitas. Identitas dalam artikel berita ini, menunjukkan bahwa Kompas.com berada dalam posisi dekat dengan pemerintah. Sikap positif terhadap para investor berimplikasi pada paradigma ekonomi yang nampak dan sedang dilakukan pemerintah saat ini yakni neoliberalisme. Kompas.com menegaskan kemana arah paradigma ekonomi negara Indonesia saat ini. Teks berita kedua ini dapat dideskripsikan dan dianalisis bahwa artikel berita ini sama dengan artikel berita yang pertama yakni keduanya menampilkan hubungan yang baik antara pemerintah dengan negara lain dan turut serta membangun citra positif pemerintahan dalam mewujudkan paradigma pembangunan yang berbasis maritim.

c. **Singapura Kepincut Ikut Garap Tol Laut Indonesia**

Dalam artikel berjudul *Singapura Kepincut Ikut Garap Tol Laut Indonesia* membahas mengenai angin segar bagi Indonesia terkait investasi yang akan ditanamkan Singapura di Indonesia. Para Pengusaha dari Singapura

tertarik berinvestasi di beberapa sektor yang menjadi prioritas presiden Joko Widodo, misalnya sektor maritim. Menurut Ketua KADIN Suryo Bambang Sulistio di Jakarta, para pengusaha asal negeri singa itu akan datang langsung ke berbagai daerah di Indonesia untuk melihat prospek investasi. Berdasarkan data BKPM, Singapura merupakan investor terbesar di Indonesia. Selama Januari sampai September 2014, Singapura merealisasikan investasi sebesar 4,89 miliar dolar AS untuk 1.063 proyek.

Representasi. Dalam teks berita tersebut, tergambar citra positif yang ditunjukkan Kompas.com kepada pemerintah karena keberhasilan dalam menarik investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Hal ini juga direpresentasikan dalam teks pada kalimat di bawah ini

Singapura “**kepincut**” untuk ikut menggarap proyek tol laut. Hal ini disampaikan oleh KADIN...” (paragraf ke-1, baris ke-1, artikel Kompas.com, 24 November 2014)

dan penggunaan kata tertarik dalam kalimat di bawah ini

“Mereka **tertarik** investasi di beberapa sektor yang prioritas Presiden Jokowi, misalnya (sektor) maritim...” (paragraf ke-2, baris ke-1, artikel Kompas.com, 24 November 2014)

Kompas.com tidak hanya menyebutkan negara Singapura **tertarik**, namun juga dengan istilah jawa yakni **kepincut**. Kata **kepincut** merupakan bentuk ameliorasi (peninggian makna) yang berarti ketertarikan mendalam. Singapura direpresentasikan memiliki ketertarikan mendalam untuk berinvestasi di Indonesia. Penggunaan kata tersebut pada akhirnya merepresentasikan keberhasilan pemerintah dalam mempromosikan gagasan baru presiden Jokowi mengenai pembangunan di sektor maritim.

Relasi. Relasi yang terbangun dalam teks antara negara dengan pasar. Hal ini ditunjukkan dalam artikel berita tersebut terjadi antara KADIN (Kamar Dagang Indonesia) dan pengusaha atau investor asal Singapura. KADIN

sebagai salah satu representasi pemerintah ditunjukkan memiliki hubungan yang baik dengan para investor asal Singapura sehingga mereka tertarik untuk berinvestasi di sektor maritim yang saat ini digunakan sebagai acuan pembangunan kedepan.

Identitas. Identitas yang ditampilkan oleh media online Kompas.com ditunjukkan dengan ikut membangun citra positif pemerintah. Namun juga, berada dalam dominasi pasar yang dominan. Keunggulan yang dimiliki oleh negara Singapura terlihat sangat kuat dalam teks berita. Teks berita ketiga mendeskripsikan pemerintah telah berhasil dalam mewujudkan paradigma pembangunan Indonesia yang baru. Teks berita ini memperkuat teks-teks berita sebelumnya yang memiliki keberpihakan dengan pemerintah.

d. Rusia Tertarik dengan Gagasan Poros Maritim Jokowi

Artikel berita yang berjudul *Rusia tertarik dengan Gagasan poros Maritim Jokowi* membahas mengenai ketertarikan negara Rusia dengan konsep poros maritim presiden Jokowi yang disampaikan oleh Ketua Dewan Federasi Majelis Federasi Rusia Valentina I. Matviyenko. Negara Rusia juga siap membantu Indonesia pada bidang maritim. Saran yang disampaikan oleh Matviyenko terhadap pemerintah Indonesia agar program poros maritim berhasil, Indonesia perlu membangun infrastruktur pelabuhan maupun infrastruktur maritim. Kepada media, Matviyenko juga menyebut Indonesia sebagai mitra kunci di kawasan Asia Pasifik.

Representasi. Representasi keberhasilan pemerintah dalam membangun kerjasama bilateral juga ditunjukkan oleh kalimat di bawah ini

“Menurut dia, agar program ini sukses, Indonesia perlu membangun infrastruktur pelabuhan... “Dan Rusia **siap untuk membantu** Indonesia dalam bidang ini,” kata dia.” (paragraf ke-3, baris ke 4, artikel Kompas.com, 12 November 2014)

Penggunaan kalimat **siap untuk membantu** dapat dimaknai bahwa negara Rusia juga berhasil ditarik oleh pemerintah untuk melakukan investasi.

Kesiapan Rusia untuk membantu pembangunan infrastruktur pelabuhan menjadi titik balik bahwa Indonesia memiliki pendukung yang kuat untuk merealisasikan pembangunan berbasis maritim.

Relasi. Dalam teks berita tersebut, relasi antara pemerintah Rusia dan Indonesia menunjukkan hubungan yang baik, hal ini ditunjukkan dalam kalimat dibawah ini

“Kepada media, Matviyenko juga menyebut Indonesia sebagai **mitra kuncinya** di kawasan Asia Pasifik.”
(paragraf ke-8, baris ke-1, artikel Kompas.com, 12 November 2014

Penggunaan kata **mitra kunci** menunjukkan bahwa hubungan bilateral antara Indonesia dengan Rusia terjalin dengan baik dan kuat. Penyebutan negara Indonesia sebagai mitra kunci bagi Rusia menunjukkan Indonesia menjadi negara yang berharga di kawasan Asia Pasifik. Mengingat, Rusia juga merupakan negara kuat di dunia karena menjadi salah satu pemegang hak veto dari PBB. Hal ini memperkuat citra positif dan posisi tawar Indonesia terhadap negara-negara lain.

Identitas. Identitas yang tampak dalam teks berita tersebut, mengindikasikan berada dekat dengan pemerintah. Teks berita keempat dapat dideskripsikan bahwa hubungan yang dekat antara pemerintah Rusia dengan Indonesia nampak jelas dalam beberapa pernyataan di atas. Penyebutan Indonesia sebagai “mitra kunci” jelas memperlihatkan bahwa pemerintah telah berhasil melakukan diplomasi untuk mewujudkan pembangunan maritim dengan menggandeng negara Rusia. Keberhasilan ini semakin memperkuat citra positif kinerja pemerintahan Joko Widodo.

e. **Presiden Jokowi Bertolak ke Myanmar**

Dalam artikel berjudul *Presiden Jokowi Bertolak ke Myanmar* membahas mengenai kunjungan presiden Jokowi beserta rombongan untuk menghadiri KTT ASEAN dan KTT Asia Timur yang diselenggarakan di

Myanmar. Presiden Jokowi juga mengadakan beberapa pertemuan bilateral dengan pemimpin beberapa negara seperti AS, Rusia, Jepang dan Vietnam serta memberikan presentasi di hadapan 500 wakil perusahaan terkemuka dunia dan CEO Summit APEC 2014 guna sekaligus memperkenalkan konsep Poros Maritim Indonesia.

Representasi. Analisis wacana kritis (level mikro) dalam teks berita tersebut ditunjukkan dengan representasi peran aktif pemerintah dalam mencari dukungan finansial dan menjalin kerjasama nampak jelas dalam kalimat dibawah ini

“**Dalam setiap kesempatan**, Presiden menyampaikan program kemaritimannya...” (paragraf ke-6, baris ke-1, artikel Kompas.com, 11 November 2014)

Penggunaan kalimat **dalam setiap kesempatan** nampak jelas bahwa pemerintah khususnya presiden Jokowi pro aktif dalam menunjukkan paradigma pembangunan Indonesia yang berfokus pada sektor maritim. Sikap pro aktif pemerintah dalam mencari dukungan negara lain atau dengan kata lain menarik para investor menguatkan dugaan bahwa pembangunan dengan paradigma neoliberalisme dilakukan secara terang-terangan oleh pemerintah yang ditandai oleh dibukanya kran investasi seluas-luasnya.

Relasi. Relasi yang juga nampak didalam teks berita tersebut hubungan antara pemerintah dengan negara lain yang menunjukkan ketertarikan negara lain dengan program pemerintah Indonesia, seperti yang ada dalam kalimat dibawah ini

“**Banyak yang bertanya** tentang apa itu agenda maritim berupa “sea toll” Indonesia...” (paragraf ke-8, baris ke-1, artikel Kompas.com, 11 November 2014)

Kalimat **banyak yang bertanya** menunjukkan ketertarikan negara lain terhadap program baru pemerintah. Ketertarikan tersebut dimanifestasikan melalui pertanyaan-pertanyaan yang diungkapkan negara lain kepada

pemerintah Indonesia sehingga hubungan negara lain dengan Indonesia terlihat baik.

Identitas. Identitas yang ditunjukkan dalam teks berita tersebut mengidentifikasi berada dalam keberpihakan dengan pemerintah. Teks berita kelima ini dapat dideskripsikan bahwa pemerintah aktif melakukan promosi untuk menarik investor asing dalam pembangunan maritim di Indonesia. Antusiasme negara asing terhadap paradigma pembangunan Indonesia yang baru terlihat jelas dalam pernyataan presiden Jokowi dalam teks berita diatas. Teks berita ini secara keseluruhan juga turut serta membangun citra positif pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berbasis maritim.

f. Ada 12 Kesepakatan yang Dibawa Jokowi dari Beijing

Artikel yang berjudul *Ada 12 Kesepakatan yang Dibawa Jokowi dari Beijing* membahas mengenai 12 kesepakatan yang yang dicapai oleh presiden Jokowi dengan sejumlah negara pasca pertemuan KTT APEC di Beijing, Tiongkok. Kesepakatan tersebut juga ada yang sudah langsung ada penandatanganan MoU (*memorandum of understanding*) *business to bussines*. Presiden juga mengutus sejumlah menteri untuk menindaklanjuti hasil pertemuan bilateral yang dilakukannya dengan beberapa kepala negara dalam forum KTT APEC, KTT ASEAN dan G-20. Jokowi mencontohkan Menko Maritim akan diutus ke Tiongkok dan Jepang untuk membahas mengenai masalah kemaritiman.

Representasi. Dalam artikel berita tersebut, digambarkan dengan jelas mengenai keberhasilan pemerintah dalam menjalin kerjasama dengan negara lain utamanya pada sektor maritim. Hal ini direpresentasikan dalam kalimat dibawah ini

“Selain itu, Jokowi juga **mengaku berhasil** membawa rencana investasi di sektor pelabuhan...” (paragraf ke-9, baris ke-1, artikel Kompas.com, 17 November 2014)

Pengakuan keberhasilan presiden dalam menarik investor dan menjalin kerjasama maritim nampak jelas dalam kalimat diatas. Pengakuan keberhasilan investasi yang dibawa oleh presiden Jokowi mempertegas citra positif kinerja pemerintah melalui teks berita diatas yang dilansir oleh Kompas.com.

Relasi. Teks berita diatas juga menjelaskan relasi antara pemerintah dengan negara lain yang memiliki hubungan yang baik. Keberhasilan presiden dalam membawa 12 kerjasama setelah menghadiri forum internasional tersebut menunjukkan hubungan yang tercipta oleh negara Indonesia dengan negara lain berjalan dengan lancar.

Identitas. Identitas, yang ditunjukkan oleh media online Kompas.com berada dalam posisi dekat dengan pemerintah karena pemerintah dalam teks berita tersebut dicitrakan secara positif. Teks berita keenam ini dapat dideskripsikan memiliki pengertian makna yang sama dengan teks-teks berita yang sebelumnya dimana pemerintah digambarkan memiliki keberhasilan dalam berdiplomasi dengan negara-negara asing guna ikut serta dalam pembangunan berbasis maritim yang digagas oleh presiden Jokowi.

g. Jokowi Diminta Siapkan “Guidance” untuk Wujudkan Tol Laut

Artikel berita berjudul *Jokowi Diminta Siapkan “Guidance” untuk Wujudkan Tol Laut* membahas mengenai cita-cita presiden Jokowi menghubungkan pulau-pulau di Indonesia dengan konsep tol laut dinilai tidak akan mudah terwujud. Pasalnya berbagai masalah seperti infrastruktur laut dan armada kapal dinilai belum siap akan konsep itu. Menurut Staf Ahli Bidang Logistik dan Multimoda Kementerian Perhubungan Sugiharjo, pekerjaan rumah Jokowi di sektor logistik masih menumpuk. Oleh karenanya, presiden harus menjadi guiden langsung di sektor maritim. Kelemahan penerapan sistem logistik nasional (Silogisnas) menjadi beban bagi realisasi program maritim sehingga dibutuhkan kerjasama dan gotong royong para *stakeholder* agar mereka tidak berpikir secara parsial.

Representasi. Dalam artikel berita tersebut, konstruksi Kompas.com mengenai pembangunan infrastruktur maritim yakni tol laut bukanlah hal yang mudah untuk direalisasikan. Mengingat, masih banyak pekerjaan rumah seperti penerapan sistem logistik nasional yang masih lemah. Hal ini seperti yang ditunjukkan kalimat pada teks berita dibawah ini

“Cita-cita presiden Joko Widodo menghubungkan pulau-pulau di Indonesia dengan konsep tol lautnya dinilai **tidak akan mudah terwujud.**” (paragraf ke-1, baris ke-1, artikel Kompas.com, 21 oktober 2014)

Penggunaan kalimat **tidak akan mudah terwujud** merepresentasikan bahwa pembangunan infrastruktur maritim haruslah realistis. Tol laut merupakan konsep yang bagus, namun tidak mudah dilakukan.

Relasi. Relasi yang ada dalam teks berita tersebut menggambarkan hubungan yang terjalin antara Staf Ahli Bidang Logistik dan Multimoda Kementerian Perhubungan, Sugihardjo dengan presiden Jokowi. Sugihardjo berpikir lebih realistis terhadap konsep yang digagas oleh presiden Indonesia, Joko Widodo. Pesimisme yang ditunjukkan oleh Sugihardjo merupakan bagian dari antithesa dari pemberitaan yang positif terhadap pemerintah terkait banyaknya investor yang tertarik untuk menanamkan modal di Indonesia.

Identitas. Dalam teks tersebut juga, terdapat identitas. Identitas dari media online Kompas.com yang lebih realistis dalam memandang konsep pembangunan maritim presiden Jokowi. Teks berita ketujuh ini dapat dideskripsikan bahwa pembangunan infrastruktur maritim tidak dapat dianggap remeh dan dengan mudah diwujudkan. Pemerintahan dalam berbagai kerjasama dikonstruksikan memiliki keberhasilan dalam berdiplomasi dengan pihak asing. Namun, dalam negeri salah satu pegawai pemerintah menunjukkan pesimisme terhadap realisasi program kemaritiman yang digagas oleh presiden Jokowi.

h. **Bangun Sektor Maritim Butuh Dana Rp 2.000 Triliun**

Artikel berita yang berjudul *Bangun Sektor Maritim Butuh Dana Rp 2.000 Triliun* membahas mengenai tekad presiden Jokowi untuk memaksimalkan potensi laut yang ada dan memajukan sektor maritim. Namun, menurut Dolfie OFP (mantan anggota Kelompok Kerja Tim Transisi) mengatakan bahwa butuh dana yang besar untuk menggarap sektor maritim. Berdasarkan hitungan yang dilakukannya bersama Tim Transisi, untuk membangun jembatan penghubung di sektor maritim saja membutuhkan anggaran yang diperlukan selama lima tahun bisa mencapai Rp 2.000 triliun. Salah satu program maritim yang menjadi andalan Jokowi adalah Tol Laut, yakni pemanfaatan kapal-kapal besar untuk mengangkut barang dan penumpang dalam jumlah besar dan dilakukan secara konsisten sehingga dapat menurunkan biaya logistik.

Representasi. Dalam artikel berita tersebut, merepresentasikan pembangunan tol laut bukanlah perkara yang mudah. Mengingat butuh dana besar dalam pembangunannya, seperti yang ditunjukkan dalam kalimat dibawah ini

“Dolfie OFP, mantan anggota Kelompok Kerja Tim Transisi mengatakan bahwa... pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla **dihadapkan pada masalah kebutuhan anggaran yang cukup besar.**” (paragraf ke-5, baris ke-1, artikel Kompas.com, 21 Oktober 2014)

Dalam kalimat diatas nampak jelas, bahwa pembangunan tol laut haruslah realistis. Anggaran dana yang besar untuk membangun tol laut cukup menyulitkan secara finansial bagi negara Indonesia karena negara Indonesia masih tergolong kepada negara berkembang dengan kemampuan finansial yang tidak terlalu mapan.

Relasi. Relasi yang ada dalam teks berita tersebut terjalin antara mantan anggota Tim Transisi yang pesimis dengan pemerintah dan presiden Jokowi terkait realisasi pembangunan tol laut. Tim transisi yang merupakan

bagian dari pendukung presiden Jokowi menunjukkan sikap yang lebih realistis. Pesimisme ini merupakan bagian dari kesadaran bahwa realisasi dari kampanye presiden Jokowi memang tidak mudah dilakukan. Mengingat, masih banyak hal diluar pembangunan tol laut yang harusnya didahulukan.

Identitas. Identitas yang tampak dalam teks berita tersebut, Kompas.com mengidentifikasikan berada diantara masyarakat sipil seperti Dolfie, eks tim transisi yang pesimis dengan realisasi pembangunan tol laut. Teks berita ke delapan ini dapat dideskripsikan bahwa masih ada beberapa pihak dari dalam negeri yang menunjukkan pesimisme terhadap realisasi program-program pembangunan infrastruktur maritim. Hal ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi khalayak pembaca Kompas.com. Adanya pesimisme yang ditunjukkan oleh mantan anggota Tim Transisi menunjukkan kepada masyarakat bahwa pembangunan yang dilakukan harusnya lebih realistis.

i. Soal Infrastruktur, Pemerintah Harus Jadi “Contracting Agency”

Artikel berita berjudul *Soal Infrastruktur, Pemerintah Harus Jadi “Contracting Agency”* membahas mengenai tantangan dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur khususnya di sektor maritim dalam proses pra-konstruksi terutama berkaitan dengan penyediaan lahan dan perizinan termasuk persetujuan masyarakat dan pemangku kepentingan, dalam proses konstruksi, dan pendanaan. Menurut Emil Elestianto, *Executive Vice President PT Indonesia Infrastructure Guarantee Fund* banyak proyek kerjasama antara pemerintah dan swasta (KPS) yang terkendala terutama saat proses penyiapan proyek agar layak untuk jadi tujuan investasi. Pasalnya, paradigma pemerintah belum berubah. Pemerintah masih menganggap sebagai *licensing agency* sekaligus *spending agency* yang seharusnya menjadi *contracting agency*. Dengan menjadi *contracting agency* pemerintah dapat terlibat langsung baik pada saat pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi.

Representasi. Dalam teks berita diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi pembangunan infrastruktur maritim yakni tol laut bukanlah perkara yang mudah karena pemerintah masih memiliki paradigma sebagai pengesah dan penghabis anggaran bukan menjadi pengawas bagi proyek-proyek yang selama ini dijalankan. Hal ini, direpresetasikan dalam kalimat dibawah ini

“Merealisasikan konsep pembangunan infrastruktur tol laut yang terintegrasi dengan infrastruktur darat, **bukan perkara mudah.**” (paragraf ke-1, baris ke-1, artikel Kompas.com, 1 November 2014)

Penggunaan kalimat **bukan perkara mudah** merepresentasikan bahwa membangun infrastruktur tol laut benar-benar tidak mudah. Selain dana yang besar seperti yang dijelaskan artikel sebelumnya. Kendala dari sisi pemerintah yang memiliki paradigma sebagai aktor pembangunan yang salah menjadikan pesimis terhadap rencana pembangunan tol laut.

Relasi. Relasi atau hubungan yang nampak dalam artikel berita tersebut terjalin antara Emil Elestianto (pengusaha) kepada pemerintah. Pesimisme Emil kepada pemerintah tergambar jelas dalam teks berita diatas.

Identitas. Identitas yang ditunjukkan oleh Kompas.com berada pada posisi mengkritik pemerintah. Teks berita ke sembilan dapat dideskripsikan memiliki kesamaan makna dengan dua teks berita sebelumnya. Pesimisme dari dalam negeri terkait pembangunan infrastruktur maritim berhembus kencang dari beberapa pihak dalam pemerintahan.

j. Andrinof, Pemikir “Out of The Box”

Artikel berita berjudul *Andrinof, Pemikir “Out of The Box”* membahas mengenai kelebihan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof A. Chaniago sehingga ditunjuk presiden Jokowi dari kalangan akademisi guna membuat perencanaan yang mendukung kesuksesan pembangunan. Andrinof A. Chaniago juga sepaham dengan gagasan

pembangunan maritim presiden Jokowi sehingga memperlancar realisasi program-program kemaritiman.

Representasi. Artikel ini merepresentasikan keberpihakan terhadap gagasan presiden Jokowi terkait pembangunan infrastruktur maritim khususnya tol laut, seperti yang terungkap dalam kalimat dibawah ini

“Andrinof juga **sepaham** dengan gagasan tol laut Jokowi untuk mengurangi biaya logistik dan sekaligus mengurangi ketimpangan ekonomi.” (paragraf ke-22, baris ke-1, artikel Kompas.com, 26 Oktober 2014)

Penggunaan kata **sepaham** menunjukkan keberpihakan atau dukungan terhadap gagasan presiden Jokowi terkait pembangunan infrastruktur maritim yakni tol laut.

Relasi. Hubungan yang tercermin dalam teks berita tersebut terjadi antara Erani Yustika (Guru Besar Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang), Andrinof A. Chaniago (Kepala Bappenas) dan presiden Jokowi. Hubungan baik ditunjukkan oleh Erani sebagai salah satu kolega dari Andrinof yang juga menunjukkan dukungan kepada presiden Jokowi.

Identitas. Identitas yang ditunjukkan oleh Kompas.com berada di kutub positif presiden Jokowi. Teks berita ke sepuluh ini membahas mengenai dukungan terhadap pemerintahan Jokowi terkait paradigma pembangunan yang baru dengan melakukan beberapa pembangunan infrastruktur maritim.

k. **Tol Laut Naikkan Efektivitas Mobil Ke Daerah**

Artikel berita berjudul *Tol Laut Naikkan Efektivitas Mobil Ke Daerah* membahas mengenai dukungan terhadap gagasan tol laut presiden Jokowi yang berdampak positif bagi pengusaha otomotif, salah satunya Sudirman Maman Rusdi selaku Ketua Umum Gaikindo. Dengan adanya tol laut dapat memangkas waktu pengiriman mobil ke daerah seperti Manado atau Bitung yang butuh waktu tiga minggu sampai sebulan dapat dipangkas menjadi satu minggu.

Representasi. Artikel berita tersebut juga merepresentasikan dukungan khususnya golongan pengusaha untuk memangkas waktu pengiriman barang ke daerah seperti yang ada dalam teks dibawah ini

“Kami akan **senang** kalau itu jadi (tol laut), pengangkutan mobil akan lebih cepat.” (paragraf ke-2, baris ke-1, artikel Kompas.com, 27 Oktober 2014)

Penggunaan kata **senang** menunjukkan hal yang mengarah positif. Relasi yang tercermin dalam teks tersebut antara pengusaha dengan pemerintah. Golongan pengusaha mendukung penuh gagasan tol laut karena dapat menunjang konektivitas laut sehingga dapat memangkas waktu pengiriman barang ke daerah.

Relasi. Hubungan yang tergambar dalam teks adalah antara pasar dan pemerintah. Pengusaha mendukung penuh program maritim presiden Jokowi yakni tol laut. Pemerintah mendapat dukungan dari pasar untuk merealisasikan program tol laut guna meningkatkan perekonomian.

Identitas. Identitas yang ditunjukkan oleh Kompas.com berada di dekat pemerintah karena turut serta membangun citra positif pemerintah terkait pembangunan infrastruktur. Teks berita ke sebelas ini dapat dideskripsikan bahwa dukungan terhadap pemerintahan Jokowi terkait pembangunan infrastruktur maritim tidak hanya datang dari pihak pemerintah melainkan dari pengusaha.

1. Jokowi: Subsidi BBM Rp 714 Triliun, Sangat Boros!

Artikel berita berjudul *Jokowi: Subsidi BBM Rp 714 Triliun, Sangat Boros!* membahas mengenai pengalihan subsidi BBM kepada sektor yang lebih produktif dibandingkan kepada hal-hal yang konsumtif. Pernyataan Jokowi soal BBM ini sudah berkali-kali disampaikan dalam berbagai kesempatan seperti pernah disampaikan dalam rapat koordinasi dengan para kepala daerah dan kepala kepolisian daerah di Istana Negara dan pertemuan dengan alumni Universitas Gadjah Mada beberapa waktu yang lalu. Jokowi

menyatakan betapa pentingnya pengalihan subsidi BBM ke industri maritim hingga pertanian. Dalam industri maritim, misalnya, Jokowi menargetkan pembangunan 24 pelabuhan dalam lima tahun pemerintahannya. Jokowi juga ingin mewujudkan tol laut.

Representasi. Representasi dalam artikel berita ini ditunjukkan oleh kalimat dibawah ini

“Jokowi menyatakan **pentingnya** pengalihan subsidi BBM ke industri maritim...” (paragraf ke-5, baris ke-1, artikel Kompas.com, 7 November 2014)

Penggunaan kata **pentingnya** merepresentasikan bahwa terdapat urgensi untuk mengalihkan anggaran untuk subsidi BBM kepada sektor yang lebih produktif seperti pembangunan infrastruktur maritim yakni pelabuhan dan tol laut yang dapat menunjang konektivitas laut guna memperlancar kegiatan ekonomi ke daerah.

Relasi. Artikel berita diatas, memiliki relasi yang tercermin antara presiden Jokowi, masyarakat, dan kepala daerah serta kepala kepolisian. Artikel berita ini juga memberikan penyadaran bahwa subsidi BBM sangat konsumtif dan harus dikurangi menurut presiden Jokowi.

Identitas. Identitas berhubungan dengan bagaimana Kompas.com memposisikan keberpihakannya. Dalam teks berita ini, Kompas.com berada di pihak pemerintah khususnya presiden Jokowi dengan dukungan yang diberikan melalui wacana tulis yang dipublikasikan. Teks berita ke dua belas ini dapat dideskripsikan bahwa citra positif pemerintah masih tergambar jelas dalam wacana tulis di teks berita diatas.

m. “Blusukan” Jokowi ke Tianjin, dari Kereta Cepat hingga Pembangkit Listrik

Artikel berita berjudul “*Blusukan*” Jokowi ke Tianjin, dari Kereta Cepat hingga Pembangkit Listrik membahas mengenai pertemuan antara presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Keqiang dan presiden Jokowi di

negeri tirai bambu, Cina. Rombongan tersebut menaiki kereta cepat Tianjing-Beijing. Presiden Jokowi mengatakan pembangunan infrastruktur semakin cepat maka semakin baik. Kedatangan presiden Jokowi tersebut juga disambut oleh Wali Kota Tianjing, Huang Xingguo guna melaksanakan kesepakatan terkait pembangunan kereta cepat serta presiden Jokowi juga meninjau pelabuhan terbesar di Tianjin. Mengingat, presiden Jokowi akan mengembangkan 24 pelabuhan dalam lima tahun ini.

Representasi. Artikel berita diatas merepresentasikan mengenai keberhasilan kerjasama yang dilakukan pemerintahan Indonesia bersama pemerintahan Tianjin, Cina. Hal ini direpresentasikan dalam kalimat dibawah ini

“Menurut Presiden, pemerintah pada 2015 akan **siap** membangun empat pelabuhan sehingga kunjungan ke Tianjin tersebut sebagai suatu peninjauan dan pembelajaran.” (paragraf ke-17, baris ke-1, artikel Kompas.com, 11 November 2014)

Penggunaan kata **siap** merepresentasikan keseriusan pemerintah dalam membangun infrastruktur maritim yakni pelabuhan selama lima tahun masa kepemimpinan presiden Jokowi.

Relasi. Relasi yang tercermin dalam artikel berita tersebut terjalin antara pemerintah Indonesia, Cina dan Tiongkok yang menjalin kerjasama yang baik.

Identitas. Identitas, wartawan tergambarkan pada artikel berita tersebut berada dekat dengan pemerintah. Teks berita ketiga belas ini dapat dideskripsikan bahwa teks berita ini memperkuat teks-teks berita sebelumnya mengenai keberhasilan pemerintah dalam menggandeng investor asing untuk membangun infrastruktur di bidang maritim. Hal ini semakin memperkuat citra positif pemerintah dalam kinerjanya mewujudkan paradigma pembangunan Indonesia yang baru yakni Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

n. Menko Indroyono Jajakan Infrastruktur pada Investor AS

Artikel berita berjudul *Menko Indroyono Jajakan Infrastruktur pada Investor AS* membahas mengenai kehadiran Menko Maritim, Indroyono Soesilo dalam US-Indonesia Investment Summit guna menjelaskan mengenai pembangunan yang tengah dijalankan pemerintah baik dari segi tantangannya maupun kesempatan berinvestasi. Peluang investasi yang ditawarkan antara lain pada sektor maritim terkait infrastruktur (pelabuhan), proyek pembangkit listrik, dan pariwisata di Indonesia. Untuk menarik investasi khususnya dari AS, Indroyono menuturkan, pemerintah berkomitmen untuk menyederhanakan dan mempercepat perizinan usaha.

Representasi. Dalam artikel berita diatas, pemerintah Indonesia memberikan kemudahan-kemudahan investasi kepada investor asal AS, seperti mengenai perizinan yang ditunjukkan kalimat dibawah ini

“Untuk menarik investasi khususnya dari AS, Indroyono menuturkan, pemerintah **berkomitmen** untuk menyederhanakan dan mempercepat perizinan usaha.” (paragraf ke-7, baris ke-1, artikel Kompas.com, 12 November 2014)

Penggunaan kata berkomitmen menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia kepada investor asal AS.

Relasi. Relasi yang tercermin dalam teks berita tersebut terjadi antara pemerintah dengan pasar. Hubungan yang terjalin antara Menko Maritim, Indroyono Soesilo dengan investor asal AS. Kemudahan investasi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada AS memberikan citra positif Indonesia dikancah investor asing.

Identitas. Identitas yang tercermin dalam artikel berita tersebut, wartawan berada dekat dengan negara AS. Hal ini juga terlihat ketika diksi yang digunakan oleh wartawan menulis judul artikel dengan kata **Jajakan**.

Tabel 4.3 Perbandingan Kata Jajakan dan Tawarkan

Kosa Kata	Penggunaan dalam Kalimat
Jajakan	Menko Indroyono Jajakan Infrastruktur pada Investor AS
Tawarkan	Menko Indroyono Tawarkan Infrastruktur pada Investor AS

Pemilihan kosa kata dapat mempengaruhi makna yang diberikan oleh khalayak media Kompas.com terhadap teks berita yang dibaca. Penggunaan kata **Jajakan** merupakan bagian dari peyorasi atau penurunan makna. Hal ini berhubungan dengan konstruksi pengetahuan khalayak media, jika kata jajakan berhubungan kepada hal-hal yang merendahkan. Sedangkan kata **Tawarkan** lebih pantas digunakan untuk membahas mengenai ajakan investasi yang dilakukan oleh Menko Maritim kepada Investor AS. Teks berita keempat belas ini dapat dideskripsikan bahwa pemilihan kata tertentu dalam wacana tulis yang dipublikasikan Kompas.com mengandung perbedaan makna saat diinterpretasikan oleh masyarakat atau khalayak media. Meminimalisir penggunaan kata yang tergolong kepada peyorasi dapat membuat wacana tersebut dapat lebih dihargai.

Secara garis besar, media online Kompas.com dalam melakukan konstruksi realitas kemaritiman terkait isu pembangunan infrastruktur maritim yang digagas oleh pemerintah menunjukkan keberpihakannya kepada pemerintah. Serangkaian keberhasilan pemerintahan Joko Widodo untuk menarik investor asing dari beberapa negara seperti Rusia, Amerika, Cina, Tiongkok, Myanmar, Jepang dan lainnya terkonstruksi dengan baik melalui wacana-wacana tulis dengan *headline* berita yang jelas dan kalimat yang mendukung seperti dengan menunjukkan ketertarikan negara asing untuk

berinvestasi pada sektor maritim di Indonesia serta menyebutkan Indonesia sebagai mitra kunci. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa pemerintahan Joko Widodo dengan gagasan pembangunan baru yakni berbasis maritim mendapat dukungan dari negara-negara lain. Akibatnya, khalayak media (pembaca) Kompas.com secara tidak langsung diarahkan bahwa wacana pembangunan infrastruktur maritim dapat direalisasikan dengan baik karena investor asing sangat tertarik untuk menanamkan modal di Indonesia. Namun, disisi lain beberapa pihak dari dalam pemerintahan sendiri masih menunjukkan pesimisme terhadap realisasi program pembangunan infrastruktur maritim seperti tol laut dan pelabuhan.

4.2.2 Analisis Wacana Kritis Teks Berita Tentang Keamanan Laut

Isu mengenai keamanan laut mendapat sorotan yang cukup besar di media online Kompas.com. Mengingat, pilar ke lima dalam gagasan poros maritim dunia yakni Indonesia sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudera, Indonesia berkewajiban membangun kekuatan pertahanan maritim. Pembangunan maritim presiden Jokowi juga menitikberatkan bagi keamanan laut wilayah perairan Indonesia. Dalam beberapa pemberitaan yang ada di Kompas.com membahas mengenai keberhasilan diplomasi pemerintah untuk menggaet negara lain dalam bekerjasama di bidang maritim khususnya mengenai isu keamanan laut.

Keamanan laut menjadi salah satu faktor penting bagi terwujudnya paradigma pembangunan berbasis maritim ke depan. Mengingat, keamanan laut Indonesia kurang mendapat perhatian baik dari pemerintah, masyarakat maupun media. Peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah, belum dijalankan sepenuhnya. Masyarakat khususnya nelayan juga masih melakukan beberapa tindakan ilegal seperti menggunakan pukat harimau, jaring *trawl* sehingga menyebabkan kerusakan terumbu karang. Sedangkan media kurang memberikan ruang bagi pemberitaan mengenai keamanan laut sehingga miskinnya publikasi membuat masalah-masalah yang ada terkait

keamanan sepertinya tidak ada. Keamanan laut bukan hanya ancaman dari dalam bangsa sendiri melainkan juga adanya ancaman dari luar, seperti *illegal fishing*, bongkar muat kapal di tengah laut dan sebagainya. Artikel berita di media online Kompas.com mengenai isu keamanan laut dapat digolongkan kedalam berita berat atau *hardnews*. Beberapa artikel berita Kompas.com dibawah ini dapat dikategorikan masuk ke dalam isu kemaritiman yang berhubungan dengan keamanan laut antara lain

Tabel 4.4 Artikel Berita Tentang Keamanan Laut

No.	Judul Berita di Kompas.com	Tanggal Publikasi di Kompas.com
1.	Rencana 'Drone' Jokowi Didukung Konsorsium Eropa	4 November 2014
2.	Dubes: Amerika Siap Bantu Pertahanan Maritim Indonesia	19 November 2014
3.	Jokowi Sebut "Illegal Fishing" Rugikan Negara Rp 300 Triliun, Ini Respon Susi Pudjiastuti	28 Oktober 2014
4.	Ini Strategi Susi Pudjiastuti untuk Babat "Illegal Fishing"	30 Oktober 2014
5.	Berantas Illegal Fishing, Bakamla dapat Hibah 10 Kapal TNI AL	12 Januari 2014
6.	Ratusan Kapal Perang Siap Dikerahkan untuk Tindak Illegal Fishing	30 Oktober 2014
7.	Jokowi: Anggaran Pertahanan Tergantung Pertumbuhan Ekonomi	7 November 2014
8.	Menteri Susi: Nelayan Asing Mulai "Ketar-ketir" Masuk ke Indonesia	27 November 2014
9.	Moratorium Berdampak, Aktivitas Kapal Bekas Impor Berkurang	2 Desember 2014
10.	Jokowi Minta Penuntasan Hukum atas 5 Kapal Asing yang ditangkap TNI	5 November 2014
11.	Demi Visi Maritim Jokowi, Kemenhan Akan Tambah Produksi Kapal Selam	5 November 2014

Judul artikel berita diatas merupakan bagian dari artikel yang dipublikasikan media online Kompas.com yang berkaitan dengan isu keamanan laut. Artikel berita tersebut dapat dianalisis menggunakan analisis wacana kritis pada tataran mikro atau tingkat teks dengan cara mengetahui representasi, relasi dan identitas yang pada akhirnya akan mengarah kepada konstruksi yang dibangun Kompas.com terkait pemberitaan mengenai keamanan laut.

a. **Rencana ‘Drone’ Jokowi Didukung Konsorsium Eropa**

Artikel yang berjudul *Rencana ‘Drone’ Jokowi Didukung Konsorsium Eropa* membahas mengenai salah satu program yang pernah diutarakan Jokowi dalam kampanyenya adalah memanfaatkan *drone* atau UAV (*unmanned aerial vehicle*/pesawat terbang tanpa awak) untuk menjaga wilayah laut Indonesia. Hal tersebut ditanggapi oleh Martin Elbourne, Business Development Eurofighter GmbH bahwa pihaknya siap mendukung rencana tersebut baik dari sisi *hardware* maupun *software*. Eurofighter GmbH adalah konsorsium perusahaan perakit pesawat terbang Eropa yang berpartisipasi dalam pameran pertahanan Indo Defence 2014. Pesawat tanpa awak tersebut bisa digunakan oleh pemerintah RI untuk berbagai kepentingan, seperti patrol maritim, menjaga wilayah perbatasan, serta memantau aktivitas *illegal fishing* atau *illegal logging*.

Representasi. Dalam artikel berita ini, tampak dukungan yang besar dari pengusaha asing asal Eropa yang ingin bekerjasama dengan pemerintah guna merealisasikan program maritim Jokowi yakni menjaga kedaulatan maritim dengan menggunakan drone, seperti yang terepresentasi dalam kalimat dibawah ini

“Menanggapi hal tersebut, Eurofighter GmbH... pihaknya **siap** mendukung rencana tersebut baik dari sisi hardware maupun software.” (paragraf ke-2, baris ke-2, artikel Kompas.com, 4 November 2014)

Penggunaan kata **siap** merepresentasikan bahwa pengusaha asal Eropa telah bersedia dan menunjukkan keseriusan terhadap rencana *drone* yang digagas presiden Jokowi.

Relasi. Relasi yang terjalin dalam teks berita tersebut yakni hubungan antara pengusaha asal Eropa dengan pemerintah Indonesia. Pihak asing menawarkan bantuan dan bersedia untuk membantu mewujudkan visi kemaritiman yang berhubungan dengan pertahanan laut.

Identitas. Identitas yang ditunjukkan dalam teks terlihat dekat dengan pasar/pengusaha. Teks berita diatas dapat dideskripsikan bahwa pengusaha asing bersedia untuk melakukan kerja sama dengan pemerintah. Hal ini secara langsung dapat dimaknai bahwa pemerintahan Joko Widodo mendapat sambutan baik oleh pengusaha asing dengan keseriusan yang ditunjukkannya kepada pemerintah untuk realisasi penggunaan *drone* sebagai pertahanan dan keamanan wilayah perairan Indonesia.

b. Dubes: Amerika Siap Bantu Pertahanan Maritim Indonesia

Artikel berjudul *Dubes: Amerika Siap Bantu Pertahanan Maritim Indonesia* membahas mengenai Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Robert Orris Blake yang menyatakan bahwa negaranya siap untuk membantu pertahanan wilayah maritim Indonesia seiring dengan konsep poros maritim Jokowi. Ia juga menjamin Amerika siap memberikan peningkatan keamanan di wilayah perairan Indonesia dengan sumberdaya dari angkatan militer Amerika. Sokongan pertahanan tersebut bisa berupa pelatihan militer khusus atau peralatan untuk memperkuat pertahanan dan memastikan keamanan laut dan untuk mencegah penangkapan ikan oleh kapal asing.

Representasi. Representasi dalam teks berita tersebut ada dalam kalimat dibawah ini

“Ia **menjamin** Amerika siap memberikan peningkatan keamanan di wilayah perairan Indonesia...” (paragraf ke-3, baris ke-1, artikel Kompas.com, 19 November 2014)

Penggunaan kata **menjamin** merepresentasikan bahwa negara AS melalui Dubes AS berjanji dan berkomitmen untuk membantu pertahanan dan keamanan laut Indonesia.

Relasi. Dalam artikel ini, relasi atau hubungan yang baik terjalin antara negara Amerika dengan Indonesia. Hal tersebut dapat tercermin dari beberapa pernyataan dari Duta Besar Amerika yang menjamin negaranya akan ikut berpartisipasi untuk mewujudkan keamanan perairan.

Identitas. Identitas yang tercermin dalam teks berada dekat dengan pemerintah. Teks berita kedua memiliki kesamaan makna dengan teks berita pertama. Tidak hanya negara Rusia yang menunjukkan keseriusan terhadap realisasi program pemerintahan Jokowi, namun negara Amerika juga setali tiga uang dengan negara di benua Eropa tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Kompas.com juga turut serta mengkonstruksi citra positif pemerintahan Jokowi karena keseriusan beberapa negara untuk ikut serta merealisasikan janji kampanye presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

c. Jokowi Sebut “Illegal Fishing” Rugikan Negara Rp 300 Triliun, Ini Respon Susi Pudjiastuti

Artikel yang berjudul *Jokowi Sebut “Illegal Fishing” Rugikan Negara Rp 300 Triliun, Ini Respon Susi Pudjiastuti* membahas mengenai respon dari pernyataan presiden Jokowi terkait data kerugian akibat pencurian hasil laut perairan Indonesia yang ditaksir mencapai Rp 300 triliun. Menteri Susi ingin menunggu data terlebih dulu dari anak buahnya mengenai kapal yang beroperasi serta hak milik dan perizinan. Dari situ, akan diawasi pergerakannya.

Representasi. Dalam artikel tersebut, terepresentasikan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bergerak dengan cepat

setelah mengetahui pernyataan dari presiden Jokowi untuk segera ditindaklanjuti seperti yang tampak dalam kalimat dibawah ini

“Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti **merespons cepat** pernyataan presiden Joko Widodo...”
(paragraf ke-1, baris ke-1, artikel Kompas.com, 28 Oktober 2014)

Penggunaan kalimat **merespons cepat** merepresentasikan keseriusan dari Menteri Susi untuk mendukung visi kemaritiman presiden Jokowi.

Relasi. Hubungan yang ada dalam teks terjadi antara Menteri Susi dengan presiden Jokowi yang harmonis karena Menteri Susi segera bekerja sesaat setelah mendengar pernyataan kerugian akibat illegal fishing yang merupakan salah satu masalah di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Identitas. Identitas dalam teks ini memposisikan berada dekat kepada pemerintah karena turut serta membangun citra positif yang ditampilkan melalui pemberitaan tersebut. Teks berita ketiga dapat dideskripsikan bahwa lembaga pemerintahan Jokowi khususnya yang berbasis maritim menunjukkan sikap kerja yang baik dan saling mendukung. Hal ini dibuktikan dengan tanggapan dari Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) yang serius dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan cepat dan tanggap.

d. Ratusan Kapal Perang Siap Dikerahkan untuk Tindak “Illegal Fishing”

Artikel yang berjudul *Ratusan Kapal Perang Siap Dikerahkan untuk Tindak “Illegal Fishing”* membahas mengenai kesiapan TNI AL mengoperasikan sekitar 147 kapal perang untuk menindak penangkapan ikan ilegal sesuai perintah presiden Jokowi. Menurut Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Marsetio, setelah penandatanganan nota kesepahaman antara pihaknya dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan patroli di laut yang merupakan bagian dari fungsi penegakan hukum di wilayah maritim Indonesia.

Representasi. Penggunaan kalimat **sudah teratasi** dalam pernyataan di bawah ini dapat merepresentasi bahwa pemerintah serius dalam berkomitmen dengan TNI AL dalam menyelesaikan masalah *illegal fishing*. Karena penyelesaian masalah keamanan laut juga merupakan bagian dari fungsi TNI AL.

Relasi. Relasi yang terjalin dalam teks antara TNI AL dengan Kementerian maritim memiliki hubungan yang baik, hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari Laksamana Marsetio seperti dalam kalimat di bawah ini

“Semua kapal perang kita siap. Memang selama ini ada hambatan di anggaran untuk pemenuhan kebutuhan bahan bakar, tetapi **sudah teratasi...**” (paragraf ke-2, baris ke-1, artikel Kompas.com, 4 Desember 2014)

Identitas. Identitas yang ditunjukkan dalam teks dekat dengan pemerintah. Teks berita keempat dapat dideskripsikan bahwa lembaga pemerintahan bekerja dengan baik. Hal ini memiliki kesamaan makna dengan teks berita sebelumnya yang menunjukkan citra positif pemerintahan Jokowi dalam hal keamanan laut. Rangkaian wacana tulis (berita) yang memiliki kesamaan makna pada akhirnya akan memperkuat wacana sebelumnya dan mengkonstruksikan bahwa wacana tulis tersebut benar-benar realitas atau kenyataan yang benar-benar terjadi dan dapat mempengaruhi penilaian khalayak media Kompas.com terhadap pemerintah.

e. **Berantas Illegal Fishing, Bakamla Dapat Hibah 10 Kapal TNI AL**

Artikel berjudul *Berantas Illegal Fishing, Bakamla Dapat Hibah 10 Kapal TNI AL* membahas mengenai pembentukan lembaga baru yang telah disepakati oleh pemerintah yakni Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang dibentuk oleh presiden sesuai dengan Perpres 178/2014, mengacu pada UU 32/2014 tentang kelautan. Bakamla ditugaskan untuk menangani *illegal fishing*. Untuk itu, menurut Indroyono TNI AL akan segera menghibahkan 10 kapal patrol untuk aset awal dalam rangka melaksanakan kegiatan keamanan

dan keselamatan laut. Kepala Bakamla desi Albert Mamahit juga membenarkan pemberian aset tersebut dalam waktu dekat 10 kapal dari TNI AL, 3-5 kapal dari KKP dan 4 kapal dari Kemenko Maritim.

Representasi. Keseriusan dari Kemenko Maritim kepada lembaga baru Bakamla untuk menghibahkan kapal terepresentasi dari penggunaan kata **segera** yang ada di pernyataan dalam tabel di bawah ini. Pernyataan membenaran dari Bakamla semakin menegaskan citra positif pemerintah yang memang menunjukkan keseriusannya untuk melaksanakan program kemaritiman khususnya pada sektor pertahanan dan keamanan laut.

Relasi. Dalam teks tersebut, relasi antara masing-masing lembaga pemerintah saling mendukung satu sama lain yakni antara Kemenko Maritim dan Bakamla. Hal ini dapat tercermin dari pernyataan perwakilan masing-masing lembaga yang digambarkan dalam tabel di bawah ini

Tabel 4.5 Pernyataan Saling Mendukung Pemerintah

No.	Perwakilan Lembaga Pemerintah	Pernyataan Dukungan
3.	Kemenko Maritim (Indroyono Soesilo)	“Oleh karena itu TNI-AL akan segera menghibahkan 10 kapal patrolinya kepada Bakamla sebagai aset awal dalam rangka melaksanakan kegiatan keamanan dan keselamatan laut,” ucap Indroyono (paragraf ke-4, baris ke-2, artikel Kompas.com, 12 Januari 2014)
4.	Bakamla (Desi Albert)	Dalam kesempatan sama, Kepala Bakamla Desi Albert Mamahit membenarkan sejumlah stakeholders... (paragraf ke-5, baris ke-1)

Identitas. Identitas dari wartawan menunjukkan jika ia dekat dengan pemerintah. Teks kelima dapat dideskripsikan bahwa kerja yang dilakukan lembaga-lembaga pemerintah berbasis maritim dilakukan dengan baik. Beberapa artikel berita sebelumnya juga menunjukkan bahwa lembaga-lembaga pemerintah yang berbasis maritim ini mampu melakukan tugas dan fungsinya dengan baik

f. Ini Strategi Susi Pudjiastuti untuk Babat Illegal Fishing

Artikel yang berjudul *Ini Strategi Susi Pudjiastuti untuk Babat Illegal Fishing* membahas mengenai strategi Menteri Susi untuk memberantas para pencuri kekayaan laut. Kementeriannya akan membenahi data inventarisasi kekayaan laut Indonesia, sekaligus data pelaku usaha di sektor perikanan tangkap dan budidaya serta akan mengadakan pertemuan rutin dengan para dinas terkait KKP di masing-masing daerah yang direncanakan rutin sebulan sekali.

Representasi. Dalam artikel berita tersebut, representasi pemerintah tampak positif. Hal ini dapat dilihat dari kalimat dibawah ini

“Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, **memastikan** akan memberantas para pencuri kekayaan laut Indonesia.” (paragraf ke-1, baris ke-1, artikel Kompas.com, 30 Oktober 2014

Komitmen pemerintah untuk menindak tegas kasus illegal fishing dapat direpresentasikan dengan penggunaan kata **memastikan**. Ketegasan pemerintah khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan tercermin dengan jelas dari pernyataan diatas.

Relasi. Relasi yang muncul dalam teks berita diatas terjalin antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (Menteri Susi) dengan masyarakat khususnya para pelaku tindak pidana *illegal fishing*.

Identitas. Dalam artikel ini, teks berita berada dekat dengan pemerintah. Hal ini digambarkan bahwa keseluruhan artikel memberikan

kesadaran kepada masyarakat bahwa pemerintah akan menindak tegas pelaku pencurian ikan. Teks berita keenam ini dapat dideskripsikan bahwa kinerja pemerintah untuk merealisasikan program-program kemaritiman yang berhubungan dengan keamanan laut khususnya mengenai masalah pencurian ikan dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat bagaimana Kompas.com mengambil tokoh yang digunakan untuk menggambarkan kinerja pemerintah yakni Menteri Kelautan dan Perikanan memberikan argumentasi yang jelas dan tegas seperti kalimat pernyataan di atas.

g. Jokowi: Anggaran Pertahanan Tergantung Pertumbuhan Ekonomi

Artikel berjudul *Jokowi: Anggaran Pertahanan Tergantung Pertumbuhan Ekonomi* membahas mengenai anggaran pertahanan akan disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah dalam menjadikan Indonesia sebagai poros maritim. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita diatas tujuh maka anggaran pertahanan akan bisa 3 kali lipat daripada yang sekarang. Terkait dengan program kemaritiman, Jokowi akan mempersiapkan beberapa hal termasuk peningkatan dalam hal pertahanan.

Representasi. Dalam artikel ini, Kompas.com juga menampilkan citra positif pemerintah yang direpresentasikan dalam kalimat dibawah ini

“Saat ditanya terkait masalah keamanan di wilayah laut dan udara. Ia mengatakan, pemerintah akan **segera** menambah armada...” (paragraf ke-6, baris ke-1, artikel Kompas.com, 7 November 2014)

Penggunaan kata **segera** mengacu kepada keseriusan pemerintah dalam menjalankan visi kemaritiman yang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan laut.

Relasi. Relasi yang tergambar dalam teks berita terjalin antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat dikonstruksikan bahwa pemerintah serius dalam menjaga sektor maritim Indonesia.

Identitas. Identitas yang tercermin dalam teks menunjukkan keberpihakannya dengan pemerintah. Teks berita ketujuh ini dapat dideskripsikan bahwa pemerintah secara tanggap akan melaksanakan tugas dan fungsinya yakni salah satunya mengenai masalah keamanan laut. Teks berita ini memiliki kesamaan makna dengan teks berita sebelumnya yang mengkonstruksikan kinerja pemerintah Joko Widodo yang baik.

h. Menteri Susi: Nelayan Asing Mulai “Ketar-Ketir” Masuk Ke Indonesia

Artikel berita berjudul *Menteri Susi: Nelayan Asing Mulai “Ketar-Ketir” Masuk Ke Indonesia* membahas mengenai langkah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang melakukan moratorium izin operasi kapal ikan yang memiliki berat diatas 30 gross tonnage (GT) membuahkan hasil. Keberhasilan tersebut membuat pasokan ikan terjaga selama sebulan ini. Penghentian penerbitan izin kapal penangkap ikan dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan lantaran Susi menilai bahwa kapal asing tanpa izin acap kali mengambil kesempatan dari lemahnya penegakan hukum maritim di Indonesia. Menteri Susi juga menegaskan bahwa kapal-kapal asing tidak boleh memboyong ikan dari Indonesia secara ilegal.

Representasi. Dalam artikel ini, pemerintah melalui Menteri Kelautan dan Perikanan membawa angin segar bagi terselenggaranya pemerintah yang baik khususnya masalah penanganan hukum laut. Hal ini terepresentasi melalui kalimat di bawah ini

“Moratorium, saya baru lakukan sebulan ini, **pengaruhnya luar biasa...**” (paragraf ke-3, baris ke-1, artikel Kompas.com, 27 november 2014)

Kalimat **pengaruhnya luar biasa** merepresentasikan bahwa peraturan Menteri Susi terkait izin operasi kapal berhasil dan berdampak positif bagi para nelayan. Hal ini merepresentasikan kinerja yang baik telah dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Relasi. Relasi yang tercermin dalam teks terjadi antara Menteri Susi dan negara lain. Hubungan negara lain dengan Indonesia tidak hanya mengenai investor di sektor pembangunan infrastruktur maritim tetapi juga masalah keamanan laut. Dalam artikel ini, negara lain direpresentasikan tunduk pada Indonesia yang seperti terlihat pada kalimat di bawah ini yang menggunakan kata **gentar** sebagai berikut

“Terbiasa menghadapi hukum Indonesia yang permisif, Susi pun tidak menampik bahwa peraturan tersebut membuat pihak asing **gentar**.” (paragraf ke-5, baris ke-1, artikel Kompas.com, 27 November 2014)

Identitas. Identitas wartawan yang ada dalam pemberitaan ini memposisikan berada dekat dengan pemerintah. Dengan dibuktikan, konstruksi yang diproduksi melalui teks berita menyudutkan pihak asing. Teks berita kedelapan ini mendeskripsikan bahwa regulasi yang dibuat oleh pemerintah terhadap masalah izin operasi kapal asing memiliki dampak yang menguntungkan negara Indonesia. Teks berita ini juga memperkuat konstruksi atas kinerja pemerintah yang baik.

i. Moratorium Berdampak, Aktivitas Kapal Bekas Impor Berkurang

Artikel berita berjudul *Moratorium Berdampak, Aktivitas Kapal Bekas Impor Berkurang* membahas mengenai kebijakan moratorium izin kapal dan penanganan kapal bekas impor yang berada di perairan Indonesia berkurang drastis. Dari sistem pemantauan kapal perikanan diketahui, pada 15 oktober terdapat 933 kapal eks asing berada di perairan Indonesia. Namun, setelah moratorium diberlakukan diketahui, pada 19 November hanya tinggal 164 kapal. Dengan data tersebut, banyak para investor mulai berdatangan, karena kebijakan tersebut dapat memproteksi para pemilik kapal. Pemilik kapal dan sejumlah pedagang di daerah juga mulai mudah mendapatkan ikan.

Representasi. Dalam artikel berita diatas, pemerintah khususnya Menteri kelautan dan Perikanan telah berhasil mengembalikan keamanan bagi

masyarakat nelayan daerah. Hal itu terepresentasikan dalam kalimat di bawah ini

“Mereka menyatakan, dengan kebijakan itu, para pemilik kapal akan merasa **terproteksi**.” (paragraf ke-6, baris ke-2, artikel Kompas.com, 2 Desember 2014)

Penggunaan kata **terproteksi** tersebut merepresentasikan bahwa para pemilik kapal merasa terlindungi atau dengan kata lain aman dalam melakukan kegiatan ekonomi di laut.

Relasi. Hubungan yang tercermin dari teks berita diatas terjadi antara Menteri Susi dan para pemilik kapal di daerah. Hubungan yang baik terjalin antar keduanya.

Identitas. Identitas yang ditunjukkan dalam teks berita berada dekat dengan pemerintah. Teks berita kesembilan ini mendeskripsikan bahwa dengan adanya moratorium atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah di bidang maritim memiliki dampak positif bagi masyarakat nelayan. Hal ini juga memperkuat teks-teks berita yang mengkonstruksi mengenai kinerja pemerintahan Jokowi.

j. Jokowi Minta Penuntasan Hukum Atas 5 Kapal Asing yang Ditangkap TNI

Artikel berita berjudul *Jokowi Minta Penuntasan Hukum Atas 5 Kapal Asing yang Ditangkap TNI* membahas mengenai laporan dari Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Marsetio kepada presiden Jokowi terkait penangkapan lima kapal asing. Menurutnya, penyelesaian masalah ini harus tuntas dilakukan. Hal ini juga mendapat apresiasi dari presiden Jokowi terhadap kinerja TNI AL. Oleh sebab itu, rencananya TNI AL akan menambah beberapa alutsista guna menjaga pertahanan dan keamanan laut Indonesia.

Representasi. Representasi dari pemerintahan yang baik tercermin dari permintaan presiden Jokowi untuk menuntaskan masalah pencurian ikan oleh kapal asing di laut Sumatera yang ada dalam kalimat dibawah ini

“Menurut Marsetio, Jokowi **meminta** agar proses hukum atas lima kapal asing itu **dituntaskan.**” (paragraf ke-1, baris ke-1, artikel Kompas.com, 5 November 2014)

Representasi positif pemerintah tercermin dalam susunan kalimat diatas. Permintaan Jokowi menunjukkan keseriusan terhadap kasus hukum atas lima kapal asing yang menjadi masalah bagi keamanan wilayah laut Indonesia dan merugikan masyarakat nelayan.

Relasi. Dalam artikel berita diatas, relasi yang terjadi antara presiden Jokowi dengan TNI AL berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kalimat dibawah ini

“Ia mengatakan, Presiden Jokowi **mengapresiasi** keberhasilan TNI AL...” (paragraf ke3, baris ke-1, artikel Kompas.com, 5 November 2014)

Apresiasi yang diberikan oleh presiden Jokowi terhadap TNI AL merupakan bagian dari relasi yang harmonis antara pemimpin dengan bawahan.

Identitas. Identitas dari wartawan berada dalam posisi dekat dengan pemerintah. Teks berita kesepuluh mendeskripsikan bahwa hubungan baik antar lembaga pemerintah dalam menuntaskan masalah mengenai keamanan laut dilakukan dengan baik. Koordinasi yang baik antara lembaga keamanan Indonesia dengan kepala negara (presiden) tergambar dengan jelas dalam teks berita ini. Hal ini semakin menegaskan jika Kompas.com secara jelas menunjukkan bahwa pemerintah bekerja dengan baik saat ini.

k. **Demi Visi Maritim Jokowi, Kemenhan Akan Tambah Produksi Kapal Selam**

Artikel berjudul *Demi Visi Maritim Jokowi, Kemenhan Akan Tambah Produksi Kapal Selam* membahas mengenai tekad Kementerian Pertahanan untuk menambah produksi kapal selam untuk mewujudkan visi maritim pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kemenhan saat ini, tengah memproduksi tiga kapal selam sebagai alutsista tambahan. Pemerintah juga bekerjasama dengan negara Korea. Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu mengaku cukup puas dengan alutsista yang sudah dimiliki. Namun menurut dia, masih dibutuhkan berbagai perkembangan dan perbaikan agar visi maritim yang dicita-citakan Jokowi bisa benar-benar terwujud.

Representasi. Representasi pemerintah Jokowi dicitrakan secara positif dengan dukungan dari Menteri Pertahanan seperti yang ada dalam kalimat di bawah ini

“Kementerian Pertahanan **bertekad** menambah produksi kapal selam...” (paragraf ke-1, baris ke-1, artikel Kompas.com, 5 November 2014)

Penggunaan kata **bertekad** menunjukkan kesungguhan dari Kementerian Pertahanan untuk mendukung terwujudnya visi misi maritim presiden Jokowi.

Relasi. Relasi yang terjalin dalam teks berita diatas terjadi antara Menteri Pertahanan dengan presiden Jokowi. Dukungan terhadap pemerintahan Jokowi ditunjukkan oleh Kemenhan dengan bekerja lebih keras lagi dalam memproduksi kapal selam.

Identitas. Identitas yang ditunjukkan dalam artikel ini mengarah kepada pemerintah. Teks berita kesebelas ini dapat dideskripsikan bahwa koordinasi antar lembaga pemerintah khususnya di bidang keamanan berjalan dengan baik. Teks berita ini memiliki kesamaan makna dengan teks berita sebelumnya yang merupakan teks berita yang menunjukkan bahwa kinerja

masing-masing lembaga pemerintah dilakukan dengan baik dan tanggap dalam menghadapi masalah keamanan laut, memperkuat dan merealisasikan program keamanan laut. Hal inilah yang menjadi konstruksi media online Kompas.com

Secara garis besar, pemberitaan mengenai keamanan laut dikonstruksikan oleh media online Kompas.com kedalam beberapa hal antara lain kerjasama dengan pengusaha Amerika, Eropa dan Korea. Keberhasilan pemerintah dalam menarik investor asing tidak hanya terjadi pada pembangunan infrastruktur saja melainkan pada sektor pertahanan dan keamanan laut juga. Selain itu, pemerintah dikonstruksikan Kompas.com sebagai pemerintah yang tegas dalam menindak berbagai masalah hukum terkait keamanan laut. Pemerintah juga membentuk lembaga baru yang difokuskan untuk menangani *illegal fishing* yakni Bakamla serta pemerintah juga tampak serius untuk mewujudkan visi misi presiden Jokowi terkait pertahanan dan keamanan laut yang terlihat dari pemroduksian beberapa alutsista seperti kapal selam. Secara jelas media online Kompas.com mengkonstruksi pemerintah memiliki kinerja yang baik dan tanggap.

4.2.3 Analisis Wacana Kritis Teks Berita Tentang Kesejahteraan Nelayan

Kesejahteraan nelayan merupakan salah satu indikator terpenting dalam pembangunan. Nelayan dalam realitanya menjadi kelompok sosial dengan keterbatasan ekonomi. Hampir di semua buku literatur mengenai masyarakat maritim atau nelayan, mereka selalu digambarkan sebagai kaum yang secara ekonomi memiliki keterbatasan dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang rendah. Meskipun sebagian besar wilayah negara Indonesia berupa lautan tetapi nelayan di Indonesia dapat digambarkan seperti manusia yang mati di lumbung padi. Nelayan di Indonesia juga tak luput dari stratifikasi sosial atau terdiri dari beberapa kelas sosial. Sebagian besar kategori sosial nelayan Indonesia adalah nelayan tradisional dan nelayan buruh. Mereka adalah penyumbang utama kuantitas produksi perikanan

tangkap nasional. Walaupun demikian, posisi sosial mereka tetap marginal dalam proses transaksi ekonomi yang timpang dan eksploitatif sehingga sebagai pihak produsen, nelayan tidak memperoleh bagian pendapatan yang besar dalam Kusnadi (2007:1).

Media online Kompas.com juga menggambarkan kelompok sosial dalam beberapa artikel berita. Berita mengenai kesejahteraan nelayan dalam media online Kompas.com dapat digolongkan ke dalam berita berat atau *hardnews*. Pemberitaan mengenai nelayan merupakan bagian dari konstruksi yang dihasilkan media yang pada akhirnya dapat menjadi sumber pengetahuan bagi khalayak media sekaligus mempengaruhi pola pikir khalayak atau masyarakat media. Beberapa artikel yang ada di Kompas.com antara lain

4.6 Tabel Artikel Berita Tentang Kesejahteraan Nelayan

No.	Judul Artikel Berita di Kompas.com	Tanggal Publikasi Kompas.com
1. A	100 Kades Berkumpul di Yogya Bahas Soal Kesejahteraan Nelayan	14 November 2014
2.	Dapat Dukungan dari Perbankan, Menteri Susi Malah Agak Khawatir	27 November 2014
5.	Ini yang Didapatkan Nelayan dari Pengalihan Subsidi BBM	18 November 2014
6.	Koordinasi Kementerian: Dianggap Penting untuk Kembangkan Desa Pesisir	26 Januari 2015
7.	Nelayan Kita	19 November 2014
8.	Nelayan, “Drone”, dan Poros Maritim	6 November 2014

iatas dapat dilihat mengenai konstruksi yang dibangun oleh media online Kompas.com mengenai kesejahteraan nelayan dengan menggunakan analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis pada level teks meliputi representasi,

relasi dan identitas. Ketiganya dapat menjelaskan konstruksi media terhadap realitas.

a. 100 Kades Berkumpul di Yogya Bahas Soal Kesejahteraan Nelayan

Artikel yang berjudul *100 Kades Berkumpul di Yogya Bahas Soal Kesejahteraan Nelayan* membahas mengenai 100 kepala desa nelayan berkumpul di Yogyakarta untuk mendiskusikan dan membuat pemetaan persoalan para nelayan yang menjadi warganya serta mencari solusi. Acara tersebut diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai langkah terobosan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup nelayan yang umumnya masih terpinggirkan. Menurut Zaini Hanafi, direktur pengembangan usaha penangkapan ikan KKP, acara ini merupakan langkah awal untuk mewujudkan 1000 kampung nelayan yang mandiri, tangguh, indah dan maju dengan sebutan Sekaya Maritim.

Representasi. Dalam artikel ini, pemerintah direpresentasikan bertindak aktif dalam melakukan realisasi program-program presiden Jokowi. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan kata **inisiasi** yang bermakna melakukan pekerjaan awal, sehingga citra positif pemerintah terkonstruksi dengan baik seperti yang terlihat dalam kalimat di bawah ini

“Acara yang **diinisiasi** oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan ini merupakan langkah terobosan...”
(paragraf ke-2, baris ke-1, artikel Kompas.com, 14 November 2014)

Sedangkan kaum nelayan direpresentasikan sebagai kelompok sosial yang masih terpinggirkan. Hal ini nampak jelas dalam kalimat di bawah ini

“Acara yang diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan ini merupakan langkah terobosan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup para nelayan yang umumnya **masih terpinggirkan**.” (paragraf ke-2, baris ke-1, artikel Kompas.com, 14 November 2014)

Kelompok sosial nelayan dalam artikel berita Kompas.com dikonstruksikan sebagai kelompok yang memiliki kesejahteraan yang rendah. Hal ini terlihat dari kutipan diatas.

Relasi. Relasi yang terdapat dalam teks berita ini terjalin antara para kepala desa nelayan, pemerintah dan masyarakat khususnya nelayan. Dalam relasi yang ada dalam teks, pemerintah digambarkan memiliki hubungan yang baik dengan warganya karena melaksanakan pemerintahan dengan baik.

Identitas. Identitas yang ditunjukkan dalam teks berita ini masih membingungkan karena berada di antara pemerintah dan nelayan. Teks berita ini mendeskripsikan bahwa hubungan yang baik terjalin antara pemerintah dan masyarakat. Ambiguitas Kompas.com dalam mengkonstruksi citra positif pemerintah mengalami kegagalan. Kesejahteraan nelayan yang pada umumnya masih terpinggirkan merupakan bagian dari tanggungjawab pemerintah dalam menyejahterahkan rakyatnya termasuk kaum nelayan. Dalam artikel ini, pemerintah diibaratkan seperti koin yang memiliki dua sisi, di satu sisi pemerintah melakukan pemerintahan dengan baik di satu sisi pemerintah mengalami kegagalan dalam mewujudkan kesejahteraan bagi warganya.

b. Dapat Dukungan dari Perbankan, Menteri Susi Malah Agak Khawatir

Artikel berjudul *Dapat Dukungan dari Perbankan, Menteri Susi Malah Agak Khawatir* membahas mengenai kekhawatiran Menteri Susi Pudjiastuti terhadap dukungan dari industri perbankan. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pelaku usaha di sektor maritim sebelum mampu memberikan timbale balik sepadan bagi industri jasa keuangan. Menurutnya, masih banyak salah kelola di sektor maritim seperti kebutuhan asuransi nelayan yang masih belum serius dipertimbangkan. Padahal, nelayan membutuhkan asuransi untuk menghadapi bencana alam dan gangguan kesehatan.

Representasi. Pelaku usaha di sektor maritim yang didalamnya nelayan dalam artikel ini direpresentasikan tidak mampu dalam menerima dukungan dari perbankan dan ketidakpercayaan dari Menteri Susi kepada pelaku usaha di sektor maritim. Hal ini direpresentasikan dalam kalimat dibawah ini

“Menurut Susi, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pelaku usaha di sektor maritim **sebelum mampu memberikan timbal balik sepadan** bagi industri jasa keuangan.” (paragraf ke-3, baris ke-1, artikel Kompas.com, 27 November 2014)

Penggunaan kalimat tersebut merepresentasikan ketidakpercayaan terhadap para pelaku usaha di sektor maritim untuk memberikan keuntungan yang imbang dalam relasinya dengan perbankan.

Relasi. Dalam artikel ini, relasi yang terbangun antara Menteri Susi Pudjiastuti, Industri Keuangan dan Pengelola Sektor Maritim yang didalamnya termasuk nelayan. Menteri Susi menunjukkan hubungan yang baik karena beliau ingin memperbaiki pengelolaan sektor maritim seperti kebutuhan asuransi bagi nelayan.

Identitas. Identitas yang ditunjukkan dalam artikel berita ini lebih condong pada pemerintah. Teks berita kedua ini mendeskripsikan bahwa pemerintah masih memandang secara pesimis terhadap masyarakat nelayan. Hal ini terungkap dari pernyataan diatas yang menyebutkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan sebelum mendapat pinjaman dari industri jasa keuangan.

c. Ini yang Didapatkan Nelayan dari Pengalihan Subsidi BBM

Artikel berita *Ini yang Didapatkan Nelayan dari Pengalihan Subsidi BBM* membahas mengenai pengalihan dana dari subsidi BBM untuk memajukan sektor perikanan. Menurut Indroyono, dana itu dapat digunakan untuk membeli sejumlah peralatan baru bagi para nelayan seperti mesin baru, jaring tangkap baru, dan *cool boxes*. Pemerintah juga mengklaim telah

membagikan sekitar 6.000 kartu kepada para nelayan di Jawa Tengah. Pemerintah juga tak lupa untuk meningkatkan keamanan laut.

Representasi. Pemerintah dicitrakan positif dengan memperlihatkan kerja nyatanya untuk para nelayan yang ada dalam kalimat di bawah ini

“Pemerintah **mengklaim** sudah membagikan sekitar 6.000 kartu kepada para nelayan di Jawa tengah.”
(paragraf ke-4, baris ke-1, artikel Kompas.com, 18 November 2014)

Representasi positif pemerintah nampak jelas dengan penggunaan kata **mengklaim** untuk menunjukkan bahwa kinerja pemerintah cukup baik.

Relasi. Dalam artikel diatas, relasi yang terjalin dalam teks antara pemerintah dan para nelayan. Pemerintah berada pada posisi ordinat atau memiliki peran penting terhadap masyarakat nelayan.

Identitas. Identitas yang ditunjukkan dalam teks berita ini berada pada posisi lebih dekat dengan pemerintah karena konstruksi positif pemerintah dibangun lewat teks berita tersebut. Teks berita ketiga ini mendeskripsikan bahwa masyarakat nelayan masih memiliki keterbatasan. Hal ini tergambar jelas dengan pemberian bantuan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kaum nelayan. Citra positif pemerintah juga tercermin dengan baik dalam artikel berita diatas. Namun, perlu diingat bahwa konstruksi realitas yang diciptakan oleh wartawan melalui produksi berita dapat mempengaruhi khalayak atau masyarakat media.

d. **Koordinasi Kementerian: Dianggap Penting untuk Kembangkan Desa Pesisir**

Artikel berjudul *Koordinasi Kementerian: Dianggap Penting untuk Kembangkan Desa Pesisir* membahas mengenai pengembangan desa di kawasan pesisir sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar mengatakan masih banyak desa pesisir yang belum mendapat perhatian maksimal dan belum diberdayakan.

Warga desa pesisir yang mayoritas nelayan juga menghadapi masalah yang harus diselesaikan dengan campur tangan pemerintah. Di desa Surya Bahari misalnya, dia mendengar berbagai keluhan para nelayan. Diantaranya mengenai pendangkalan kali menuju laut yang menyebabkan kesulitan untuk menangkap ikan.

Representasi. Representasi pemerintah dicitrakan dengan baik oleh artikel berita diatas melalui penggunaan kata **mendengar** yang berarti pemerintah masih memperhatikan nasib warganya. Sedangkan representasi terhadap para nelayan masih berkutat dengan kondisi ketidakberdayaan seperti yang tertuang dalam kalimat di bawah ini

“Warga desa pesisir yang mayoritas nelayan juga menghadapi berbagai masalah yang **tidak mungkin** diatasi tanpa uluran tangan pemerintah.” (paragraf ke-4, baris ke-2, artikel Kompas.com, 26 Januari 2015)

Kutipan diatas menyudutkan posisi nelayan sebagai kaum yang lemah yang tidak dapat keluar dari masalah yang selama ini membelenggu mereka.

Relasi. Dalam teks berita diatas, relasi yang terbangun antara warga desa pesisir dengan pemerintah khususnya Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi, Marwan Jafar terjalin dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kutipan di bawah ini

“Di Desa Surya Bahari misalnya, dia **mendengar** berbagai keluhan para nelayan...” (paragraf ke-4, baris ke-1, artikel Kompas.com, 26 Januari 2014)

Identitas. Identitas yang ditunjukkan dalam teks tersebut berada pada posisi dekat dengan pemerintah. Teks berita keempat mendeskripsikan bahwa masyarakat nelayan memiliki keterbatasan secara ekonomi. Hal ini digambarkan dengan jelas dengan pernyataan diatas yang menyebutkan bahwa masalah yang dihadapi nelayan tidak mungkin dapat diatasi tanpa uluran tangan pemerintah. Sedangkan pemerintah digambarkan oleh Kompas.com dalam artikel ini memiliki kinerja yang baik dengan dikonstruksikan bahwa

pemerintah mendengar keluhan dari masyarakat nelayan. Keberpihakan Kompas.com dalam memposisikan dirinya memiliki ambiguitas yang membingungkan khalayak media.

e. **Nelayan Kita**

Artikel berjudul *Nelayan Kita* membahas mengenai gambaran umum kehidupan nelayan yang berdasarkan survei Sosial dan Ekonomi Nasional 2013 (Badan Pusat Statistik) diketahui bahwa 2,2 persen rumah tangga di Indonesia memiliki kepala rumah tangga dengan profesi nelayan. Sebagian besar nelayan di Indonesia memiliki kesehatan yang buruk dengan ekonomi yang pas-pasan. Hal ini mengakibatkan kesejahteraan mereka rendah sehingga harus terjebak dalam rantai kemiskinan.

Representasi. Dalam artikel berita ini, nelayan direpresentasikan sebagai kelompok sosial dengan keterbatasan ekonomi, hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini

4.7 Tabel Bukti Kesejahteraan Nelayan Rendah

No.	Bukti Kesejahteraan Nelayan Rendah dalam Teks	Representasi
1.	Ironisnya, walaupun seafood menjadi salah satu makanan favorit yang mahal, tingkat kesejahteraan nelayan umumnya lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang berprofesi bukan sebagai nelayan. (paragraf ke-10, baris ke-1, artikel Kompas.com, 19 November 2014)	Penggunaan kata tercetak tebal mengindikasikan nasib nelayan Indonesia masih berada jauh dari kata sejahtera.
2.	Hanya 54 persen nelayan yang memiliki jaminan kesehatan sehingga istilah “ sadikin ” (sakit sedikit miskin) menjadi problem para nelayan. (paragraf ke-13, baris ke4, artikel Kompas.com, 19 November 2014)	

3.	Menjadi nelayan bukanlah pilihan pekerjaan yang menarik karena mungkin nelayan identik dengan kemiskinan. (paragraf ke-16, baris ke-2, artikel Kompas.com, 19 November 2014)	
4.	Nelayan kita terjebak dalam perangkap kemiskinan yang pelik. (paragraf ke-18, baris ke-1, artikel Kompas.com, 19 November 2014)	

Teks berita diatas dapat diinterpretasikan bahwa pemerintah sebagai penanggungjawab utama kesejahteraan rakyatnya terepresentasikan telah gagal dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya khususnya kelompok sosial nelayan.

Relasi. Relasi yang terjalin dalam teks terjadi antara pemerintah dan nelayan. Jika sebelumnya pemerintah dikonstruksikan oleh Kompas.com melalui teks berita ini dengan citra yang positif, namun gagal digambarkan dalam teks berita ini.

Identitas. Identitas yang ditunjukkan dalam teks berita ini berada pada posisi dekat dengan nelayan. Kompas.com menunjukkan keberpihakannya pada masyarakat nelayan dengan menggambarkan keterbatasan ekonomi nelayan yang terjadi di Indonesia.

f. **Nelayan, “Drone”, dan Poros Maritim**

Artikel berjudul *Nelayan, “Drone”, dan Poros Maritim* membahas mengenai pandangan terhadap nelayan. Nelayan dilihat sebagai salah satu entitas masyarakat yang paling memahami kondisi laut Indonesia. Tetapi, kenyataannya nelayan masih berada di bawah garis kemiskinan. Harapan tentang nasib nelayan yang baik dan memiliki kesejahteraan yang tinggi dapat dicapai dengan menempatkan nelayan sebagai *drone* atau *guardian* alamiah

pertahanan maritim Indonesia sesuai dengan cita-cita untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia.

Representasi. Representasi nelayan dalam teks berita diatas juga masih menyudutkan posisi nelayan secara ekonomi, hal ini nampak dalam kutipan di bawah ini

“Kenyataannya, posisi nelayan masih dianggap sebagai **kelompok ekonomi subsisten** yang identik dengan kemiskinan.” (paragraf ke-1, baris ke-1, artikel Kompas.com, 6 November 2014)

Relasi. Dalam teks berita ini, relasi atau hubungan yang tercermin dalam teks terjalin antara pemerintah dan nelayan. Nelayan dalam undang-undang masih dianggap sebagai obyek hukum sehingga semakin mempersempit ruang geraknya karena nelayan masih banyak yang melakukan aktivitas di luar aktivitasnya. Hal ini terdapat dalam kutipan di bawah ini

“Masyarakat nelayan kita masih dianggap sebagai **obyek, bukan subyek** di dalam undang-undang sehingga peran mereka hanya terbatas pada aktivitas penangkapan ikan semata.” (paragraf ke-11, baris ke-2, artikel Kompas.com, 6 November 2014)

Identitas. Dalam teks berita ini, menunjukkan keberpihakannya berada di posisi dekat dengan nelayan. Teks berita ini mendeskripsikan bahwa Kompas.com memiliki keberpihakan kepada nelayan yang dituangkan dalam kutipan diatas. Hal ini mendukung pemberitaan sebelumnya yang juga memposisikan kaum nelayan sebagai kelompok sosial yang jauh dari kesejahteraan.

Sebagian besar teks pemberitaan mengenai kesejahteraan nelayan, dikonstruksikan oleh Kompas.com memiliki relasi yang kuat dengan pemerintahan. Representasi kelompok sosial nelayan yang memiliki keterbatasan secara ekonomi disimbolkan dengan penggunaan kata kelompok ekonomi subsisten, identik dengan kemiskinan, terpinggirkan, sakit sedikit

miskin dan tidak dapat keluar dari masalah tanpa uluran tangan pemerintah. Hal ini juga sekaligus memberikan citra negatif kepada pemerintah karena telah gagal dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya khususnya para nelayan. Sedangkan identitas dari wartawan dalam teks berita terkait kesejahteraan nelayan, wartawan lebih banyak memosisikan diri mengkritik pemerintahan dengan memunculkan representasi kesejahteraan nelayan yang rendah.

4.2.4. Analisis Wacana Kritis Teks Berita Tentang Kesadaran Masyarakat Sebagai Negara Maritim

Negara Indonesia dikenal sebagai bangsa bahari dan maritim, hal ini dapat ditemukan dalam syair lagu anak-anak “Nenek moyangku, seorang pelaut”. Lagu tersebut merupakan manifestasi dari kejayaan masa lalu maritim Indonesia. Mengingat, luas lautan daripada daratan yang dimiliki Indonesia menyimpan beragam kekayaan. Namun, seiring berjalannya waktu dan tidak memihaknya paradigma pembangunan hanya difokuskan kepada daratan saja. Hal ini berakibat pada kesadaran yang dimiliki masyarakat terhadap negara maritim semakin berkurang. Rendahnya kesadaran masyarakat sebagai negara maritim dapat dilihat dari rendahnya konsumsi ikan nasional dan acuhnya terhadap kelestarian laut seperti terumbu karang banyak yang mengalami kerusakan. Dengan demikian, diperlukan penyadaran kembali masyarakat sebagai negara dengan potensi laut yang besar. Penyadaran sebagai bangsa bahari dan negara maritim perlu dilakukan dengan membuat program-program wisata bahari untuk menarik minat masyarakat dan membangun kesadaran bahwa Indonesia memiliki keindahan dan potensi sumberdaya laut yang besar. Oleh sebab itu, perlunya dibangun kembali kesadaran masyarakat untuk mencintai lautan dengan mengembangkan potensi ekowisata berbasis maritim. Di bawah ini merupakan beberapa artikel berita mengenai kesadaran masyarakat sebagai bangsa bahari antara lain

4.8 Tabel Berita Tentang Kesadaran Masyarakat Sebagai Bangsa Maritim

No.	Artikel Berita di Kompas.com	Tanggal Publikasi di Kompas.com
1.	Di Banding Malaysia, Konsumsi Ikan Masyarakat Indonesia Tertinggal Jauh	30 November 2014
2.	Ini Program Unggulan Wisata Bahari Versi KKP	11 Desember 2014
3.	Kalimantan Selatan Habiskan Rp 4 Miliar untuk Hari Nusantara 2014	15 Desember 2014
4.	Kapal Nelayan Meriahkan Festival Budaya Maritim Teluk Lempasing	1 Desember 2014
5.	Wisata Maritim Di Lempasing, Pulangnya Bisa Bawa Ikan	1 Desember 2014
6.	Menjelajahi Sisi Lain Wakatobi	4 Desember 2014

a. Di Banding Malaysia, Konsumsi Ikan Masyarakat Indonesia Tertinggal Jauh

Artikel berjudul *Di Banding Malaysia, Konsumsi Ikan Masyarakat Indonesia Tertinggal Jauh* membahas mengenai tingkat konsumsi masyarakat terhadap ikan masih berada lebih rendah dibandingkan dua negara tetangga seperti Malaysia dan Jepang. Menurut Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Laut (P2H) Kementerian Kelautan dan Perikanan Saut Hutagalung, konsumsi ikan nasional saat ini hanya 38 kg per kapita per tahun. Sementara itu, Malaysia sudah mencapai 70 kg dan Jepang 140 kg per kapita per tahun. Untuk itu, pemerintah akan berusaha terus untuk mendorong masyarakat mengkonsumsi ikan dengan cara salah satunya yakni kampanye ayo makan ikan. Pemerintah pun memiliki target konsumsi ikan 50 kg per kapita per tahun pada tahun 2019 sudah terpenuhi.

Media online Kompas.com dalam artikel diatas menyebutkan bahwa konsumsi ikan masyarakat Indonesia jauh tertinggal. Satria dalam bukunya Ekologi Politik Nelayan (2009) menyebutkan ada tiga faktor penyebab. Secara sosilogis, masyarakat pesisir memiliki pola makan yang berkaitan dengan status sosialnya dimana semakin tinggi status sosial ditandai dengan konsumsi daging. Gengsi yang dimiliki akibat dari konstruksi pengetahuan dalam masyarakat yang salah berdampak pada rendahnya minat masyarakat pesisir dalam mengkonsumsi ikan. Secara geografis, di dalam masyarakat yang bertempat tinggal di darat, daya beli masyarakat lebih karena problem ekonomi dimana harga ikan memiliki harga yang cenderung tinggi. Yang terakhir disebabkan oleh globalisasi dalam hal gaya makan masyarakat. Banyaknya restoran cepat saji yang menjual produk olahan daging daripada ikan.

Representasi. Pemerintah dalam teks berita ini direpresentasikan akan melakukan tindakan pro aktif untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat betapa pentingnya mengkonsumsi ikan. Mengingat, masyarakat Indonesia kurang protein hewani. Sehingga tinggi rata-rata dan IQ orang Indonesia masih dibawah rata-rata orang ASEAN. Hal ini ditegaskan dalam tabel berikut ini

4.9 Tabel Representasi Masyarakat Indonesia Akibat Kurang Konsumsi Ikan

No.	Pernyataan Pemerintah	Reprsentasi
1.	“Tinggi rata-rata laki-laki orang Indonesia hanya 157 cm. itu dibawah rata-rata tinggi orang di ASEAN. Perempuan Indonesia rata-ratanya 147 cm. Di ASEAN 153 cm,” kata dia. (paragraf ke-5, baris ke-1, artikel Kompas.com, 30 November 2014)	Dari pernyataan pemerintah tersebut, masyarakat Indonesia direpresentasikan berada lebih rendah dari orang-orang di ASEAN baik secara

2.	Faktor kedua mengapa konsumsi ikan harus dinaikkan adalah faktor IQ orang Indonesia yang juga dibawah rata-rata orang di ASEAN. Menurut dia, rata-rata IQ orang Indonesia hanya sekitar 89, sementara itu rata-rata IQ orang ASEAN sekitar 91,3. (paragraf ke-7, baris ke-1, artikel Kompas.com, 30 November 2014)	fisik maupun kemampuan otak.
----	---	------------------------------

Sedangkan pemerintah direpresentasikan dengan citra yang positif dengan berperan aktif mengajak masyarakat untuk meningkatkan konsumsi ikan. Hal ini dapat dilihat dari kutipan di bawah ini

“Menurut Saud, pemerintah **akan terus mendorong** konsumsi ikan nasional...” (paragraf ke-9, baris ke-1, artikel Kompas.com, 30 November 2014)

Penggunaan kalimat **akan terus mendorong** bermakna pemerintah bertindak secara terus menerus atau berkelanjutan dalam mengkampanyekan makan ikan.

Relasi. Relasi yang ada dalam artikel pemberitaan diatas terjalin antara pemerintah melalui Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Laut (P2H) Kementerian Kelautan dan Perikanan Saut Hutagalung dengan masyarakat.

Identitas. Identitas yang tercermin dalam teks lebih dekat berada dalam posisi pemerintah. Teks berita diatas mendeskripsikan bahwa kinerja yang baik dari pemerintah dikonstruksikan oleh Kompas.com dengan mengkampanyekan makan ikan secara berkelanjutan. Hal ini guna membangun kesadaran masyarakat sebagai negara maritim yang memiliki sumberdaya laut yang besar. Kinerja positif pemerintah ini merepresentasikan

keberpihakan Kompas.com terhadap pemerintah yang memiliki kesamaan dengan isu-isu kemaritiman sebelumnya.

b. Ini Program Unggulan Wisata Bahari Versi KKP

Artikel berjudul *Ini Program Unggulan Wisata Bahari Versi KKP* membahas mengenai serangkaian program kerja KKP 2015 yang baru-baru ini disampaikan oleh Direktur Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil KKP, Rido Batubara. Langkah strategis tersebut diantaranya mengembangkan wisata dan perikanan di Simeulue, sebelah barat pantai Aceh, mengembangkan wisata pulau Mallo, di kabupaten Talaud dan pengembangan wisata bahari di pulau Maratua, kabupaten Berau. Dari tiga hal tersebut, Rido juga mengharapkan adanya integritas dari banyak pihak. Sasaran kita semua adalah pengembangan ekonomi maritim dan kelautan.

Representasi. Representasi pemerintah positif tergambarkan dengan himbauan kepada semua pihak untuk bekerja sama mengembangkan potensi maritim yang ada dalam kutipan di bawah ini

“Wisata bahari menjadi salah satu potensi yang akan menjadi tanggungjawab bersama. **Mari tingkatkan bersama-sama.**” (paragraf ke-8, baris ke-2, artikel Kompas.com, 11 Desember 2014)

Relasi. Dalam artikel diatas, terjalin relasi antara masyarakat dan pemerintah dalam hal ini adalah Direktur Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil KKP, Rido Batubara yang meminta keterlibatan semua elemen masyarakat atau semua pihak untuk mendukung pemerintah dalam mengembangkan potensi wisata bahari serta memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa negara Indonesia adalah negara maritim yang memiliki potensi untuk dioptimalkan.

Identitas. Identitas yang ditunjukkan dalam teks berita diatas berada di dekat pemerintah karena ia turut serta memberikan citra positif terhadap

kinerja pemerintah. Teks berita ini dapat dideskripsikan bahwa media online Kompas.com secara aktif mengkonstruksi citra positif pemerintah terhadap khalayak media Kompas.com melalui teks berita yang diproduksi dengan serangkaian wacana yang dipublikasikan. Konstruksi positif kinerja pemerintah terkait masalah kemaritiman khususnya peningkatan potensi wisata bahari dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa potensi bahari atau maritim yang dimiliki oleh negara Indonesia sangat besar dan harus dioptimalkan.

c. Kalimantan Selatan Habiskan Rp 4 Miliar untuk Hari Nusantara 2014

Artikel berjudul *Kalimantan Selatan Habiskan Rp 4 Miliar untuk Hari Nusantara 2014* membahas mengenai anggaran dana yang besar dikeluarkan oleh pemerintah provinsi Kalimantan Selatan untuk menyiapkan Hari Nusantara 2014. Pulau Laut di wilayah kabupaten kota Barudipilih menjadi tuan rumah pelaksanaan Hari Nusantara 2014. Dana yang dikeluarkan untuk acara akbar tersebut menurut Muhammad Arsadi selaku Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan menghabiskan dana sebesar Rp 4 miliar. Tetapi dana tersebut memiliki timbal balik yang diyakininya positif. Dengan acara tersebut, terdapat beberapa perbaikan infrastruktur jalan serta daerah. Selain itu, perekonomian masyarakat bergerak seperti rumah warga dapat disewa oleh staf pemerintah maupun tamu atau wisatawan karena hotel-hotel disekitar tempat pelaksanaan acara telah penuh. Hari Nusantara sendiri adalah peringatan Deklarasi Djoeanda oleh Perdana Menteri Ir Djoeanda terkait wilayah territorial laut RI pada 13 Desember 1957, yang menandai 12 mil batas lebar laut wilayah Indonesia dari garis pantai dari sebelumnya hanya 3 mil. Acara ini juga sesuai dengan program Poros Maritim Presiden Jokowi.

Representasi. Dalam teks berita diatas, representasi positif dari kinerja pemerintah nampak dengan jelas antara pemerintah pusat dan daerah.

Pemerintah pusat memberikan perbaikan infrastruktur jalan dan bandara, yang ada dalam kutipan di bawah ini

“Istilahnya kalau keluar 10, dapat baliknya 200. Ya, minimal, kalau keluar banyak kan ada **perbaikan** jalan, dermaga, sampai bandara kan,” seloroh Arsadi. (paragraf ke-7, baris ke-1, artikel Kompas.com, 15 desember 2014)

Kinerja pemerintah yang baik juga direpresentasikan dengan keberhasilannya menggelar acara akbar Hari Nusantara yang menguntungkan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari kutipan dibawah ini

“Sampai para staf juga akhirnya **memesan rumah warga** untuk ditinggali,” ujar Arsadi. (paragraf ke-11, baris ke-1, artikel Kompas.com, 15 desember 2014)

Keberhasilan tersebut, dapat mempertegas bahwa pemerintah dikonstruksikan oleh Kompas bekerja dengan baik.

Relasi. Hubungan yang tercipta dalam teks berita diatas terjalin antara pemerintah pusat dengan daerah serta masyarakat. Acara yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya menguntungkan bagi pendapatn daerah namun juga pendapatan masyarakat sekitar.

Identitas. Identitas dalam teks berita tersebut lebih dekat kepada pemerintah. Teks berita ketiga ini mendeskripsikan bahwa pemerintah memiliki keberhasilan dalam melaksanakan program kemaritiman khususnya pariwisata di Kalimantan Selatan dengan dikenalkannya Hari Nusantara kepada masyarakat. Pelaksanaan Hari Nusantara diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat Indonesia bahwa ada banyak potensi wisata maritim. Kompas.com secara jelas juga menunjukkan keberpihakannya kepada pemerintah dalam mewacanakan keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan Hari Nusantara di Kalimantan Selatan.

d. Wisata Maritim Di Lempasing, Pulangnya Bisa Bawa Ikan

Artikel yang berjudul *Wisata Maritim Di Lempasing, Pulangnya Bisa Bawa Ikan* membahas mengenai Festival Budaya Maritim Teluk Lampung yang diselenggarakan di pusat pelelangan ikan (PPI) Lempasing, kabupaten Pesawaran, Lampung. Acara yang didukung oleh lantal provinsi Lampung ini merupakan salah satu rangkaian acara lomba menghias perahu nelayan. Acara ini diharapkan mampu mempromosikan wisata bahari di Lampung.

Representasi. Dalam artikel berita ini masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan pendapatnya mengenai acara yang baru pertama kali diselenggarakan di Lampung ini seperti dalam tabel di bawah ini

4.10 Tabel Representasi Masyarakat Terhadap Festival Budaya Maritim

No.	Pernyataan Masyarakat	Representasi
1.	Yati (54) warga dari Wayhalim, Bandar Lampung datang bersama keluarganya untuk menikmati rekreasi maritim. “Saya mengajak anak, keponakan dan cucu, menyenangkan sekali . Saya juga bisa memperkenalkan tentang kelautan pada cucu,”katanya. (paragraf ke-2, baris ke-1, artikel Kompas.com, 1 Desember 2014)	Representasi positif terhadap terselenggaranya acara dapat dilihat dari antusiasme warga yang menyaksikannya.
2.	Demikian juga dengan Notor (40), warga Garuntang, Bandar Lampung. Ia mengajak istri dan anaknya untuk rekreasi gratis mengarungi laut. “Saya dapat informasi ini dari Koran, mumpung gratis dan tepat hari libur juga kenapa tidak mengajak keluarga bersenang-senang ,” ujarnya. (paragraf ke-3, baris ke-1, artikel Kompas.com, 1 Desember 2014)	

Relasi. Dalam artikel berita ini relasi yang tercermin antara masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat merasa senang dengan adanya acara yang didukung oleh lanal provinsi Lampung.

Identitas. Identitas dalam teks ini berada dekat dengan masyarakat dan menjadi bagian dari masyarakat Lampung. Teks berita keempat ini mendeskripsikan bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia mencintai laut dengan ditunjukkan oleh antusiasme pengunjung Festival Budaya Maritim. Namun, wilayah laut yang tidak dapat dijangkau oleh semua orang dengan bebas karena infrastruktur jalan yang tak cukup memadai membuat sebagian orang meninggalkan berwisata ke laut. sedangkan identitas wartawan dalam teks berita ini memposisikan dirinya sebagai warga masyarakat yang menyukai keindahan laut dengan berwisata bahari.

e. **Kapal Nelayan Meriahkan Festival Budaya Maritim Teluk Lempasing**

Artikel berjudul *Kapal Nelayan Meriahkan Festival Budaya Maritim Teluk Lempasing* membahas mengenai festival budaya maritim yang berasal dari kebiasaan ruwatan sebagai bentuk rasa syukur nelayan. Acara yang baru pertama kali diselenggarakan di Lampung ini mendapat sambutan hangat dari pengunjung. Mereka dapat secara gratis mengarungi lautan dengan menaiki kapal nelayan yang telah dihias dan berjumlah 35 buah. Menurut Ketua Himpunan Seluruh Nelayan Indonesia (HSNI) Provinsi Lampung, Marzuki Yazid mengharapkan acara ini dapat menjadi kegiatan rutin dan dapat berkembang menjadi salah satu tujuan wisata tahunan.

Representasi. Harapan nelayan terepresentasi melalui pernyataan dari Ketua Himpunan Seluruh Nelayan Indonesia (HSNI) Provinsi Lampung, Marzuki Yazid dengan kutipan dibawah ini

“Biasanya para nelayan melakukan ruwatan dengan mempersembahkan sesaji untuk laut, **diharapkan** festival budaya maritim ini menjadi kegiatan rutin dan dapat berkembang menjadi salah satu tujuan wisata

tahunan,” katanya. (paragraf ke-3, baris ke-1, artikel Kompas.com, 1 Desember 2014)

Relasi. Dalam artikel berita ini relasi yang nampak antara para nelayan dan pengunjung serta pemerintah yakni TNI AL Lampung yang mendukung terselenggaranya acara ini.

Identitas. Identitas dalam teks berita diatas juga nampak berada lebih dekat dengan nelayan. Hal ini dapat dilihat dari narasumber yang digunakan untuk memproduksi teks berita ini. Teks berita kelima ini mendeskripsikan bahwa masyarakat nelayan khususnya di provinsi Lampung memiliki kesadaran atas budaya bahari yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dengan masih diselenggarakannya ruwatan laut oleh nelayan setempat.

f. Menjelajahi Sisi Lain Wakatobi

Artikel berita berjudul *Menjelajahi Sisi Lain Wakatobi* membahas mengenai keindahan wisata di kepulauan Wakatobi. Menurut Nadar, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Wakatobi mengatakan bahwa menyelam dan melihat terumbu karang di kepulauan Wakatobi, Sulawesi Tenggara sama dengan melihat $\frac{3}{4}$ koral di dunia. Untuk itu, Wakatobi selalu identik dengan terumbu karangnya. Keindahan Wakatobi bukan hanya terletak pada keindahan bawah lautnya, lebih dari itu kebudayaan dan kearifan lokal masyarakatnya juga mempesona. Keramahan dan keunikan cara hidup masyarakatnya jarang ditemui di perkotaan. Kelestarian kepulauan Wakatobi terumbu karangnya juga merupakan bagian dari jerih payah warganya.

Representasi. Representasi dari masyarakat Wakatobi yang memiliki kesadaran untuk menjaga wilayah maritim di daerah tempat tinggalnya mendapat apresiasi dari pemerintah daerahnya. Hal ini dapat dilihat dari kutipan di bawah ini

“Masyarakat Wakatobi begitu dekat dan menjaga pesisir pantai serta perairan lautnya. Mereka selalu

sadar untuk menjaga kelestarian lingkungan bawah laut. Kelestarian terumbu karang Wakatobi yang **terus terjaga** merupakan hasil jerih payah warganya.” (paragraf ke-8, baris ke-1, artikel Kompas.com, 4 Desember 2014)

Kesadaran yang tinggi masyarakat Wakatobi dalam menjaga lingkungan baharinya terepresentasi lewat kutipan di atas. Teks berita ini juga dapat digunakan untuk pembelajaran kepada khalayak media Kompas.com bahwa kelestarian lingkungan bukan hanya tanggungjawab pemerintah saja. Tetapi, masyarakat memiliki peran yang besar untuk menjaga kelestarian alam tempat tinggalnya.

Relasi. Dalam teks tersebut, relasi yang terbangun antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya terjalin dengan baik. Hubungan yang baik antara pemerintah daerah Wakatobi dengan masyarakatnya menjadi titik balik bahwa keberhasilan pemerintah juga tergantung bagaimana rakyatnya bekerja.

Identitas. Identitas dalam teks berita ini mengarah kepada masyarakat Wakatobi. Teks berita keenam ini mendeskripsikan bahwa masyarakat pesisir Indonesia sebenarnya memiliki kesadaran mencintai laut yang tinggi. Tidak hanya masyarakat nelayan Lampung, namun masyarakat pesisir Wakatobi pun memiliki kesadaran untuk menjaga laut agar tetap lestari.

Secara garis besar, teks berita yang diproduksi oleh media online Kompas.com terkait kesadaran masyarakat sebagai negara maritim mengarah kepada pentingnya mengembangkan potensi wisata bahari yang ada serta meningkatkan konsumsi ikan. Kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap kekayaan maritim nusantara harus dilestarikan seperti pada masyarakat Wakatobi yang selalu menjaga lingkungan laut tempat tinggalnya. Selain itu, pemerintah dalam artikel berita mengenai kesadaran masyarakat sebagai negara maritim ini dikonstruksikan dengan citra yang positif. Hal ini dapat diamati dengan keberhasilan beberapa program pemerintah terkait pengembangan potensi wisata bahari.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hal yang dapat disimpulkan dalam penelitian menggunakan analisis wacana kritis (AWK/CDA) ini, media mengambil peranan besar dalam mengkonstruksi realitas melalui wacana tulis yang dipublikasikan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem pengetahuan masyarakat. Media online Kompas.com sebagai salah satu media online yang kredibel banyak memuat berita-berita maritim. Tetapi, penulis hanya memilih dan memilah berita-berita yang masih berkaitan dengan disiplin ilmu sosiologi maritim sehingga penulis membuat empat kategori wacana. Kategori wacana tersebut antara lain pertama pembangunan infrastruktur maritim, kedua keamanan laut, ketiga kesejahteraan nelayan dan keempat kesadaran masyarakat sebagai negara maritim.

Kategori pertama, media online Kompas.com dalam mewacanakan pembangunan infrastruktur maritim. Dalam mengkonstruksi realitas maritim terkait pembangunan infrastruktur, Kompas.com lebih menitikberatkan kepada peran aktif pemerintah dalam menarik investor asing atau negara asing seperti Jepang, Tiongkok, Rusia, Cina, Myanmar dan Amerika Serikat untuk bekerjasama membangun pelabuhan dan tol laut. Peran aktif pemerintah dalam menarik investor asing ditunjukkan dengan keikutsertaan presiden Jokowi sekaligus memberikan pidato dalam forum internasional seperti KTT, APEC, dan lainnya. Citra positif pemerintah tercermin jelas dalam teks berita yang ada di media online Kompas.com.

Kedua, mengenai keamanan laut, Kompas.com mewacanakan mengenai penambahan beberapa alutsista guna mengawasi perairan Indonesia seperti kapal selam dan menyiapkan moratorium baru untuk kapal-kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia. Selain itu, pemerintah membentuk lembaga baru yakni Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai lembaga yang dikhususkan untuk memberantas *illegal fishing*. Ketiga mengenai kesejahteraan nelayan, nelayan Indonesia digambarkan sebagai kelompok sosial yang tak berdaya hal itu ditunjukkan dengan penggunaan beberapa kata-kata seperti *terpinggirkan, kelompok ekonomi subsisten, identik dengan kemiskinan, masalah yang tidak mungkin dapat diatasi*. Penggunaan kata-kata tersebut, secara tidak sadar mengkonstruksikan bahwa nelayan bukanlah kelompok masyarakat yang sejahtera dan kebanyakan berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini sekaligus memposisikan pemerintah bahwa telah gagal dalam menyejahterakan rakyatnya. Keempat, Kompas.com mengkonstruksi masyarakat media atau khalayak media mengenai kesadaran masyarakat sebagai negara maritim dengan menunjukkan bahwa tingkat konsumsi ikan masyarakat Indonesia masih tergolong rendah dan wisata bahari yang ada masih belum dioptimalkan secara baik. Relasi yang tergambar dengan jelas dalam setiap teks berita, secara umum Kompas.com memperlihatkan keberpihakan kepada pemerintah. Namun, dalam kategori kesejahteraan nelayan, kelompok sosial nelayan dikonstruksikan jauh dari kata sejahtera sehingga hal ini berakibat bahwa pemerintah digambarkan telah gagal dalam menyejahterakan rakyatnya. Identitas yang berhubungan dengan bagaimana wartawan mengidentifikasikan dirinya berada lebih dekat dengan pemerintahan (negara). Walaupun, tidak sedikit juga yang berada pada posisi melihat masyarakat sebagai bagian dari dirinya dan mempengaruhi sedikit banyak produksi teks berita.

5.2 Rekonstruksi Wacana

Wacana yang ditampilkan melalui teks berita di media online Kompas.com berpengaruh besar terhadap konstruksi realitas pada khalayak media pembaca Kompas.com. Konstruksi mengenai pemberitaan maritim yang ada di Kompas.com dapat mempengaruhi khalayak atau masyarakat media pembaca Kompas.com sekaligus mengubah pola pikir mengenai isu-isu kemaritiman. Dalam teks berita maritim di Kompas.com, secara garis besar dapat digambarkan bahwa Kompas.com mengkonstruksikan citra positif pemerintah kepada pembaca. Sekaligus memposisikan kelompok sosial nelayan sebagai kelompok sosial yang tidak sejahtera.

Penelitian ini mengacu kepada penelitian berparadigma kritis sehingga hasil penelitian ini diharapkan mampu membawa pencerahan, pembebasan dan usaha emansipatoris kepada pembaca dan masyarakat atau khalayak media. Dengan demikian, penelitian ini membuka ruang-ruang diskusi baru mengenai media khususnya Kompas.com mengenai isu kemaritiman bahwa media kredibel pun dalam mewacanakan suatu hal juga tak mutlak benar. Karena seperti diingat di awal bahwa, media bukanlah medium yang netral tetapi didalamnya ada serangkaian pertarungan wacana dan wacana yang ditulis (teks berita) tak luput dari keberpihakan sesuai dengan ideologi yang dianut media tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah dalam mewujudkan cita-cita paradigma pembangunan baru yang terfokus pada bidang maritim tidak selalu menemui keberhasilan dan kesuksesan dalam menjalin kerjasama. Selain itu, kelompok sosial nelayan sebenarnya memiliki beberapa tingkat sosial tertentu seperti pengamba', pemilik perahu dan pandega (anak buah kapal atau nelayan buruh). Tidak semua nelayan sebenarnya berada di bawah kemiskinan, hanya nelayan pandega saja. Sama halnya dengan relasi ekonomi ala Karl Marx bahwa yang memiliki kekuatan ekonomi (modal) besar yang akan melakukan penghisapan pada kelompok yang lemah, terjadi juga dalam

masyarakat nelayan. Nelayan yang digambarkan dalam teks berita di Kompas.com lebih cocok ditempatkan hanya pada nelayan pandega atau buruh saja. Kegagalan pemerintah dalam menyejahterakan rakyatnya dapat digambarkan dengan konstruksi yang dibuat oleh Kompas.com tentang kelompok sosial nelayan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Aliah, Yoce, 2009. *Analisis Wacana Kritis*. Bandung: Yrama Widya
- Antoni, Condra, 2012. *Wacana Ruang*. Yogyakarta: ANDI
- As Haris, Sumadiria, 2005. *Jurnalistik Indonesia, Menulis Berita dan Feature, Panduan Praktis Jurnalis Profesional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Brown, Gollian, 1996. *Analisis Wacana*. Jakarta: Gramedia
- Burhan, Bungin, 2006. *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana
- Eriyanto, 2001. *Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS
- Jorgensen, Marianne dan Louise J. Phillips, 2007. *Analisis Wacana: Teori dan Metode*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kurniawan, Budi, 2000. *Kamus Ilmiah Populer Indonesia*. Surabaya: JAWARA
- Kusnadi, 2007. *Jaminan Sosial Nelayan*. Yogyakarta: LKiS
- Mulyana, 2005. *Kajian Wacana: Teori, Metode dan Aplikasi Prinsip-prinsip Analisis Wacana*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Nugroho, Bimo, Eriyanto, Franz Sudiarsis, 1999. *Politik Media Mengemas Berita*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi
- Santoso, Anang, 2011. *Bahasa Perempuan: Sebuah Potret Ideologi Perjuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Satria, Arif, 2009. *Ekologi Politik Nelayan*. Yogyakarta: PT. LKiS

Sobur, Alex. 2004. *Analisis Teks Media*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Soekanto, Soerjono, 2007. *Sosiologi : Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sudaryat, Yayat, 2009. *Makna Dalam Wacana*. Bandung: Yrama Widya

Sumarlam, 2003. *Teori dan Praktik Analisis Wacana*. Yogyakarta: Pustaka Cakra

Suroto, Wahyono, 2009. *Indonesia Negara Maritim*. Yogyakarta: PT Mizan Publika

Vivian, John, 2008. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Kencana

Zen, Fathurin, 2004. *NU Politik, Analisis Wacana Media*. Yogyakarta: LKiS

Skripsi :

Jannah, Raudlatul, 2005. *Prostitusi, Pengakuan dan Kriminalitas (Konstruksi Identitas Waria Oleh Media)*. Skripsi. Universitas Jember: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Sosiologi

Aprilia, Elen Nur, 2013. *Konstruksi Identitas Korban dan Pelaku Pemerkosaan di Media Online Detik.com*. Skripsi. Universitas Jember: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Sosiologi

Jurnal :

Hamad, Ibnu, 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa (Studi Pesan Politik dalam Media Cetak pada Masa Pemilu 1999)*. Yogyakarta: MAKARA, Jurnal Sosial Humaniora Vol. 8 No. 1

Website :

http://id.wikipedia.org/wiki/Kompas_%28surat_kabar%29. Diakses tanggal 10/12/2014 pukul 08.55 WIB

[http://id.wikipedia.org/wiki/republika_\(surat_kabar\)](http://id.wikipedia.org/wiki/republika_(surat_kabar)). Diakses tanggal 9/12/2014 pukul 19.50 WIB

<http://inside.kompas.com/about-us>. Diakses tanggal 10/12/2014 pukul 08.50 WIB

<http://itkp.ac.id/itkpfounder?founder=edi>. Diakses pada 30/09/2015 pukul 15.10 WIB

<http://kbbi.web.id/maritim>. Diakses tanggal 16/11/2014 pukul 12.23 WIB

[\[seskoal.tnial.mil.id/Portals/0/Konsep%20Negara%20Maritim%20Dan%20Ketahanan%20Nasional\]\(http://seskoal.tnial.mil.id/Portals/0/Konsep%20Negara%20Maritim%20Dan%20Ketahanan%20Nasional\). Diakses tanggal 5/5/2015 pukul 12.30 WIB](http://pusjianmar-</p></div><div data-bbox=)

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/11/13/neyu7b-di-eas-jokowi-beberkan-lima-poros-maritim-dunia>. Diakses tanggal 9/12/2014 pukul 20.35 WIB

<http://www.tribunnews.com/nasional/2014/09/12/rokhmin-dahuri-80-persen-potensi-maritim-indonesia-belum-terjamah>. Diakses tanggal 10/12/2014 pukul 09.00 WIB

https://indronet.files.wordpress.com/2007/09/isi_buku3. Diakses tanggal 5/5/2015 pukul 12.30 WIB

<https://www.google.com/digilib.uin-suka.ac.id>. Diakses tanggal 9/12/2014 pukul 19:30 WIB

<https://www.google.com/download.portalgaruda.org>. Diakses tanggal 10/12/2014 pukul 08:30 WIB

Tabel Berita Maritim Di Media Online Kompas.com

Berdasarkan Judul, Tanggal Terbit, Kategori dan Tema yang Diangkat

No.	Kategori Berita Yang Diangkat	Judul (Headline) Berita	Tanggal Terbit
1.	Pembangunan Infrastruktur Maritim	Ada 12 Kesepakatan yang Dibawa Jokowi dari Beijing	17 November 2014
2.		Blusukan Jokowi di Tianjin, dari Kereta Cepat hingga Pembangkit Listrik	11 November 2014
3.		Andrinof, Pemikir Out of The Box	26 Oktober 2014
4.		Jokowi Diminta Siapkan "Guidance" untuk Wujudkan Tol Laut	21 Oktober 2014
5.		Jokowi: Subsidi BBM Rp 714 Triliun, Sangat Boros!	7 November 2014
6.		Tol Laut Naikkan Efektivitas Pengiriman Mobil ke Daerah	27 Oktober 2014
7.		Presiden Jokowi Bertolak ke Myanmar	11 November 2014
8.		Soal Infrastruktur, Pemerintah Harus Jadi "Contracting Agency"	1 November 2014
9.		Menko Indroyono Jajakan Infrastruktur pada Investor AS	12 November 2014
10.		Investor Jepang Tertarik Bangun Pabrik Mesin Kapal	1 Desember 2014
11.		Rusia Tertarik dengan Gagasan Poros Maritim Jokowi	12 November 2014
12.		Singapura Kepincut Ikut Garap Tol Laut Indonesia	24 November 2014
13.		Tiongkok dan Indonesia Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Maritim	10 November 2014
14.		Bangun Sektor Maritim	21 Oktober 2014

		Butuh Dana Rp 2.000 Triliun		
15.	Keamanan Laut	Berantas Illegal Fishing, Bakamla Dapat Hibah 10 Kapal TNI AL	12 Januari 2015	
16.		Ini Strategi Susi Pudjiastuti untuk Babat “Illegal Fishing”	30 Oktober 2014	
17.		Jokowi Sebut “Illegal Fishing” Rugikan Negara Rp 300 Triliun, Ini Respon Susi Pudjiastuti	28 Oktober 2014	
18.		Ratusan Kapal Perang Siap Dikerahkan untuk Tindak “Illegal Fishing”	4 Desember 2014	
19.		Demi Visi Maritim Jokowi, Kemenhan Akan Tambah Produksi Kapal Selam	5 November 2014	
20.		Dubes: Amerika Siap Bantu Pertahanan Maritim Indonesia	19 November 2014	
21.		Jokowi: Anggaran Pertahanan Tergantung Pertumbuhan Ekonomi	7 November 2014	
22.		Jokowi Minta Penuntasan Hukum atas 5 Kapal Asing yang ditangkap TNI	5 November 2014	
23.		Menteri Susi: Nelayan Asing Mulai “Ketar-ketir” Masuk ke Indonesia	27 November 2014	
24.		Moratorium Berdampak, Aktivitas Kapal Bekas Impor Berkurang	2 Desember 2014	
25.		Rencana Drone Jokowi Didukung Konsorsium Eropa	4 November 2014	
26.		Kesejahteraan Nelayan	100 Kades Berkumpul di Yogya Bahas Soal Kesejahteraan Nelayan	14 November 2014
27.			Dapat Dukungan dari Perbankan, Menteri Susi Malah Agak Khawatir	27 November 2014

28.		Ini yang Didapatkan Nelayan dari Pengalihan Subsidi BBM	18 November 2014
29.		Koordinasi Kementerian: Dianggap Penting untuk Kembangkan Desa Pesisir	26 Januari 2014
30.		Nelayan Kita	19 November 2014
31.		Nelayan, “Drone”, dan Poros Maritim	6 November 2014
32.	Kesadaran Masyarakat Sebagai Negara Maritim	Dibanding Malaysia, Konsumsi Ikan Masyarakat Indonesia Tertinggal Jauh	30 November 2014
33.		Ini Program Unggulan Wisata Bahari Versi KKP	11 Desember 2014
34.		Kalimantan Selatan Habiskan Rp 4 Miliar untuk Hari Nusantara 2014	15 Desember 2014
35.		Kapal Nelayan Meriahkan Festival Budaya Maritim Teluk Lampung	1 Desember 2014
36.		Menjelajahi Sisi Lain Wakatobi	4 Desember 2014
37.		Wisata Maritim di Lempasing, Pulangnya Bisa Bawa Ikan	1 Desember 2014

Tabel Framing Kompas.com Mengenai Berita Maritim

Unsur Pembentuk Teks	Evidensi		
	Alat Pembuktian	Bukti dalam Teks	Makna
Perlakuan atas Peristiwa	Tema yang Diangkat Pembangunan Infrastruktur Maritim	<ul style="list-style-type: none"> ○ “Presiden Joko Widodo dan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, sepakat untuk meningkatkan kerjasama, khususnya di bidang maritim dan prasarana” (paragraf ke 1, baris ke1-2, artikel Kompas.com, 10 November 2014) ○ Mereka ingin lebih kuatkan lagi investasi yang sudah ada, berinvestasi baru...” (paragraf ke-5, baris ke-1, artikel Kompas.com, 1 Desember 2014) ○ Singapura “kepincut” untuk ikut menggarap proyek tol laut. Hal ini disampaikan oleh KADIN...” (paragraf ke-1, baris ke-1, artikel Kompas.com, 24 November 2014) ○ “Menurut dia, agar program ini sukses, Indonesia perlu membangun infrastruktur pelabuhan... “Dan Rusia siap untuk membantu Indonesia 	Dukungan dari berbagai pihak (pemerintah dan investor) untuk membangun beberapa infrastruktur maritim seperti tol laut, pelabuhan, industri kapal di Indonesia.

		<p>dalam bidang ini,” kata dia.” (paragraf ke-3, baris ke 4, artikel Kompas.com, 12 November 2014)</p> <ul style="list-style-type: none">○ “Menurut dia, agar program ini sukses, Indonesia perlu membangun infrastruktur pelabuhan... “Dan Rusia siap untuk membantu Indonesia dalam bidang ini,” kata dia.” (paragraf ke-3, baris ke 4, artikel Kompas.com, 12 November 2014)○ “Selain itu, Jokowi juga mengaku berhasil membawa rencana investasi di sektor pelabuhan...” (paragraf ke-9, baris ke-1, artikel Kompas.com, 17 November 2014)○ “Cita-cita presiden Joko Widodo menghubungkan pulau-pulau di Indonesia dengan konsep tol lautnya dinilai tidak akan mudah terwujud.” (paragraf ke-1, baris ke-1, artikel Kompas.com, 21 oktober 2014)○ “Dolfie OFP, mantan anggota Kelompok Kerja Tim Transisi mengatakan bahwa... pemerintahan Jokowi-Jusuf	
--	--	--	--

		<p>Kalla dihadapkan pada masalah kebutuhan anggaran yang cukup besar.” (paragraf ke-5, baris ke-1, artikel Kompas.com, 21 Oktober 2014)</p> <ul style="list-style-type: none">○ “Merealisasikan konsep pembangunan infrastruktur tol laut yang terintegrasi dengan infrastruktur darat, bukan perkara mudah.” (paragraf ke-1, baris ke-1, artikel Kompas.com, 1 November 2014)○ “Andrinof juga sepaham dengan gagasan tol laut Jokowi untuk mengurangi biaya logistik dan sekaligus mengurangi ketimpangan ekonomi.” (paragraf ke-22, baris ke-1, artikel Kompas.com, 26 Oktober 2014)○ “Kami akan senang kalau itu jadi (tol laut), pengangkutan mobil akan lebih cepat.” (paragraf ke-2, baris ke-1, artikel Kompas.com, 27 Oktober 2014)○ “Jokowi menyatakan pentingnya pengalihan subsidi	
--	--	---	--

		<p>BBM ke industri maritim...” (paragraf ke-5, baris ke-1, artikel Kompas.com, 7 November 2014)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ “Menurut Presiden, pemerintah pada 2015 akan siap membangun empat pelabuhan sehingga kunjungan ke Tianjin tersebut sebagai suatu peninjauan dan pembelajaran.” (paragraf ke-17, baris ke-1, artikel Kompas.com, 11 November 2014) ○ “Untuk menarik investasi khususnya dari AS, Indroyono menuturkan, pemerintah berkomitmen untuk menyederhanakan dan mempercepat perizinan usaha.” (paragraf ke-7, baris ke-1, artikel Kompas.com, 12 November 2014) 	
	<p>Keamanan Laut</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ “Menanggapi hal tersebut, Eurofighter GmbH... pihaknya siap mendukung rencana tersebut baik dari sisi hardware maupun software.” (paragraf ke-2, baris ke-2, artikel Kompas.com, 4 November 2014) 	<p>Pemerintah dikonstruksikan secara positif oleh Kompas.com dengan menunjukkan serangkaian keberhasilan yang</p>

		<ul style="list-style-type: none"> ○ “Ia menjamin Amerika siap memberikan peningkatan keamanan di wilayah perairan Indonesia...” (paragraf ke-3, baris ke-1, artikel Kompas.com, 19 November 2014) ○ “Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti merespons cepat pernyataan presiden Joko Widodo...” (paragraf ke-1, baris ke-1, artikel Kompas.com, 28 Oktober 2014) ○ “Semua kapal perang kita siap. Memang selama ini ada hambatan di anggaran untuk pemenuhan kebutuhan bahan bakar, tetapi sudah teratasi...” (paragraf ke-2, baris ke-1, artikel Kompas.com, 4 Desember 2014) ○ “Oleh karena itu TNI-AL akan segera menghibahkan 10 kapal patrolinya kepada Bakamla sebagai aset awal dalam rangka melaksanakan kegiatan keamanan dan keselamatan laut,” ucap Indroyono (paragraf ke-4, baris ke-2, artikel Kompas.com, 12 Januari 2014) ○ “Menteri Kelautan dan 	<p>telah dibuat oleh pemerintah seperti pembentukan lembaga maritim baru, pembelian alutsista untuk menjaga pertahanan dan keamanan laut.</p>
--	--	--	---

		<p>Perikanan Susi Pudjiastuti, memastikan akan memberantas para pencuri kekayaan laut Indonesia.” (paragraf ke-1, baris ke-1, artikel Kompas.com, 30 Oktober 2014</p> <ul style="list-style-type: none">○ “Saat ditanya terkait masalah keamanan di wilayah laut dan udara. Ia mengatakan, pemerintah akan segera menambah armada...” (paragraf ke-6, baris ke-1, artikel Kompas.com, 7 November 2014)○ “Moratorium, saya baru lakukan sebulan ini, pengaruhnya luar biasa...” (paragraf ke-3, baris ke-1, artikel Kompas.com, 27 november 2014)○ “Mereka menyatakan, dengan kebijakan itu, para pemilik kapal akan merasa terproteksi.” (paragraf ke-6, baris ke-2, artikel Kompas.com, 2 Desember 2014)○ “Ia mengatakan, Presiden Jokowi mengapresiasi keberhasilan TNI AL...” (paragraf ke3, baris ke-1,	
--	--	---	--

		<p>artikel Kompas.com, 5 November 2014)</p> <ul style="list-style-type: none">○ “Kementerian Pertahanan bertekad menambah produksi kapal selam...” (paragraf ke-1, baris ke-1, artikel Kompas.com, 5 November 2014)○ “Pemerintah mengklaim sudah membagikan sekitar 6.000 kartu kepada para nelayan di Jawa tengah.” (paragraf ke-4, baris ke-1, artikel Kompas.com, 18 November 2014)○ “Warga desa pesisir yang mayoritas nelayan juga menghadapi berbagai masalah yang tidak mungkin diatasi tanpa uluran tangan pemerintah.” (paragraf ke-4, baris ke-2, artikel Kompas.com, 26 Januari 2015)○ Menjadi nelayan bukanlah pilihan pekerjaan yang menarik karena mungkin nelayan identik dengan kemiskinan. (paragraf ke-16, baris ke-2, artikel Kompas.com, 19 November 2014)○ “Kenyataannya, posisi nelayan	
--	--	---	--

		<p>masih dianggap sebagai kelompok ekonomi subsisten yang identik dengan kemiskinan.” (paragraf ke-1, baris ke-1, artikel Kompas.com, 6 November 2014)</p>	
	<p>Kesejahteraan Nelayan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ “Acara yang diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan ini merupakan langkah terobosan...” (paragraf ke-2, baris ke-1, artikel Kompas.com, 14 November 2014) ○ “Menurut Susi, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pelaku usaha di sektor maritim sebelum mampu memberikan timbal balik sepadan bagi industri jasa keuangan.” (paragraf ke-3, baris ke-1, artikel Kompas.com, 27 November 2014) 	<p>Kontruksi nelayan sebagai kelompok yang jauh dari kata sejahtera membuat pemerintah memiliki kegagalan dalam menyejahterakan seluruh warganya.</p>
	<p>Kesadaran Masyarakat Sebagai Negara Maritim</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ “Menurut Saud, pemerintah akan terus mendorong konsumsi ikan nasional...” (paragraf ke-9, baris ke-1, artikel Kompas.com, 30 November 2014) ○ “Wisata bahari menjadi salah 	<p>Pengembangan wisata bahari dapat mendorong kesadaran masyarakat sebagai negara maritim.</p>

		<p>satu potensi yang akan menjadi tanggungjawab bersama. Mari tingkatkan bersama-sama." (paragraf ke-8, baris ke-2, artikel Kompas.com, 11 Desember 2014)</p> <ul style="list-style-type: none">○ "Sampai para staf juga akhirnya memesan rumah warga untuk ditinggali," ujar Arsadi. (paragraf ke-11, baris ke-1, artikel Kompas.com, 15 desember 2014)○ Yati (54) warga dari Wayhalim, Bandar Lampung datang bersama keluarganya untuk menikmati rekreasi maritim. "Saya mengajak anak, keponakan dan cucu, menyenangkan sekali. Saya juga bisa memperkenalkan tentang kelautan pada cucu,"katanya. (paragraf ke-2, baris ke-1, artikel Kompas.com, 1 Desember 2014)○ Demikian juga dengan Notor (40), warga Garuntang, Bandar lampung. Ia mengajak istri dan anaknya untuk rekreasi gratis mengarungi laut. "Saya dapat informasi ini dari Koran, mumpung gratis dan tepat hari	
--	--	---	--

		<p>libur juga kenapa tidak mengajak keluarga bersenang-senang,” ujarnya. (paragraf ke-3, baris ke-1, artikel Kompas.com, 1 Desember 2014)</p> <ul style="list-style-type: none">○ “Biasanya para nelayan melakukan ruwatan dengan mempersembahkan sesaji untuk laut, diharapkan festival budaya maritim ini menjadi kegiatan rutin dan dapat berkembang menjadi salah satu tujuan wisata tahunan,” katanya. (paragraf ke-3, baris ke-1, artikel Kompas.com, 1 Desember 2014)○ “Masyarakat Wakatobi begitu dekat dan menjaga pesisir pantai serta perairan lautnya. Mereka selalu sadar untuk menjaga kelestarian lingkungan bawah laut. Kestarian terumbu karang Wakatobi yang terus terjaga merupakan hasil jerih payah warganya.” (paragraf ke-8, baris ke-1, artikel Kompas.com, 4 Desember 2014)	
--	--	---	--

Sumber yang Dikutip	Nama dan Atribut Sosial Sumber	<ul style="list-style-type: none"> ○ Zaini Hanafi (Direktur Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan KKP). ○ Andi Widjajanto (Sekretaris Kabinet). ○ Indroyono Soesilo (Menteri Koordinator Maritim). ○ Ahmad Erani Yustika (Guru Besar Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang). ○ Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia ke-7). ○ Susi Pudjiastuti (Menteri Kelautan dan Perikanan). ○ Robert Orris Blake (Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia). ○ Laksamana Marsetio (Kepala Staf Angkatan Laut). ○ Andrinof Chaniago (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional). ○ Rido Barubara (Direktur Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil KKP). ○ Yusron Ihza Mahendra (Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang). ○ Sugiharjo (Staf Ahli Bidang Logistik dan Multimoda Kementerian Perhubungan). 	Permasalahan maritim yang ada di negara Indonesia dapat didekati dengan banyak perspektif dari berbagai kalangan.

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Muhammad Arsadi (Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan). ○ Marzuki Yazid (Ketua Himpunan Seluruh Nelayan Indonsi (HSNI) Provinsi Lampung). ○ Marwan Jafar (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi). ○ Nadar (Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kabupaten Wakatobi). ○ Yasuaki Tanizaki (Duta Besar Jepang untuk Indonesia). ○ Martin Elbourne (<i>Bussiness Development Eurofighter GmbH</i>). ○ Valentina I. Matviyenko (Ketua Dewan Federasi Majelis Federal Federasi Rusia). ○ Suryo Bambang Sulistio (Ketua KADIN). ○ Sudirman Maman Rusdi (Ketua Umum Gaikindo). ○ Yudi Widiana Adia (Anggota DPR). 	
<p>Cara Penyajian</p>	<p>Pilihan Fakta yang Dimuat</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sudah banyak yang ajak kerja sama dengan kita. ○ Menko Indroyono Jajakan Infrastruktur pada Investor AS ○ Investor Jepang Tertarik Bangun 	<p>Dukungan terhadap pembangunan infrasruktur maritim dengan</p>

		<p>Pabrik Mesin Kapal</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Singapura Kepincut Ikut Garap Tol Laut Indonesia ○ Ratusan Kapal Perang Siap Dikerahkan untuk Tindak “Illegal Fishing” ○ Menteri Susi: Nelayan Asing Mulai “Ketar-ketir” Masuk ke Indonesia ○ Dubes: Amerika Siap Bantu Pertahanan Maritim Indonesia ○ Nelayan identik dengan kemiskinan ○ Posisi nelayan masih dianggap sebagai kelompok ekonomi subsisten ○ Padahal, nelayan membutuhkan asuransi untuk menghadapi bencana alam dan gangguan kesehatan ○ Sepertinya Beliau ingin mengandalkan Menko Maritim ini, ingin membangkitkan kembali semangat bahari kita ○ Kapal Nelayan Meriahkan Festival Budaya Maritim Teluk Lampung ○ Wisata Maritim di Lempasing, Pulangnya Bisa Bawa Ikan 	<p>perluasan investasi bagi negara asing</p> <p>Penguatan pertahanan laut dengan penegakan hukum</p> <p>Kesejahteraan nelayan yang sulit tercapai</p> <p>Pengembangan wisata bahari untuk membangun kesadaran masyarakat Indonesia sebagai negara maritim</p>
	<p>Struktur Penyajian</p>	<p>Kompas.com menempatkan pemerintah sebagai pihak yang aktif melakukan</p>	

		diplomasi, kerjasama dan melaksanakan program-program kemaritiman serta banyaknya dukungan (investasi) yang mengalir kepada Indonesia.	
Simbol yang Dipergunakan	Verbal: Kata, Istilah dan Frase	<ul style="list-style-type: none"> ○ Negara lain ketar-ketir ○ Singapura kepincut ○ Jajakan infrastruktur ○ Investor Jepang tertarik ○ posisi nelayan masih dianggap sebagai kelompok ekonomi subsisten ○ Nelayan identik dengan kemiskinan 	
	Non Verbal: Foto dan Gambar	Tidak ada foto	
Jalan Pikiran (Kesimpulan) yang Dibuat		<p>Kompas.com mengkonstruksikan pemberitaan maritim terhadap empat hal penting. Pertama, pembangunan infrastruktur maritim berkaitan erat dengan peran aktif pemerintah dalam hubungan diplomasi dengan keikutsertaan dalam pelbagai organisasi internasional. Kedua, mengenai keamanan laut yang diperkuat dengan pengadaan alutsista berupa kapal patroli, selam, drone serta dikeluarkannya beberapa peraturan terkait perizinan. Ketiga, permasalahan kesejahteraan nelayan yang rendah, nelayan diposisikan sebagai kelompok ekonomi subsisten. Hal ini sekaligus menggambarkan kegagalan pemerintah dalam menyejahterakan rakyatnya. Keempat, kesadaran masyarakat yang rendah sebagai negara maritim ditandai dengan rendahnya konsumsi ikan. Hal ini, dapat ditunjang dengan membangkitkan kembali semangat bahari dengan</p>	

	mempromosikan wisata bahari yang ada. Dengan demikian, diharapkan dapat membantu meningkatkan ekonomi daerah.
--	---



Lampiran Berita Kompas.com

a. Kategori Berita Pembangunan Infrastruktur Maritim

Ada 12 Kesepakatan yang Dibawa Jokowi dari Beijing

Senin, 17 November 2014 / 06:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko "Jokowi" Widodo (Jokowi) membawa "oleh-oleh" berupa 12 kesepakatan yang dicapai dengan sejumlah negara pascapertemuan KTT APEC di Beijing, Tiongkok, beberapa waktu lalu. Dalam waktu dekat, semua kesepakatan itu akan ditindaklanjuti.

Demikian disampaikan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (16/11/2014).

"Mendag yang sudah melaporkan ada 12 kesepakatan yang sudah dihasilkan di Beijing, silakan ditanyakan lebih detail ke Mendag," kata Andi.

Andi mengungkapkan, beberapa kesepakatan itu bahkan sudah langsung ada penandatanganan *memorandum of understanding (MoU) business to business*. Setelah penandatanganan MoU itu, Andi memastikan semua menteri terkait akan langsung bekerja.

Lebih lanjut, Andi mengungkapkan, konsep [Jokowi](#) untuk memangkas birokrasi dalam perizinan telah membuat pertanyaan bagi Perdana Menteri Australia Tony Abbott. Di depan forum APEC, ASEAN Summit, hingga G-20, Jokowi selalu mempromosikan rencana pelayanan izin satu pintu.

"Ketika pertemuan bilateral, PM Abbot misalnya malah bertanya bagaimana Indonesia bisa merancang *one stop service* dengan pemotongan-pemotongan beberapa tahapan birokrasi perizinan, karena itu di Australia susah sekali dilakukan," kata Andi.

Sebelumnya, Presiden langsung mengutus sejumlah menteri untuk menindaklanjuti hasil pertemuan bilateral yang dilakukannya dengan kepala negara dalam forum KTT APEC, KTT ASEAN, dan G-20. Para menteri itu diminta untuk jemput bola mendatangi negara-negara yang sudah menyatakan ketertarikannya menjalin kerja

sama dengan Indonesia.

Jokowi mencontohkan Menteri Koordinator Maritim Indroyono Soesilo akan diutus ke Tiongkok dan Jepang untuk membahas masalah kemaritiman. Untuk industri otomotif, Jokowi mengungkapkan, pengusaha Italia tertarik untuk berinvestasi ban di Indonesia.

Selain itu, Jokowi juga mengaku berhasil membawa rencana investasi di sektor pelabuhan hingga pembangkit listrik. Untuk menggarap dua sektor itu, Jokowi mengaku akan meminta badan usaha milik negara (BUMN) untuk menindaklanjuti sehingga benar-benar tercipta kerja sama yang konkret.

"Ini harus ditindaklanjuti. Kalau enggak, ya enggak akan ketemu," katanya.

Penulis : Sabrina Asril

Editor : Hindra Liauw

[http:// Ada12KesepakatanyangDibawaJokowidarBeijing-Kompas.com](http://Ada12KesepakatanyangDibawaJokowidarBeijing-Kompas.com). Diakses pada tanggal 23 Maret 2015

"Blusukan" Jokowi di Tianjin, dari Kereta Cepat hingga Pembangkit Listrik

Selasa, 11 November 2014 | 16:40 WIB

KOMPAS.com — Tak sekadar bertemu dengan para pemimpin tertinggi Tiongkok, Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Keqiang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga langsung *blusukan* untuk melihat apa yang ditawarkan oleh Negeri Tirai Bambu.

Seusai meninggalkan Balai Agung Rakyat, tempat keputusan-keputusan penting Tiongkok diambil, Presiden dengan didampingi oleh Menko Perekonomian Sofyan Djalil dan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel berkunjung ke Tianjin, yang terletak di selatan Beijing.

Untuk menuju kota tersebut, Presiden yang juga disertai oleh Ibu Iriana Joko Widodo memilih menggunakan kereta cepat Tianjin-Beijing. Kereta cepat ini menghubungkan dua kota yang berjarak sekitar 117 kilometer itu dengan waktu tempuh hanya 30

menit.

Kedatangan Presiden beserta rombongan di stasiun sempat memancing rasa ingin tahu para pengguna alat transportasi tersebut. Mereka berkerumun di sekitar jalan yang dilalui Presiden.

Dalam suatu sesi wawancara di dalam kereta api cepat, Presiden Jokowi menyebut kereta cepat itu sebagai contoh bahwa pembangunan infrastruktur hendaknya tidak dilakukan terlambat.

"Infrastruktur itu jangan terlambat, apalagi yang menyangkut hubungan antara kota dan kota, antara pulau dan pulau. Konektivitas itu wajib," katanya.

Menurut Presiden, semakin cepat dibangun, infrastruktur akan semakin murah. Sementara itu, jika semakin lama atau semakin diundur, maka biaya pembangunan infrastruktur akan semakin mahal dan manfaatnya hilang.

Ia kemudian memberikan contoh pembangunan *mass rapid transportation* (MRT) atau transportasi cepat massal yang akan jauh lebih murah apabila dibangun 20 atau 25 tahun lalu, terkait dengan pembebasan lahan dan urusan non-teknis lainnya.

"Ini ada keputusan politik. Kalau sudah diputuskan ya memang harus segera dikerjakan, jangan menunda-nunda apa yang namanya pembangunan infrastruktur," katanya.

Saat ditanya apakah pemerintahannya berniat membangun kereta api cepat itu, Presiden mengatakan belum dapat menyampaikan hal itu karena belum konkret.

Di Tianjin, Wali Kota Huang Xingguo secara khusus menyambut Presiden dan Ibu Iriana. Xingguo menyampaikan komitmennya untuk melaksanakan kesepakatan yang telah disetujui oleh Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Li Keqiang dan Presiden Xi Jinping.

Sementara itu, Presiden menyampaikan kekagumannya pada tata kota Tianjin, yang bersih dan indah karena banyak memiliki taman kota. Mengingat Tiongkok mulai memasuki awal musim gugur, beberapa pohon di taman-taman kota tampak mulai menguning.

Jokowi menilai Tianjin sebagai kota yang tumbuh pesat sekali karena ditunjang oleh industri, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, infrastruktur, transportasi, dan lain-lain.

"Saya kira pengalaman-pengalaman seperti inilah yang ingin kita cari dan ingin kita laksanakan di Tanah Air," katanya.

Pelabuhan

Dengan rombongannya yang relatif berjumlah kecil, kurang dari 50 orang dalam rombongan inti, termasuk 13 wartawan, Presiden Jokowi juga melakukan peninjauan di kantor pelayanan Pelabuhan Tianjin, bahkan dermaga kontainer. Ia secara langsung menanyakan kapasitas pelabuhan dan hitung-hitungan ekonomi operasional bandara tersebut.

"Rencananya, kita akan mengembangkan 24 pelabuhan dalam lima tahun ini. Oleh sebab itu, mengapa kita ke Tianjin, ini adalah pelabuhan besar, dan arah pengembangan 50 tahun-100 tahun sudah ada perencanaan," kata Jokowi.

Menurut Presiden, pemerintah pada 2015 akan siap membangun empat pelabuhan sehingga kunjungan ke Tianjin tersebut sebagai suatu penjajakan dan pembelajaran.

"Pertama, kita ingin melihat di lapangan. Kedua, kalau bisa, kerja sama antara BUMN dan BUMN. Kalau tidak, ya swasta dengan swasta," katanya.

Namun, ia mengatakan, tidak menutup kemungkinan jika pemerintah melakukan pembiayaan apabila rencana tersebut masih dianggap tidak menarik oleh investor.

Terkait peluang mengadopsi konsep pelabuhan Tianjin, Presiden mengatakan pelabuhan tersebut memang terhitung efisien. Akan tetapi, belum ada pembahasan ke arah itu, sekalipun ia mengaku bahwa contoh di Tianjin sudah lebih dari cukup, baik dari segi manajemen maupun perencanaan.

Pelabuhan Tianjin juga merupakan pelabuhan terbesar di kawasan utara Tiongkok dan merupakan pintu akses maritim terpenting bagi Beijing.

Dengan luas daratan 121 km persegi, pelabuhan Tianjin adalah *man-made port* terbesar di Tiongkok.

Pada tahun 2013, pelabuhan Tianjin menangani kargo sejumlah 500 ton dan kontainer sebanyak 13 juta TEU. Hal tersebut menjadikannya sebagai pelabuhan keempat yang terbesar di dunia dalam hal aktivitas dan kesembilan terbesar di dunia untuk pelabuhan kontainer.

Pelabuhan Tianjin menghubungkan Tiongkok dengan lebih dari 600 pelabuhan di 180 negara di dunia.

Pembangkit listrik terintegrasi

Selain *blusukan* di pelabuhan, Presiden Jokowi juga *blusukan* melihat integrasi antara fasilitas pembangkit listrik, pemurnian air laut, dan pembuatan garam di Tianjin Beijing Power Plant.

"Mereka dalam membangun pelabuhan itu pasti terintegrasi. Pembangkit listrik ada, pelabuhan ada, zona industri menjadi satu. Menjadi efisien, membawa barang dekat, menarik listrik ke industri dekat. Inilah yang ingin terus kita pelajari, mengapa barang mereka sangat kompetitif, bisa sangat murah dan efisien," katanya.

Jokowi melakukan tanya jawab langsung dengan penanggung jawab fasilitas pembangkit listrik tersebut tentang tingkat efisiensi fasilitas itu, termasuk juga dampaknya terhadap lingkungan.

Tianjin Beijing Power Plant merupakan pembangkit listrik bertenaga batu bara dengan kapasitas 2.000 megawatt. Pembangkit listrik tersebut dibuka pada 2009, dan berlokasi di Subdistrik Hangu, Binhai New Area.

Pembangkit listrik itu merupakan salah satu sumber tenaga bagi Tianjin, terutama kawasan Binhai New Area.

Selaras dengan gagasan yang diusungnya dalam kampanye untuk jabaran RI1, pada kunjungan kerja pertamanya ke luar negeri, Presiden Jokowi tampaknya juga langsung menyorot pada upaya-upaya untuk mewujudkan konektivitas antarkota dan kawasan di Indonesia serta mewujudkan ketahanan energi.

Sekalipun belum secara terbuka menyampaikan hasil dari *blusukan* tersebut, dalam suatu wawancara se usai jamuan santap malam para pemimpin ekonomi APEC di Water Cube, Beijing, Presiden Jokowi mengakui bahwa ada hasil konkret dari pertemuannya dengan para pemimpin Tiongkok serta kunjungan kerjanya ke negeri tersebut. (GNC Aryani)

Editor: Erlangga Djumena

Sumber: Antara

<http://www.kompas.com>'Blusukan'JokowidiTianjin,dariKeretaCepathinggaPembangkitListrik-Kompas.com. Diakses pada 22 Maret 2015

Andrinof, Pemikir "Out of the Box"

Minggu, 26 Oktober 2014 / 19:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Lantang dan selalu menyuarakan pemikiran pembangunan yang berbeda dari gagasan arus utama (*mainstream*) adalah karakter yang dikenal melekat pada diri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof A. Chaniago.

Di tangan pria kelahiran 3 November 1962 inilah, Presiden Joko Widodo mengharapkan program pembangunan berorientasi kesejahteraan rakyat dapat direncanakan dan diimplementasikan dengan baik. Bappenas juga diharapkan dapat menjadi Lembaga yang berperan kuat dan mampu mengkoordinasi rencana pembangunan pemerintah pusat dan daerah.

Andrinof merupakan salah satu representasi janji [Jokowi](#) untuk menunjuk menteri dari kalangan profesional dan akademisi.

Pria berkumis ini adalah ahli kebijakan publik dan perencanaan yang lulus dari program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Dia juga dikenal sebagai akademisi yang sangat aktif mengikuti pelatihan dan seminar pembangunan di luar negeri.

Dia pernah mengenyam pendidikan di The National Development Courses dari Fu Hsing Kang College, Taipei, Taiwan, (2004). Selain itu, dia juga mengikuti pelatihan dan seminar bertajuk "*Economic Globalization*", Wuhan, Tiongkok pada 2007, "*Taiwan Economic Development and Planning*", di Taipei, Taiwan pada 2006. Kemudian "*Sustainable Urban Development*" di Touyuan City, Taiwan, 2004, serta "*Conflict Mediation*", di Oslo dan Troms O, Norwegia, 2003.

"Dia salah satu pemikir yang selalu memberikan gagasan di luar pemikiran 'mainstream', selalu 'out of the box'," kata Ahmad Erani Yustika, kolega Andrinof, yang merupakan Guru Besar Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur kepada Antara, Minggu.

Presiden Jokowi menegaskan Andrinof sebagai akademisi di Kabinet Kerja, diharapkan dapat membuat perencanaan yang mendukung kesuksesan pembangunan.

"Beliau adalah ahli kebijakan publik dan anggaran, Saya mengajak beliau agar pembangunan kita tidak gagal," kata Joko Widodo (Jokowi) saat konferensi pers Anggota Kabinet Kerja 2014-2019 di Jakarta, Minggu

Sejak menempuh pendidikan di UI, Andrinof dikenal sebagai aktivis yang sangat kritis. Kalangan pemikir dari UI mungkin sudah tidak asing lagi dengannya.

Dia pernah menjabat sebagai Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa dan menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa UI. Pemikiran kritisnya itu hingga kini dia suarakan melalui karya-karya tulisan di media massa terkemuka, dan juga buku.

Buku karya Andrinof yang sangat dikenal adalah "*Gagalnya Pembangunan: Kajian Ekonomi Politik Akar Krisis Indonesia*" yang terbit tahun 2001.

Melalui buku itulah, Andrinof mulai dikenal sebagai peneliti yang tidak hanya "hatam" ilmu pembangunan dan kebijakan publik, namun juga ilmu ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Karakter ahli lintas sektor inilah yang dianggap pantas untuk menjadi Kepala Bappenas.

"Kalau baca bukunya Andrinof, bisa dipahami, kalau Andrinof juga mengerti ilmu-ilmu di luar kebijakan publik. Dia juga menguasai ekonomi, dan kesra dan lainnya," ujar Erani.

Tim pemikir

Andrinof dan Erani adalah dua punggawa tim pemikir pembangunan, Visi Indonesia 2033. Melalui tim ini, Andrinof dan para peneliti, pernah menyuarakan pemindahan ibu kota pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan. Tujuan utamanya adalah menciptakan kesejahteraan dan pertumbuhan pembangunan yang berkelanjutan bagi masa depan Indonesia.

Dikutip dari situs resmi tim Visi Indonesia 2033, Andrinof menyatakan, daya dukung Pulau Jawa khususnya Jakarta dan sekitarnya tak memadai lagi untuk ibu kota. Pemindahan ibu kota juga menurut dia lebih efektif mewujudkan Indonesia yang sejahtera berkeadilan, dengan perekonomian yang tumbuh secara berkelanjutan.

Selain itu, pemindahan ibu kota, menurut dokumen Visi Indonesia 2033, diharapkan akan menumbuhkan episentrum baru yang mendekati kawasan tertinggal dan pinggiran.

Paham Jokowi

Banyak kalangan ekonom beranggapan, Kepala Bappenas harus dekat dan pandai berkomunikasi dengan Presiden, menteri lain dan pemerintah daerah. Hal tersebut bertujuan agar perencanaan yang disusun Bappenas dapat disusun dengan matang, dan diimplementasikan dengan baik oleh para pemangku kepentingan.

Alasan orang dekat Jokowi, bukan berarti pemilihan mengandung unsur nepotisme.

Justru, menurut Erani, kedekatan Presiden dengan Kepala Bappenas, mampu memudahkan komunikasi antara dua pihak, sehingga perencanaan pembangunan dapat sesuai dengan konsep Presiden.

Andrinof, pria kutu buku ini dikenal sebagai orang dekat Jokowi. Dia juga dikenal sebagai pemikir yang menjadi "dalang" gagasan-gagasan pembangunan "modal" kampanye Jokowi saat Pilpres 2014.

"Dia itu sangat dekat dengan Jokowi, maka dari itu dia diharapkan mampu menerjemahkan gagasan Jokowi dalam perencanaan pembangunan yang matang," kata

Erani.

Andrinof juga sepaham dengan gagasan tol laut Jokowi untuk mengurangi biaya logistik dan sekaligus mengurangi ketimpangan ekonomi.

Menurut dia, hal itu dapat mewujudkan cita-cita pemerintah untuk mempercepat kemajuan menuju Indonesia yang maju, dibarengi dengan pemerataan tanpa penyimpangan.

"Ini bisa menjadi alasan. Ke depan nanti, Pak Jokowi akan berbicara tentang tol laut di Terminal Peti Kemas," kata Andrinof, dalam sebuah diskusi di Jakarta, beberapa waktu silam.

Sebagai negara maritim, menurut Andrinof, tol laut merupakan poros penting. Tujuannya, mewujudkan pemerataan pembangunan, dan menghilangkan ketimpangan ekonomi.

Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, menilai Kepala Bappenas harus mampu menjadi konsolidator perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah.

Enny juga meminta Kepala Bappenas terpilih agar mampu meyakinkan menteri-menteri lainnya, bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus sinkron, dan jangan mengurangi manfaat kebijakan salah satu Kementerian atau Badan.

Menurut Enny, banyak program pembangunan sebelumnya, seperti pengentasan kemiskinan, yang tidak memenuhi target pada 2014 karena perencanaan program yang tidak matang dan, terjadinya benturan kebijakan lintas kementerian.

Dengan kemampuan seorang konsolidator, lanjut Enny, kepala Bappenas baru diharapkan dapat mensinergikan perencanaan pembangunan dengan instansi lain, termasuk juga dengan pemerintah daerah.

"Jadi Badan ini nantinya mampu mengoordinasikan perencanaan pembangunan skala nasional maupun daerah," ujarnya.

Andrinof, pria perantau dari Padang ini kini diharapkan menjadi tumpuan

perencanaan dari konsep pembangunan Jokowi.

Tantangan berat tentu ada di depan Andrinof. Jokowi sejak sudah lama mewanti-wanti, agar pembangunan harus memberikan manfaat yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hal itu berarti ketimpangan ekonomi yang pada 2013 lalu menyentuh level 0,41 harus dikurangi. Kemiskinan pun harus dientaskan secepat-cepatnya dan setuntas-tuntasnya.

Penulis: Hindra Liauw

Editor : Hendra Liauw

Sumber : Antara

<http://Andrinof,Pemikir'OutoftheBox'-Kompas.com>. Diakses pada 23 Maret 2015

Jokowi Diminta Siapkan "Guidance" untuk Wujudkan Tol Laut

Selasa, 21 Oktober 2014 | 13:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Cita-cita Presiden Joko Widodo menghubungkan pulau-pulau di Indonesia dengan konsep tol lautnya dinilai tidak akan mudah terwujud. Pasalnya berbagai masalah seperti infrastruktur laut dan armada kapal dinilai belum siap akan konsep itu.

Menurut Staf Ahli Bidang Logistik dan Multimoda Kementerian Perhubungan Sugiharjo, pekerjaan rumah Jokowi disektor logistik maritim sangat menumpuk. Oleh karena itu, Presiden RI Ke-7 itu harus menjadi guiden langsung disektor maritim.

"Tapi kelemahannya kan penerapan Silogisnas (Sistem Logistik Nasional). Harus ada *guidance* pimpinan negara. Jadi kemampuan eksekusi yang penting," ujar Sugiharjo di Jakarta, Selasa (21/10/2014).

Dia menjelaskan, menjadi acuan dalam penerapan Silogisnas bisa dimulai dari mengajak semua *stakeholder* di bidang logistik untuk tidak berpikir parsial tetapi harus bergotong royong membangun sektor tersebut. Caranya yaitu dengan dengan

melibatkan semua pihak untuk terlibat langsung dalam pembangunan tol laut tersebut.

Memang menurutnya, Sislognas bukanlah sistem yang sempurna, karena masih banyak kelemahan disana-sini. Tetapi dia yakin, Sislognas memiliki tujuan yang baik sehingga penerapannya mutlak dilakukan. "Memang belum sempurna, tapi Sislognas sangat bagus. PR kita sangat banyak," kata dia.

Penulis : Yoga Sukmana

Editor : Bambang Priyo Jatmiko

[http://JokowiDimintaSiapkan"Guidance"untukWujudkanTolLaut-Kompas.com](http://JokowiDimintaSiapkan).

Diakses pada 23 Maret 2015

Jokowi: Subsidi BBM Rp 714 Triliun, Sangat Boros!

Jumat, 7 November 2014 | 10:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com —Presiden Joko Widodo kembali menyinggung soal subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dianggap membebankan anggaran negara. Jika dibandingkan anggaran kesehatan dan infrastruktur, [Jokowi](#) menilai anggaran untuk subsidi BBM sudah sangat boros.

"Subsidi BBM Rp 714 triliun, sementara kesehatan Rp 202 triliun, infrastruktur Rp 577 triliun. Boros *nggak* kita? Itu boros namanya, sangat boros! Tapi, tidak sadar kita," ujar Jokowi dalam sambutannya di acara Kompas 100 CEO Forum di Jakarta, Jumat (7/11/2014).

Jokowi menegaskan bahwa keborosan itu harus segera dihentikan. Anggaran harus dialihkan untuk menyokong sektor produktif dibandingkan untuk hal-hal yang konsumtif.

"Kita tahu sekarang defisit neraca transaksi berjalan, defisit transaksi berjalan. Saya meyakini, itu bisa diselesaikan kalau semuanya bisa bergerak bersama-sama," kata Jokowi.

Jokowi menyatakan pentingnya pengalihan subsidi BBM ke industri maritim hingga pertanian. Dalam industri maritim, misalnya, Jokowi menargetkan pembangunan 24

pelabuhan dalam lima tahun pemerintahannya. Jokowi juga ingin mewujudkan tol laut.

Sementara itu, di sektor pertanian, Jokowi memberikan pekerjaan rumah kepada Menteri Pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan dalam tiga tahun mendatang. Untuk mencapai itu, perlu dilakukan pembangunan bendungan 25-30 buah dalam waktu lima tahun.

Pernyataan Jokowi soal BBM ini sudah berkali-kali disampaikannya dalam berbagai kesempatan dan seolah memberikan sinyal untuk menaikkan harga BBM. (Baca: **Jokowi Pusing, Subsidi BBM Rp 714,5 Triliun Habis Dibakar dalam 5 Tahun!**)

Pemaparan Jokowi dengan gaya seperti ini sudah pernah disampaikannya dalam rapat koordinasi dengan para kepala daerah dan kepala kepolisian daerah di Istana Negara dan pertemuan dengan alumni Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu. (Baca: **Jokowi: Kenaikan Harga BBM Masih Dikalkulasi**)

Penulis: Sabrina Asril

Editor : Sandro Gatra

<http://Jokowi:SubsidiBBMRp714Triliun,SangatBoros!-Kompas.com>. Diakses pada 23 Maret 2015

Tol Laut Naikkan Efektivitas Pengiriman Mobil ke Daerah

Senin, 27 Oktober 2014 | 10:13 WIB

Jakarta, KompasOtomotif — Rencana Pemerintah Indonesia menciptakan infrastruktur tol laut untuk meningkatkan efektivitas mendapat dukungan penuh Gaikindo selaku pengusaha dari industri otomotif. Dengan adanya fasilitas pengantaran barang yang lebih mumpuni, pengiriman mobil ke wilayah daerah akan lebih efektif dari kondisi sekarang.

"Kami akan senang kalau itu jadi (tol laut), pengangkutan mobil akan lebih cepat. Kalau sekarang kita mengirim mobil ke Manado atau Bitung, butuh waktu tiga minggu sampai sebulan. Kalau adanya tol laut bisa jadi seminggu, sangat bagus

sekali," jelas Sudirman Maman Rusdi, Ketua Umum Gaikindo, kepada *KompasOtomotif*, Senin (27/10/2014).

Selain lebih cepat, lanjut Sudirman, dengan adanya infrastruktur tol laut, maka biaya distribusi pengiriman barang-barang kebutuhan hidup, termasuk mobil, akan lebih murah. "Kalau sekarang mengirim barang ke Jepang biayanya lebih murah ketimbang ke timur (Indonesia)," ungkap Sudirman.

Transportasi

Namun, fokus pemerintahan Presiden Jokowi yang berkiblat pada pembangunan potensi maritim Indonesia, apakah justru relatif menyampingkan sarana transportasi lainnya, seperti darat dan udara. Menanggapi hal ini, Sudirman mengaku tidak khawatir karena meski fokus pada infrastruktur kelautan, transportasi darat juga akan terintegrasi dan tetap dikembangkan.

"Kalau transportasi laut dikembangkan, di darat tetap butuh sarana yang menunjang. Jadi, menurut saya, tetap akan sejalan pengembangannya nanti," imbuh Sudirman.

Penulis: Agung Kurniawan

Editor : Aris F. Harvenda

<http://TollLautNaikkanEfektivitasPengirimanMobilkeDaerah-Kompas.com>. Diakses pada 23 Maret 2015

Presiden Jokowi Bertolak ke Myanmar

Selasa, 11 November 2014 | 17:09 WIB

BEIJING, KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Selasa (11/10/2014) sore, bertolak menuju Myanmar untuk menghadiri KTT ASEAN dan KTT Asia Timur yang akan berlangsung 12-13 November 2014.

Setelah mengikuti rangkaian kegiatan pertemuan ke-22 tingkat tinggi pemimpin ekonomi Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), di Yanqi Lake, Beijing, Presiden dan rombongan langsung menuju Bandara Internasional "Capital" Beijing.

Presiden Jokowi beserta Ibu Negara Iriana dan rombongan yang menuju Myanmar dengan pesawat kepresidenan, dilepas Duta Besar RI untuk Indonesia merangkap

Mongolia Soengeng Rahardjo, Atase Pertahanan RI di KBRI Beijing Kolonel Laut (Lek) Samuel Kowaas dan perwakilan pejabat Tiongkok.

Selama mengikuti rangkaian pertemuan APEC 2014, Presiden Jokowi telah melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang.

Jokowi juga mengadakan beberapa pertemuan bilateral di antaranya dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, dan Presiden Vietnam Trang Tun Sang. Presiden juga memberikan presentasi di hadapan 500 wakil perusahaan terkemuka dunia dan CEO Summit APEC 2014.

Dalam setiap kesempatan, Presiden menyampaikan program kemaritimannya yang dikenal Poros Maritim Indonesia serta mengundang para calon investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia untuk infrastruktur.

Penegasan tentang poros maritim Indonesia akan menjadi salah satu topik utama yang akan diusung Presiden Jokowi dalam KTT ASEAN dan KTT Asia Timur.

"Banyak yang bertanya tentang apa itu agenda maritim berupa "sea toll" Indonesia, apa itu poros maritim Indonesia. Jadi saya akan sampaikan itu nanti," ujar Jokowi.

Editor : Inggried Dwi

Sumber : Antara

[http:// PresidenJokowiBertolakkeMyanmar-Kompas.com](http://PresidenJokowiBertolakkeMyanmar-Kompas.com). Diakses pada 24 Maret 2015

Soal Infrastruktur, Pemerintah Harus Jadi "Contracting Agency"

Penulis : Hilda B Alexander | *Sabtu, 1 November 2014 / 12:58 WIB*

JAKARTA, KOMPAS.com - Merealisasikan konsep pembangunan infrastruktur tol laut yang terintegrasi dengan infrastruktur darat, bukan perkara mudah. Selain membutuhkan dana besar, juga seperangkat peraturan yang mengikat lembaga pelaksana terkait serta kehendak bersama untuk menyelesaikannya.

Pasalnya, pembangunan infrastruktur sarat tantangan baik dalam proses pra-konstruksi terutama berkaitan dengan penyediaan lahan dan perizinan termasuk persetujuan masyarakat dan pemangku kepentingan, dalam proses konstruksi, dan pendanaan.

Menurut Executive Vice President PT Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, Emil Elestianto Dardak, sejauh ini masalah cukup banyak didominasi isu pra-konstruksi, baik untuk proyek infrastruktur yang dibiayai APBN/APBD maupun proyek swasta. Demikian halnya dengan proyek infrastruktur yang dijakankan dengan skema kerjasama pemerintah-swasta (KPS).

"Banyak proyek KPS yang terkendala terutama saat proses penyiapan proyek agar layak untuk jadi tujuan investasi. Pasalnya, paradigma pemerintah belum berubah. Pemerintah masih menganggap sebagai *licencing agency* sekaligus *spending agency*. Padahal perubahan paradigma sangat diperlukan untuk menyegerakan pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu pemerintah harus menjadi *contracting agency*," tutur Emil kepada Kompas.com, Jumat (31/10/2014).

Dengan menjadi *contracting agency*, tambah Emil, pemerintah terlibat secara langsung baik pada saat pra konstruksi, konstruksi, dan pasca konstruksi. Pengkajian ulang mengenai proyek prioritas, terutama Kawasan Timur Indonesia, yang kini dilakukan Presiden Joko Widodo, kata Emil, sah-sah saja.

"Namun, pendekatan *high growth corridor* juga perlu dilakukan, agar ada lokomotif perekonomian di Indonesia. Pembangunan di Kawasan Timur Indonesia, seharusnya didorong sebagai upaya meningkatkan sinergi agar *high growth corridor* dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah lainnya di Indonesia," kata Emil.

Emil menuturkan, secara terminologi sebetulnya rencana pemerintah SBY dulu melalui Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) terkait infrastruktur justru mendorong pengembangan koridor darat yang akan memaksimalkan potensi industri dan sumber daya alam serta pertumbuhan kota di sepanjang *high growth corridor* tersebut dengan pendekatan terpadu antara strategi proyek infrastruktur dengan strategi proyek investasi industri dan perdagangan.

"Intinya memastikan tersedianya infrastruktur dan bagaimana infrastruktur tersebut

digunakan," timpal Emil.

Dia menjelaskan, mengubah MP3EI bisa saja, namun paradigmanya harus diperbaiki dulu. Terlebih, Indonesia akan menghadapi kompetisi global yang makin intensif ke depan. Termasuk dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pemerintah harus menggenjot pembangunan di *high growth corridor* seperti Sumatera.

"Pembangunan infrastruktur Trans Sumatera sejauh ini sudah ada kerangka pengembangannya, dan potensi pulau ini masih banyak sekali yang belum dielaborasi. Ke depannya justru Sumatera memiliki peran penting dalam poros maritim sebagai gerbang pelabuhan utama di jalur pelayaran strategis Selat Malaka, untuk kemudian menjadi *hub* dan distributor ke pelabuhan-pelabuhan lain di Indonesia, sesuai dengan konsep tol laut," ujar Emil.

Keberadaan Trans Sumatera, kata Emil, akan sangat penting untuk mendukung efektivitas *hub* pelabuhan ini karena perlu ada dukungan skala ekonomi yang signifikan bagi efektifitas sebuah *hub port*. Dengan konsep jalan tol, maka sebagian dari biaya penyediaan dapat dipulihkan melalui biaya pengguna tol, dan dengan penunjukan BUMN yang murni dimiliki pemerintah, potensi kenaikan lalu lintas dari pengembangan wilayah akan menjadi manfaat investasi yang sepenuhnya dinikmati pemerintah dan masyarakat.

"Wilayah Barat mungkin lebih cocok untuk pendekatan KPS, di mana partisipasi APBN dapat diutamakan untuk mendorong lebih banyak investasi swasta di infrastruktur. Sebaliknya, untuk wilayah Timur, terutama yang sifatnya perintis, wajar jika digunakan atau didominasi oleh partisipasi APBN. Oleh karena itu, keseriusan pemerintah dalam mendorong KPS menjadi sangat penting agar pembangunan di wilayah barat maupun timur dapat terwujud," pungkasnya.

<http://SoalInfrastruktur,PemerintahHarusJadi'ContractingAgency'-Kompas.com>.
Diakses pada 22 Maret 2015

Menko Indroyono Jajakan Infrastruktur pada Investor AS

Rabu, 12 November 2014 | 12:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo menyampaikan kepada para investor Amerika Serikat (AS) yang hadir dalam US-

Indonesia Investment Summit, Rabu (12/11/2014), mengenai pembangunan yang tengah dilakukan pemerintah Indonesia, baik dari segi tantangannya maupun kesempatan dalam berinvestasi.

Pertama, Indroyono menjelaskan soal pembangunan infrastruktur seperti rel kereta api, dan rencana pembangunan jalur maritim. Indroyono mengatakan, saat ini Indonesia sudah memiliki 5.500 kilometer jalur kereta api. Diperkirakan dalam lima tahun ke depan, kebutuhannya melonjak tiga kali lipat. "Ini peluang bagi Anda," kata dia.

Untuk infrastruktur pelabuhan, Indroyono menerangkan rencana Presiden Joko Widodo untuk membangun 24 pelabuhan, serta perbaikan pelabuhan tua dan perluasan seperti Pelabuhan Tanjung Priok.

Selanjutnya, Indroyono menjelaskan soal proyek pembangkit listrik. Dia bilang pertumbuhan kebutuhan listrik di Indonesia sangat tinggi.

"Di Jawa saja, saat ini listriknya 23.000MW. Dengan pertumbuhan 7 persen per tahun, maka kebutuhan tambahan pasokan listriknya mencapai 1.800MW per tahun. Jika kita tidak melakukan apa-apa untuk ini, maka dalam lima tahun mendatang akan terjadi *shortage*, kritis listrik, akan terjadi pemadaman total," kata Indroyono.

Selain itu, dia juga memaparkan soal pembangunan pariwisata di Indonesia. Dia bilang, target pemerintah adalah 20 juta kunjungan wisman pada 2015. Untuk mencapai target yang diinginkan Presiden Joko Widodo itu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan bebas visa bagi lima negara, yakni China, Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Rusia.

Untuk menarik investasi khususnya dari AS, Indroyono menuturkan, pemerintah berkomitmen untuk menyederhanakan dan mempercepat perizinan usaha. Selain itu, pemerintah juga akan berkonsentrasi dalam memberikan kemudahan pengadaan lahan.

Penulis: Estu Suryowati

Editor : Erlangga Djumena

<http://MenkoIndroyonoJajakanInfrastrukturpadaInvestorAS-Kompas.com>. Diakses pada 23 Maret 2015

Investor Jepang Tertarik Bangun Pabrik Mesin Kapal

Senin, 1 Desember 2014 | 13:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Yusron Ihza Mahendra, memboyong investor asal Jepang, IHI Group, ke Indonesia untuk berinvestasi. Namun sebelumnya, investor tersebut minta diperkenalkan pada perusahaan Indonesia yang bisa menjadi rekanan.

"Jadi saya dari Tokyo datang ke sini untuk mempertemukan pihak IHI ini dengan pengusaha Indonesia melalui pertemuan atau seminar hari ini," ujar Yusron ketika ditemui di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Senin (1/12/2014).

IHI Group sebenarnya sudah cukup lama berinvestasi di Indonesia. Menurut Yusron, perusahaan tersebut tertarik untuk meningkatkan investasi yang sudah ada dan melebarkan sayapnya dalam industri lain, khususnya industri kapal.

Salah satu faktor pendorong yang membuat investor asal Jepang tersebut tertarik, menurut Yusron, adalah arah kebijakan Presiden Joko Widodo yang gencar menggairahkan sektor maritim.

"Mereka ingin lebih kuatkan lagi investasi yang sudah ada, berinvestasi baru, termasuk juga investasi di bidang lain. Mereka sudah ada, pabrik *crane* untuk angkat barang di pabrik. Lalu kemungkinan untuk *engine* mesin kapal mau bangun pabriknya di sini. Presiden Jokowi mau bangun kekuatan maritim kita, jadi saya sebagai dubes Indonesia di Jepang menghubungi ahli kapal, kita coba tarik Jepang untuk mesin kapal," katanya.

Yusron juga menyebutkan, IHI akan tetap berkontribusi dalam infrastruktur, khususnya pembangkit listrik. Selain itu, dia menyebutkan bahwa IHI akan bergerak pula di sektor pemeliharaan pesawat. "Termasuk pengembangan pemeliharaan pesawat kita. Jadi arahnya ke sana," kata Yusron.

Sementara Menteri Perindustrian Saleh Husin menyatakan, pihaknya akan menghubungkan IHI dengan perusahaan lokal terkait. "Nanti (kerjasamanya) pasti

dikenalkan ke perusahaan lokal yang sejalan dengan mereka misalnya dengan Rekayasa Industri," sebutnya.

Penulis : Tabita Diela

Editor : Erlangga Djumena

[http:// InvestorJepangTertarikBangunPabrikMesinKapal-Kompas.com](http://InvestorJepangTertarikBangunPabrikMesinKapal-Kompas.com). Diakses pada 22 Maret 2015

Rusia Tertarik dengan Gagasan Poros Maritim Jokowi

Rabu, 12 November 2014 / 14:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Federasi Majelis Federal Federasi Rusia Valentina I. Matviyenko menyampaikan ketertarikan negaranya dengan kosep Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim di kawasan Asia Pasifik.

Menurut Matviyenko, gagasan Jokowi ini bisa mendorong perluasan kerjasama di kawasan Asia Pasifik. "Kami lihat sangat tertarik pada prakarsa Presiden Indonesia Jokowi untuk bangun Indonesia sebagai poros maritim di kawasan Asia Pasifik. Ini pasti akan dorong perluasan kerjasama di Asia Pasifik, di mana Rusia dan Indonesia adalah bagian dari kawasan ini," kata Matviyenko di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (13/11/2014) seusai bertemu dengan Wapres Jusuf Kalla.

Ia juga menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Matviyenko lalu menyampaikan sarannya agar program poros maritim Jokowi-Jusuf Kalla bisa berhasil. Menurut dia, agar program ini sukses, Indonesia perlu membangun infrastruktur pelabuhan maupun infrastruktur maritim. "Dan Rusia siap untuk membantu Indonesia dalam bidang ini," kata dia.

Dalam pertemuan hari ini, Matviyenko dan Kalla membahas rencana peningkatan perekonomian kedua negara, terutama mengenai kerjasama perdagangan antara dua negara. Selain membahas perdagangan, mereka membicarakan keikutsertaan perusahaan-perusahaan Rusia dalam melaksanakan proyek-proyek besar di bidang investasi, khususnya dalam pembangunan jalur kereta api di Kalimantan, serta pembangunan pabrik alumunium.

Matviyenko juga mengatakan bahwa pertemuannya dengan Kalla ini membahas kesempatan bagi Rusia untuk ikut serta dalam membangun pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di Indonesia.

"Kerjasama di bidang teknologi canggih, kita juga bahas kesempatan untuk meletakkan sistem satelit Rusia di Indonesia dan juga kesempatan keikutsertaan Rusia dalam pembangkit listrik tenaga nuklir yang pertama," tutur dia.

Di samping itu, pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih satu jam ini membahas kerjasama Rusia dan Indonesia di bidang penanggulangan terorisme internasional.

Kepada media, Matviyenko juga menyebut Indonesia sebagai mitra kuncinya di kawasan Asia Pasifik. Rusia sangat tertarik dengan gagasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim Asia Pasifik.

"Ini pasti akan mendorong perluasan kerjasama di Asia Pasifik, di mana Rusia dan Indonesia adalah bagian dari kawasan ini," kata Matviyenko.

Penulis : Icha Rastika

Editor : Bambang Priyo Jatmiko

<http://RusiaTertarikdenganGagasanPorosMaritimJokowi-Kompas.com>. Diakses pada 22 Maret 2015

Singapura "Kepincut" Ikut Garap Tol Laut Indonesia

Senin, 24 November 2014 / 14:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Singapura "kepincut" untuk ikut menggarap proyek tol laut. Hal itu disampaikan KADIN setelah bertemu dengan delegasi pengusaha Singapura yang dipimpin oleh Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Teo Ser Luck.

"Mereka tertarik investasi di beberapa sektor yang prioritas Presiden Jokowi, misalnya (sektor) maritim karena Singapura punya kemampuan dalam sektor itu," ujar Ketua KADIN Suryo Bambang Sulisto di Jakarta, Senin (24/11/2014).

Lebih lanjut, kata dia, para pengusaha asal negeri singa itu akan datang langsung ke

berbagai daerah di Indonesia untuk melihat prospek investasi.

Setelah berkeliling daerah, pengusaha Singapura juga akan kembali mengadakan pertemuan rutin dengan stakeholder ekonomi Indonesia termasuk dengan KADIN. Saat ditanya apakah KADIN akan ikut mendampingi pengusaha Indonesia, Suryo mengatakan pihaknya menyatakan kesiapannya.

Berdasarkan data BKPM, Singapura merupakan investor terbesar di Indonesia. Selama Januari sampai September 2014, Singapura merealisasikan investasi sebesar 4,89 miliar dollar AS untuk 1.063 proyek. Pada kuartal-III 2014 ini, negara Singa tersebut sudah merealisasikan 1,5 miliar dollar AS untuk 380 proyek. Sementara itu, Jepang menempati posisi kedua dengan investasi sebesar 2,04 miliar dollar AS AS untuk 716 proyek.

Penulis : Yoga Sukmana

Editor : Bambang Priyo Jatmiko

[http:// Singapura'Kepincut'IkutGarapTolLautIndonesia-Kompas.com](http://Singapura'Kepincut'IkutGarapTolLautIndonesia-Kompas.com). Diakses pada 23 Maret 2015

Tiongkok dan Indonesia Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Maritim

Senin, 10 November 2014 | 09:17 WIB

BEIJING, KOMPAS.COM - Presiden Joko Widodo dan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, sepakat untuk meningkatkan kerja sama, khususnya di bidang maritim dan prasarana.

Kedua pemimpin bertemu di Beijing menjelang pertemuan APEC yang akan dimulai Senin (10/11/2014).

Kantor berita *Xinhua* melaporkan Joko Widodo mengatakan kepada Xi Jinping ia berharap Tiongkok akan terus meningkatkan kerja sama dengan prioritas maritim dan infrastruktur.

Jokowi tiba di Beijing Sabtu lalu menjelang pertemuan Pemimpin APEC ke-22.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Michael Tene, mengatakan dalam pertemuan APEC, Indonesia juga akan mendorong agar kelautan menjadi salah satu isu utama

dalam pembahasan berbagai kerja sama.

Setelah menghadiri pertemuan APEC, Joko Widodo juga akan menghadiri pertemuan puncak ASEAN di Myanmar dan pertemuan G20 di Australia.

Selain dengan Joko Widodo, Xi Jinping juga melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Putin dan Xi menandatangani memorandum jaringan pipa baru dari ladang gas Siberia.

Editor : Egidius Patnistik

Sumber : [BBC Indonesia](#)

[http:// TiongkokdanIndonesiaSepakatTingkatkanKerjaSamaMaritim-Kompas.com](http://TiongkokdanIndonesiaSepakatTingkatkanKerjaSamaMaritim-Kompas.com).

Diakses pada 24 Maret 2015

Bangun Sektor Maritim Butuh Dana Rp 2.000 Triliun

Selasa, 21 Oktober 2014 / 11:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelantikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden Republik Indonesia ketujuh membuka harapan besar, terutama di sektor maritim. Pasalnya, ini menjadi salah satu fokus Jokowi ketika kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) .

Dalam pidato perdana yang disampaikan usai acara pelantikan di Gedung MPR/DPR, Senin (20/10/2014) kemarin, Jokowi, mengatakan, pemerintahannya akan mengembalikan kejayaan Indonesia di sektor maritim. Mantan gubernur DKI Jakarta ini bilang sektor maritim ini akan digarap secara maksimal dan menjadi program prioritas nasional. (baca: [Laut Masa Depan Indonesia](#))

Untuk itu, dia meminta semua elemen bangsa bisa bekerja keras mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. "Kini saatnya kita kembali memaksimalkan potensi laut, sudah terlalu lama bangsa Indonesia ini memunggungi laut," kata Jokowi dalam pidatonya di gedung parlemen.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarno Putri menambahkan sektor maritim selama ini seolah dilupakan bangsa Indonesia.

Untuk itu, dia berharap besar Presiden Jokowi dapat melaksanakan janjinya untuk kembali memajukan sektor maritim dalam negeri.

Dolfie OFP, mantan anggota Kelompok Kerja Tim Transisi mengatakan bahwa untuk menggarap sektor maritim ini, pemerintahan Jokowi- Jusuf Kalla dihadapkan pada masalah kebutuhan anggaran yang cukup besar.

Berdasarkan hitungan yang telah dilakukannya bersama Tim Transisi, untuk membangun "jembatan" penghubung di sektor maritim saja, anggaran yang diperlukan selama lima tahun bisa mencapai Rp 2.000 triliun.

Salah satu program maritim yang menjadi andalan Jokowi adalah Tol Laut, yakni pemanfaatan kapal-kapal besar untuk mengangkut barang dan penumpang dalam jumlah besar dan dilakukan secara konsisten sehingga dapat menurunkan biaya logistik.

Namun, untuk merealisasikannya, pemerintah Jokowi-JK diharuskan melakukan pembangunan sejumlah infrastruktur pelabuhan, seperti membangun 24 pelabuhan yang akan disinggahi tol laut ini, terutama pelabuhan yang lokasinya belum tersentuh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) (Persero).

Tol laut diklaim mampu meneken disparitas harga barang kebutuhan pokok antara wilayah Indonesia Barat dengan Indonesia Timur yang selama ini terjadi.

Deputi Kepala Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam, Ridwan Djamaluddin mengatakan selain masalah anggaran yang besar, tantangan besar yang bakal dihadapi Jokowi untuk menerapkan kebijakan sektor maritim adalah minimnya kesiapan pelabuhan yang ada saat ini.

Menurutnya, meskipun jumlah pelabuhan di Indonesia sudah banyak, namun pelabuhan tersebut banyak yang belum memadai secara ekonomi. "Untuk tol laut ini dapat dipastikan pelabuhan-pelabuhan kecil belum siap berperan dalam program tersebut," katanya.

Kementerian Perhubungan (Kemhub) pada tahun 2015 mempunyai program prioritas di sektor kelautan, yakni membangun dan merevitalisasi 50 pelabuhan di kawasan

Indonesia Barat, Tengah, dan Timur.

Selain itu, ada juga pengembangan 86 pelabuhan laut perintis yang fokus pada wilayah Indonesia Timur. (**Agus Triyono**)

Editor : Erlangga Djumena

Sumber : KONTAN

<http://BangunSektorMaritimButuhDanaRp2.000Triliun-Kompas.com>. Diakses pada 24 Maret 2015

b. Kategori Berita Keamanan Laut

Berantas "Illegal Fishing", Bakamla Dapat Hibah 10 Kapal TNI AL

Senin, 12 Januari 2015 / 09:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo menuturkan, pemerintah telah bersepakat dalam pemberantasan *illegal fishing* perlu ada lembaga baru. Badan Keamanan Laut (Bakamla) dibentuk oleh Presiden sesuai dengan Perpres 178/2014, mengacu UU 32/2014 tentang Kelautan.

“Bakamla ini meski baru embrio, namun khusus untuk penanganan *illegal fishing* ini, kita mau coba beroperasi sembari menunggu peraturan pemerintah yang lebih komprehensif,” terang Indroyono, Jakarta, Jumat (9/1/2015).

Dia bilang, pemerintah ingin memperkuat sistem pengawasan, yakni diawali dengan sistem pertukaran informasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI-AL, Polair, Bea Cukai, KPLP dengan Bakamla.

Indroyono menerangkan, Bakamla diprioritaskan untuk menangani *illegal fishing*, sekaligus melihat kemampuan koordinasi dan operasi Bakamla. “Oleh karena itu TNI-AL akan segera menghibahkan 10 kapal patrolinya kepada Bakamla sebagai aset awal, dalam rangka melaksanakan kegiatan keamanan dan keselamatan laut,” ucap Indroyono.

Dalam kesempatan sama, Kepala Bakamla Desi Albert Mamahit membenarkan sejumlah *stakeholders* akan memberikan aset awal kepada Bakamla. Saat ini,

Bakamla baru memiliki aset berupa 3 kapal patroli.

Sejauh ini –saat berbentuk Bakorkamla- Mamahit mengatakan pihaknya harus meminjam bergiliran dari para stakeholders.

“Dalam waktu dekat kita dapat 10 kapal yang akan diberikan oleh TNI-AL. Dari KKP kita akan dapat 3-5 kapal. Dari Kemenko Maritim ada empat kapal. Jadi inilah aset awal Bakamla akan bekerja,” ujar Mamahit.

Dia pun berharap dalam lima tahun ke depan Bakamla bisa memiliki 50-60 kapal.

Penulis : Estu Suryowati

Editor : Erlangga Djumena

<http://Berantas'IllegalFishing',BakamlaDapatHibah10KapalTNI-AL-Kompas.com>.

Diakses 23 Maret 2015

Ini Strategi Susi Pudjiastuti untuk Babat "Illegal Fishing"...

Kamis, 30 Oktober 2014 / 00:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, memastikan akan memberantas para pencuri kekayaan laut Indonesia. Apa strateginya?

"Untuk perusahaan perkapalan yang hanya main *smuggling* (penyelundupan), menangkap tanpa izin, saya pasti babat, saya habiskan," kata Susi dalam konferensi pers, Rabu (29/10/2014).

Menurut Susi, kegiatan penangkapan tanpa izin tersebut bisa merusak lingkungan, dan jelas merugikan negara.

Ini strateginya

Susi memaparkan, kementeriannya akan membenahi data inventarisasi kekayaan laut Indonesia, sekaligus data pelaku usaha di sektor perikanan.

Tujuan pembenahan data itu, kata Susi, adalah untuk menekan angka penangkapan ikan ilegal tersebut. "Karena semuanya terekam," tegas dia.

Belajar dari pengalamannya di bidang penerbangan--capaiannya selain di bidang perikanan--Susi mengatakan semua data pemilik pesawat terbang terekam lengkap di Kementerian Perhubungan. "Saya mau buat hal yang sama di Kelautan dan Perikanan," kata dia.

Selain data-data kapal, Susi juga memerintahkan jajarannya di Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melengkapi pula data inventaris perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

Seluruh jajaran dinas terkait kelautan dan perikanan di seluruh Indonesia, kata Susi, akan segera dia kumpulkan. Pertemuan rutin minimal sebulan sekali juga dia rencanakan.

"Saya tidak mungkin lebih tahu dari orang Jambi soal perikanan di Jambi. Saya tidak mungkin lebih tahu dari orang Papua soal perikanan di Papua. Saya orang yang senang mendapat masukan dari daerah-daerah," tegas dia.

Sebelumnya, dalam diskusi publik bertajuk "Roadmap Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia" di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (29/9/2014), Presiden Joko Widodo menyebutkan, kerugian akibat pencurian hasil laut itu membuat Indonesia mencapai sekitar Rp 300 triliun per tahun.

Penulis : Estu Suryowati

Editor : Palupi Annisa Auliani

<http://IniStrategiSusiPudjiastutiuntukBabat'IllegalFishing'...-Kompas.com>. Diakses pada 23 Maret 2015

Jokowi Sebut "Illegal Fishing" Rugikan Negara Rp 300 Triliun, Ini Respons Susi Pudjiastuti

Selasa, 28 Oktober 2014 | 13:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti merespons cepat pernyataan Presiden Joko Widodo terkait data kerugian akibat pencurian hasil laut perairan Indonesia yang ditaksir mencapai Rp 300 triliun.

"Jumat depan, saya ingin dapat data dulu dari anak buah saya soal itu," ujar Susi di ruang rapat kantor kementeriannya, Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2014) pagi.

Data yang hendak dihimpun dari sang anak buah, lanjut Susi, adalah mengenai jumlah kapal penangkap ikan yang ada di seluruh Indonesia lengkap dengan nama pemiliknya. Apakah kapal itu milik perusahaan atau perseorangan serta status izin operasi kapal-kapal tersebut.

"Dari situ bisa diawasi mana yang bergerak di luar itu. Saya minta semua awasi, kalau kalian lihat ada yang enggak benar, lapor saya," ujar Susi.

Sebelumnya, dalam diskusi publik bertajuk "Roadmap Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia" di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (29/9/2014), Jokowi menyebutkan, kerugian akibat pencurian hasil laut itu membuat Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp 300 triliun setiap tahunnya.

Penulis : Fabian Januarius Kuwado

Editor : Erlangga Djumena

[http://JokowiSebut\"IllegalFishing\"RugikanNegaraRp300Triliun,IniResponsSusiPudjiastuti-Kompas.com](http://JokowiSebut\). Diakses pada 22 Maret 2015

Ratusan Kapal Perang Siap Dikerahkan untuk Tindak "Illegal Fishing"

Kamis, 4 Desember 2014 | 09:07 WIB

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS.com — Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Marsetio menyatakan, semua kapal perang siap dioperasikan untuk menindak penangkapan ikan secara ilegal atau *illegal fishing* sesuai perintah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ia menyebutkan, ada sekitar 147 kapal perang yang siap beroperasi.

"Semua kapal perang kita siap. Memang selama ini ada hambatan di anggaran untuk pemenuhan kebutuhan bahan bakar, tetapi sudah teratasi," kata Marsetio, saat

melakukan kunjungan kerja ke Brigif 3 Markas Piabung, Pesawaran, Rabu (3/12/2014) petang.

Menurut Marsetio, berdasarkan rapat koordinasi terakhir, pemerintah siap memenuhi segala kebutuhan bahan bakar dan operasional kapal. Anggaran untuk itu sudah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015.

Sebelumnya, pemenuhan anggaran operasional dan bahan bakar kapal perang hanya 27 persen dari total kebutuhan anggaran.

Pasca-penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan TNI-AL beberapa waktu lalu, pemerintah berkomitmen memenuhi kebutuhan operasional kapal perang agar bisa menjalankan tugas patroli secara optimal.

Marsetio menjelaskan, ada tiga fungsi TNI-AL dalam menjaga wilayah maritim Indonesia, yaitu penegakan kedaulatan, penegakan hukum, dan diplomasi. Penindakan *illegal fishing* merupakan bagian dari fungsi penegakan hukum di wilayah maritim Indonesia.

Editor : Inggried Dwi

Sumber : Antara

<http://RatusanKapalPerangSiapDikerahkanuntukTindak'IllegalFishing'-Kompas.com>.
Diakses pada tanggal 23 Maret 2015

Ratusan Kapal Perang Siap Dikerahkan untuk Tindak "Illegal Fishing"

Kamis, 4 Desember 2014 | 09:07 WIB

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS.com — Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Marsetio menyatakan, semua kapal perang siap dioperasikan untuk menindak penangkapan ikan secara ilegal atau *illegal fishing* sesuai perintah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ia menyebutkan, ada sekitar 147 kapal perang yang siap beroperasi.

"Semua kapal perang kita siap. Memang selama ini ada hambatan di anggaran untuk

pemenuhan kebutuhan bahan bakar, tetapi sudah teratasi," kata Marsetio, saat melakukan kunjungan kerja ke Brigif 3 Markas Piabung, Pesawaran, Rabu (3/12/2014) petang.

Menurut Marsetio, berdasarkan rapat koordinasi terakhir, pemerintah siap memenuhi segala kebutuhan bahan bakar dan operasional kapal. Anggaran untuk itu sudah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015.

Sebelumnya, pemenuhan anggaran operasional dan bahan bakar kapal perang hanya 27 persen dari total kebutuhan anggaran.

Pasca-penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan TNI-AL beberapa waktu lalu, pemerintah berkomitmen memenuhi kebutuhan operasional kapal perang agar bisa menjalankan tugas patroli secara optimal.

Marsetio menjelaskan, ada tiga fungsi TNI-AL dalam menjaga wilayah maritim Indonesia, yaitu penegakan kedaulatan, penegakan hukum, dan diplomasi. Penindakan *illegal fishing* merupakan bagian dari fungsi penegakan hukum di wilayah maritim Indonesia.

Editor : Inggried Dwi

Sumber : Antara

<http://RatusanKapalPerangSiapDikerahkanuntukTindak'IllegalFishing'-Kompas.com>.
Diakses pada tanggal 23 Maret 2015

Dubes: Amerika Siap Bantu Pertahanan Maritim Indonesia

Rabu, 19 November 2014 | 14:37 WIB

DEPOK, KOMPAS.com- Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Robert Orris Blake menyatakan, negaranya siap untuk membantu pertahanan wilayah maritim Indonesia seiring dengan konsep poros maritim dunia Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kami siap untuk bekerja sama di wilayah maritim untuk menyokong visi Presiden [Jokowi](#) (tentang Indonesia poros maritim dunia)," kata Blake saat memberikan kuliah umum di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Rabu (19/11/2014), seperti dikutip *Antara*.

Ia menjamin Amerika siap memberikan peningkatan keamanan di wilayah perairan Indonesia dengan sumber daya dari angkatan militer Amerika.

Blake mengatakan, Amerika akan memberikan bantuan semacam pelatihan militer khusus untuk meningkatkan pertahanan Tentara Nasional Indonesia.

"Sokongan pertahanan tersebut bisa berupa pelatihan militer khusus," ujar Blake.

Selain itu, ia juga menyebutkan siap memberikan bantuan peralatan untuk memperkuat pertahanan di wilayah perairan.

"Ini untuk memastikan keamanan wilayah perairan Indonesia, dan untuk mencegah penangkapan ikan oleh kapal asing," kata Blake.

Ia menyebutkan, pertahanan wilayah perairan Indonesia menjadi penting mengingat letak geografis Indonesia yang dikelilingi oleh lautan. Apalagi, Indonesia sedang membentuk konsep poros maritim dunia.

Blake mengatakan, Indonesia mempunyai tantangan yang besar dalam bidang pertahanan wilayah perairan ketika berbagai kapal secara global melintasi wilayah Indonesia.

Editor : Sandro Gatra

Sumber : Antara

<http://DubesAmerikaSiapBantuPertahananMaritimIndonesia-Kompas.com>. Diakses pada 22 Maret 2015

Jokowi: Anggaran Pertahanan Tergantung Pertumbuhan Ekonomi

Jumat, 7 November 2014 | 15:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, peningkatan anggaran untuk pertahanan akan bergantung pada pertumbuhan ekonomi

Indonesia. Peningkatan anggaran pertahanan, menurut [Jokowi](#) akan disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah dalam menjadikan Indonesia sebagai poros maritim.

"Sudah berkali-kali saya sampaikan, kalau pertumbuhan ekonomi kita bertumbuh diatas tujuh, anggaran pertahanan kita bisa 3 kali lipat daripada yang sekarang. Kalau ndak ya dari mana anggarannya?" ujar Jokowi, se usai melakukan ibadah shalat, di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (7/11/2014).

Se usai mengunjungi pameran peralatan militer dan pertahanan Indo Defence 2014 Forum & Expo, Jokowi mengatakan, pemerintah akan mengadakan kerja sama dengan negara-negara lain dalam bidang pertahanan. Kerja sama tersebut, menurut Jokowi, akan mampu meningkatkan kualitas teknologi alat utama sistem persenjataan Indonesia.

Selain itu, terkait program kemaritiman, Jokowi mengatakan, akan mempersiapkan berbagai hal yang nantinya akan digunakan untuk mendukung program tersebut. Dalam hal ini termasuk peningkatan anggaran dalam bidang pertahanan.

"Disiapkan hal-hal yang dipakai untuk mendukung program itu, baik poros maritimnya atau lautnya. Nanti akan dilihat kalau nanti sudah dimulai," kata Jokowi.

Saat ditanya terkait masalah keamanan di wilayah laut dan udara, Ia mengatakan, pemerintah akan segera menambah armada, berupa kapal-kapal patroli.

"Itu yang akan kita tambah. Kita perlu itu, kalau tidak, bagaimana kita mengendalikan 5400 kapal yang tiap hari lalu-lalang dan banyak yang enggak jelas daripada yang jelas," kata Jokowi.

Seperti diketahui, Jokowi telah mengamanatkan seluruh kabinetnya untuk menjadikan landasan maritim sebagai tujuan utama pembangunan. Dalam membangun landasan tersebut, salah satu bidang yang terkait adalah bidang pertahanan.

Penulis : Abba Gabrillin

Editor : Fidel Ali Permana

<http://JokowiAnggaranPertahananTergantungPertumbuhanEkonomi-Kompas.com>.Diakses pada 22 Maret 2015

Jokowi Minta Penuntasan Hukum atas 5 Kapal Asing yang Ditangkap TNI

Rabu, 5 November 2014 / 17:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Marsetio mengatakan telah melaporkan penangkapan lima kapal asing yang menerobos perairan Indonesia kepada Presiden Joko Widodo. Menurut Marsetio, [Jokowi](#) meminta agar proses hukum atas lima kapal asing itu dituntaskan.

"Kita proses. Kita ada rapat juga di kabinet dipimpin Bapak Presiden bagaimana agar semua *stake holder* sama-sama mengatasi ini," kata Marsetio di sela-sela pameran produk pertahanan Indo Defence 2014 di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2014).

Ia mengatakan, Presiden Jokowi mengapresiasi keberhasilan TNI AL menangkap lima kapal asing yang melanggar perbatasan perairan dalam waktu sepekan. Namun, harus ada proses hukum lanjutan sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga hal serupa tak terjadi lagi.

"Kalau kita tangkap, penyelesaiannya juga harus tuntas. Kita sebagai aparat penegak hukum di laut, kalau ada yang melanggar, tangkap. Melanggar aturan kita, melanggar wewenang kita, tangkap," kata dia.

Marsetio menyadari bahwa pertahanan di wilayah perairan Indonesia adalah salah satu faktor penting bagi pemerintahan Jokowi bersama Jusuf Kalla untuk mewujudkan visi maritim. Ke depan, TNI AL akan berupaya menambah alutsista demi pertahanan yang lebih baik.

"Kita harus punya kekuatan laut yang besar, yang bisa melindungi aset-aset kita yang ada, melindungi kedaulatan negara kita," ujarnya.

Sejak akhir Oktober hingga awal November 2014, TNI AL telah menangkap lima kapal laut asing. Berdasarkan siaran pers Pusat Penerangan Mabes TNI yang diterima *Kompas.com* pada Selasa (4/11/2014), lima kapal asing itu adalah KM Sudita 11, KM Cahaya Baru, serta tiga unit kapal asing dengan nama KG90433TS.ATS006, KG94366TS.ATS 005, dan KG94266 TS.ATS012.

"Lima kapal itu melanggar wilayah perairan Indonesia. Lima kapal itu juga tak dilengkapi dokumen yang sah," ujar Kadispenum Puspen TNI Kolonel Bernadus Robert.

KM Sudita ditahan pada 3 November 2014 oleh Satuan Kapal Cepat Komando Armada RI Kawasan Barat. Kapal itu berbendera Thailand. Adapun KM Cahaya Baru ditangkap pada 31 Oktober 2014 di perairan utara Sumatera. Kapal itu berlayar dari Pasir Gudang, Johor, Malaysia, dengan tujuan Batam. Pada hari yang sama, TNI kembali menahan tiga kapal ikan asing. Saat ditahan, tiga kapal dengan berbendera Vietnam tersebut tengah melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan utara Sumatera.

Penulis : Ihsanuddin

Editor : Laksono Hari Wiwoho

<http://JokowiMintaPenuntasanHukumatas5KapalAsingyangDitangkapTNI-Kompas.com>. Diakses pada 23 Maret 2015

Menteri Susi: Nelayan Asing Mulai "Ketar-ketir" Masuk ke Indonesia

Kamis, 27 November 2014 | 17:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Langkah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melakukan moratorium izin operasi kapal ikan yang memiliki berat di atas 30 gross tonnage (GT) membuahkan hasil.

Dalam Sidang Dewan Kelautan Indonesia (Dekin) di Gedung Minabahari I Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kamis (27/11/2014), Susi menceritakan bahwa pelaksanaan moratorium selama sebulan ini membuat pasokan ikan terjaga.

"Moratorium, saya baru lakukan sebulan ini, pengaruhnya luar biasa. Banyak tengkulak heran. Harusnya sekarang paceklik, kok ini ikan banyak," tutur Susi.

Penghentian penerbitan izin kapal penangkap ikan dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan lantaran Susi menilai bahwa kapal asing tanpa izin acap kali

mengambil kesempatan dari lemahnya penegakan hukum maritim di Indonesia.

Terbiasa menghadapi hukum Indonesia yang permisif, Susi pun tidak menampik bahwa peraturan tersebut membuat pihak asing gentar. "Policy yang saya buat sudah dapatkan artikel analisis positif. Walaupun mereka (negara asing) ketar-ketir, tapi mereka tahu *this is Indonesia's right, stating and announcing what Indonesia wants,*" ujar Susi.

Di sisi lain, beriringan dengan ketakutan sebagian negara asing, sambutan positif juga berdatangan. Sambutan tersebut datang dari negara asing yang mengerti hak Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat, dan juga datang dari nelayan dan pengusaha kecil di dalam negeri.

"Dari lima yang kontra, ada 500 yang pro. Mereka bilang, 'Ibu Susi terima kasih, saya akan menghidupkan kembali usaha *cold storage* saya. Para pengepul ikan juga begitu,'" imbuh Susi.

Kepada peserta Sidang Dekin, Susi juga menekankan bahwa Indonesia tidak boleh dan tidak bisa membiarkan kapal-kapal asing memboyong ikan-ikan dari Indonesia secara ilegal. "*We have to stop this at all cost.* Kita tidak memperbolehkan *illegal fishing* terjadi lagi di lautan kita," pungkasnya.

Penulis : Tabita Diela

Editor : Bambang Priyo Jatmiko

<http://MenteriSusiNelayanAsingMulai'Ketar-ketir'MasukkeIndonesia-Kompas.com>.

Diakses pada 24 Maret 2015

Moratorium Berdampak, Aktivitas Kapal Bekas Impor Berkurang

Selasa, 2 Desember 2014 | 11:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan moratorium izin kapal dan penanganan penangkapan ikan ilegal mulai berdampak. Di lapangan, jumlah kapal bekas impor yang berada di perairan Indonesia berkurang drastis. Beberapa negara juga mulai merespons kebijakan Indonesia tersebut.

"Dari sistem pemantauan kapal perikanan diketahui, pada 15 Oktober terdapat 933 kapal eks asing berada di perairan Indonesia. Namun, setelah moratorium

diberlakukan diketahui, pada 19 November hanya tinggal 164 kapal,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi, di Jakarta, Senin (1/12/2014).

Ia menyebutkan, ada beberapa kemungkinan terkait dengan kapal-kapal itu. Sebagian kembali ke negara asalnya dan sebagian lagi bersembunyi dengan mematikan pemancar.

”Namun, kalau saja pemancar itu dimatikan, kami masih bisa mengetahui keberadaannya,” kata Susi menyebut dampak kebijakannya untuk memerangi penangkapan ikan secara ilegal.

Ia juga menyebutkan, beberapa kedutaan telah meminta maaf atas perilaku nelayannya dan menghormati keputusan Indonesia.

Dampak lainnya, kini pengusaha yang benar-benar ingin berinvestasi di sektor perikanan mulai berdatangan. Mereka menyatakan, dengan kebijakan itu, para pemilik kapal akan merasa terproteksi.

”Pemilik kapal ada yang menceritakan, selama ini, ketika pulang, kapal hanya mendapat muatan separuh. Mereka merasa ditipu karena anak buah kapal menjual separuh muatan sebelum kembali.

Susi juga menceritakan, para pemilik kapal dan pedagang di sejumlah daerah mulai mudah mendapatkan berbagai jenis ikan.

Minat investasi

Di tempat terpisah, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto, dalam konferensi pers, di Jakarta, mengatakan, pihaknya berencana menggelar Rapat Pimpinan Nasional Kadin Indonesia bertema ”Mengembalikan Kejayaan Ekonomi Maritim untuk Kesejahteraan Rakyat” pada 8-9 Desember 2014.

Suryo mengatakan, Kadin Indonesia berkewajiban menyesuaikan program ke depan yang diselaraskan dan disinergikan dengan program-program pemerintah. (SAN/NAD/LKT/MAR).

Editor : Erlangga Djumena

Sumber : [KOMPAS CETAK](#)

<http://MoratoriumBerdampak,AktivitasKapalBekasImporBerkurang-Kompas.com>.
Diakses pada 23 Maret 2015

Rencana "Drone" Jokowi Didukung Konsorsium Eropa

Penulis: Reska K. Nistanto | *Selasa, 4 November 2014 | 16.35 WIB*

JAKARTA, KOMPAS.com — Salah satu fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah pembangunan di bidang maritim. Salah satu program yang pernah diutarakan Jokowi dalam kampanyenya adalah memanfaatkan *drone* atau UAV (*unmanned aerial vehicle*/pesawat terbang tanpa awak) untuk menjaga wilayah laut Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Martin Elbourne, Business Development Eurofighter GmbH, mengatakan bahwa pihaknya siap mendukung rencana tersebut baik dari sisi *hardware* maupun *software*.

Untuk diketahui, Eurofighter GmbH adalah konsorsium perusahaan perakit pesawat terbang Eropa yang berpartisipasi dalam pameran pertahanan Indo Defence 2014 sekaligus memperkenalkan produk pesawat tempurnya, Eurofighter Typhoon.

Terkait rencana skuadron UAV yang pernah diutarakan oleh Presiden Joko Widodo, Martin mengatakan, konsorsium Eurofighter memiliki dukungan teknologi untuk mewujudkannya.

"UAV itu terdiri atas pesawat, *software*, *ground control*, serta *datalink* untuk menghubungkan ketiganya. Ini bisa menjadi bagian dari transfer teknologi yang bisa diberikan Eurofighter," demikian ujar Martin saat dijumpai *KompasTekno* di sela acara pengenalan pesawat Eurofighter Typhoon di Jakarta, Senin (3/11/2014).

Pesawat tanpa awak tersebut bisa digunakan oleh Pemerintah RI untuk berbagai kepentingan, seperti patroli maritim, menjaga wilayah perbatasan, serta memantau aktivitas *illegal fishing* atau *illegal logging*.

"Begitu *drone* menangkap kegiatan yang tidak diinginkan, ia bisa mengirim pesan ke *ground control* agar mengirim pesawat tempur untuk melakukan tindakan pencegahan. Dengan begitu, akan lebih menghemat operasi," terang Martin.

Martin menambahkan, menurut dia, Pemerintah Indonesia bisa saja merakit pesawat *drone* sederhana, sementara untuk *software* dan peranti pendukung lain bisa disediakan oleh Eurofighter.

Menurut Martin, Pemerintah Indonesia tidak perlu lagi membangun sistem yang baru (atau istilahnya *reinvent the wheel*), tinggal menggunakan saja sistem yang sudah dimiliki Eurofighter dan disesuaikan dengan kebutuhannya.

"Yang terpenting Pemerintah Indonesia mengetahui prioritasnya, serta menggunakan sumber daya yang ada dengan tepat," ujar Martin.

Editor: Wicak Hidayat

<http://Rencana'Drone'JokowiDidukungKonsorsiumEropa-Kompas.com>. Diakses pada 23 Maret 2015

c. **Kategori Berita Kesejahteraan Nelayan**

100 Kades Berkumpul di Yogya Bahas soal Kesejahteraan Nelayan

Jumat, 14 November 2014 | 20:10 WIB

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Sedikitnya 100 kepala desa dari kampung-kampung nelayan yang ada di Indonesia, berkumpul di Yogyakarta. Mereka berdiskusi membuat pemetaan persoalan para nelayan yang menjadi warganya dan berupaya mencari solusi.

Acara yang diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan ini merupakan langkah terobosan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup para nelayan yang umumnya masih terpinggirkan.

"Ini merupakan upaya membangun Indonesia dari pinggiran melalui desa-desa di wilayah pesisir. Kami langsung menemui lapisan tingkat bawah seperti ini. Para kades dan pimpinan TPI jelas mengetahui permasalahan riil yang dihadapi para nelayan," kata Zaini Hanafi, direktur Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan KKP,

Jumat (14/11/2014).

Lebih lanjut Zaini mengatakan, proram ini merupakan langkah awal untuk mewujudkan konsep 1.000 Kampung Nelayan yang Mandiri, Tangguh, Indah dan Maju atau dikenal dengan nama Sekaya Maritim yang merupakan janji kampanye Presiden Jokowi.

“Target kita pada tahun 2015 kita dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan di 100 kampung nelayan, 200 kampung nelayan di tahun 2016, 300 kampung nelayan di tahun 2017, hingga akhir tahun 2019 mendatang kita harapkan 1.000 kampung nelayan dapat selesai kita kerjakan,” lanjut Zaini.

Dalam melaksanakan program ini, lanjut Zaini, KKP tidak bekerja sendiri, tetapi dibantu 12 kementerian lain.

Zaini menjelaskan, para kades dan nelayan yang dikumpulkan ini diharapkan mampu memberikan data konkret mengenai persoalan-persoalan yang dihadapi di wilayahnya. Dari data tersebut pihaknya akan memetakan alokasi kebutuhan-kebutuhan yang nantinya akan dikomunikasikan dengan 12 kementerian lain tersebut.

"Misalnya di kampung nelayan tertentu akses jalannya buruk hingga menghambat proses produksi, maka persoalan ini akan kita teruskan ke Kementerian PU. Sementara kampung nelayan lain menghadapi persoalan dengan tingkat pendidikan warganya yang rendah, maka kami akan teruskan ke Kementerian Pendidikan, begitu seterusnya," jelasnya.

Pada kesempatan tersebut Zaini juga mengatakan bahwa Indonesia saat ini memiliki 816 tempat pelelangan ikan atau TPI, dan program 1.000 kampung nelayan tersebut baru akan menyentuh sekitar 300 TPI di antaranya.

“Jika rata-rata dalam satu TPI ada 500 keluarga nelayan, maka selama lima tahun pemerintahan program Sekaya Maritim ini akan mampu meningkatkan kualitas hidup sekitar 15.000 keluarga nelayan. Jika dalam satu keluarga rata-rata terdiri dari 5 jiwa, maka program ini akan meningkatkan kesejahteraan hidup 75 ribu jiwa,” pungkasnya.

Penulis : Kontributor Yogyakarta, Gandang Sajarwo

Editor : Farid Assifa

<http://100KadesBerkumpuldiYogyaBahassoalKesejahteraanNelayan-Kompas.com>.
Diakses pada 24 Maret 2015

Dapat Dukungan dari Perbankan, Menteri Susi Malah "Agak Khawatir"

Kamis, 27 November 2014 | 18:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komitmen Presiden Joko Widodo untuk memfokuskan pemerintahannya pada eksplorasi kemaritiman, mendorong industri keuangan memberi perhatian lebih besar terhadap sektor ini.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga melakukan upaya mendorong peran industri jasa keuangan dalam membiayai industri kemaritiman. Namun demikian, besarnya dukungan itu malah membuat ragu Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Menurut Susi, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pelaku usaha di sektor maritim sebelum mampu memberikan timbal balik sepadan bagi industri jasa keuangan. "Saya senang, namun saya sedikit khawatir. Ini yang sebetulnya ironi. Banyak momentum kesempatan yang kita lewati tanpa menghasilkan sesuatu yang sebetulnya bisa menjadi titik balik hasil kelautan Indonesia," ujar Susi di kompleks Bank Indonesia, Kamis (26/11/2014).

Susi mengatakan, selama ini ada banyak salah kelola di sektor perikanan. Beberapa hal mendasar, seperti kebutuhan asuransi untuk nelayan juga belum pernah serius dipertimbangkan. Padahal, nelayan membutuhkan asuransi untuk menghadapi bencana alam dan gangguan kesehatan.

"Nelayan Indonesia persoalannya untuk investor tidak terlalu menarik karena kondisinya sekarang kita mau menghadapi single market, ASEAN *single market*. Global market juga kita tidak akan tahan lama-lama," ujarnya.

Penulis : Tabita Diela

Editor : Bambang Priyo Jatmiko

<http://DapatDukungandariPerbankan,MenteriSusiMalah'AgakKhawatir'-Kompas.com>. Diakses pada 25 Maret 2015

Ini yang Didapatkan Nelayan dari Pengalihan Subsidi BBM

Selasa, 18 November 2014 / 22:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo mengatakan, pemerintah kini memiliki dana yang cukup untuk memajukan sektor perikanan. Dana itu berasal dari pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Menurut Indroyono, dana itu digunakan untuk membeli sejumlah peralatan baru bagi para nelayan.

"Pengalihan subsidi BBM ini digunakan untuk memberikan mesin baru, jaring tangkap baru, dan memberikan *cool boxes* kepada nelayan-nelayan," ujar Indroyono di Istana Kepresidenan, Selasa (18/11/2014).

Indroyono mengatakan, rincian alokasi anggaran untuk fasilitas baru nelayan ini diurus lebih lanjut oleh Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti. Namun, fasilitas itu akan langsung diberikan kepada para nelayan yang sudah memiliki kartu subsidi khusus nelayan pada bulan November-Desember 2014 ini.

Pemerintah mengklaim sudah membagikan sekitar 6.000 kartu kepada para nelayan di Jawa Tengah.

"Mereka bisa langsung meningkatkan daya produksi mereka," katanya.

Selain memberikan fasilitas baru, pemerintah juga akan menyelesaikan pembagian Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera sebagai upaya untuk mengurangi beban nelayan. Tak hanya untuk meningkatkan sektor perikanan, Indroyono mengatakan, pemerintah juga akan mulai meningkatkan pengawasan di laut.

"Kita harus satu mata uang dengan dua sisi. Kalau kesejahteraan meningkat, keamanan juga harus ditingkatkan. Jadi, sama-sama kita tingkatkan anggarannya untuk kesejahteraan, tapi tidak lupa juga untuk pengamanan lautnya," kata Indroyono.

Seperti diketahui, pemerintah telah menaikkan harga BBM premium dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 dan solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500. Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengungkapkan, dari peningkatan harga BBM subsidi itu, pemerintah berhasil menghemat pengeluaran untuk subsidi BBM sampai Rp 120 triliun.

Dana itu nantinya akan digunakan untuk sektor produktif, seperti pertanian, infrastruktur, perikanan, hingga pendidikan dan kesehatan.

Penulis : Sabrina Asril

Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

<http://IniYangDidapatkanNelayandariPengalihanSubsidiBBM-Kompas.com>. Diakses pada 23 Maaret 2015

Koordinasi Kementerian Dianggap Penting untuk Kembangkan Desa Pesisir

Senin, 26 Januari 2015 / 06:36 WIB

TANGERANG, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan, pemerintah akan melakukan koordinasi untuk mengelola dan mengembangkan desa di kawasan pesisir. Pengembangan desa di kawasan pesisir dianggap penting untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

"Bukan hanya Kementerian Desa, semua Kementerian terkait harus ikut berdayakan desa pesisir untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia," kata Marwan saat berada di permukiman nelayan desa Surya Bahari di Tangerang, Banten, Minggu (25/1/2015).

Menurutnya, banyak desa pesisir yang belum mendapat perhatian maksimal dan belum diberdayakan. Warga desa pesisir yang mayoritas nelayan juga menghadapi berbagai masalah yang tidak mungkin diatasi tanpa uluran tangan pemerintah.

Di Desa Surya Bahari misalnya, dia mendengar berbagai keluhan para nelayan. Di antaranya, mengenai pendangkalan kali menuju laut yang menyebabkan mereka kesulitan saat hendak keluar menangkap ikan. Apalagi kapal nelayan jumlahnya terus bertambah.

"Pengerukan kali itu misalnya, merupakan wewenang kementerian lain. Kita tentu akan berkoordinasi agar Semua harus dikerjakan serius dan serba terukur. Kapan pengerukan dimulai, selesai dan seterusnya," ucapnya.

Presiden [Jokowi](#) sendiri pernah menyampaikan lima pilar utama yang diagendakan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia. Kelima pilar tersebut adalah membangun kembali budaya maritim Indonesia, menjaga dan mengelola sumber daya laut, memprioritaskan pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, melaksanakan diplomasi maritim, serta membangun kekuatan pertahanan maritim.

Editor : Bayu Galih

<http://KoordinasiKementerianDianggapPentinguntukKembangkanDesaPesisir-Kompas.com>. Diakses pada 24 Maret 2015

Nelayan Kita

Rabu, 19 November 2014 / 21:24 WIB

PEMERINTAHAN Joko Widodo-Jusuf Kalla menekankan pembangunan sektor kemaritiman sebagai salah satu fokus Kabinet Kerja.

Tampaknya blusukan menjadi ciri para anggota Kabinet Kerja, termasuk menteri yang berada di bawah koordinasi Menko Kemaritiman. Namun, sesungguhnya blusukan akan lebih efektif jika dibarengi dengan pemahaman komprehensif tentang peta kependudukan Indonesia.

Tujuannya tentu saja untuk memperoleh gambaran secara jelas kondisi dan karakteristik penduduk yang menjadi subyek dan obyek kebijakan. Tanpa memahami situasi makro kependudukan, pemahaman masalah menjadi parsial dan efektivitas kebijakan kurang optimal.

Nelayan dalam angka

Meskipun sektor kemaritiman berdimensi luas, mencakup perikanan, energi, pertambangan, pariwisata, transportasi, dan sebagainya, subsektor perikanan tampaknya perlu menjadi salah satu fokus kebijakan kemaritiman pemerintah. Gambaran umum mengenai kehidupan nelayan yang notabene tinggal di kawasan pesisir menjadi informasi dasar dalam menyusun perencanaan sektor kemaritiman ke depan.

Berdasarkan data Survei Sosial dan Ekonomi Nasional 2013 (Badan Pusat Statistik) yang diolah, diketahui bahwa hanya 2,2 persen rumah tangga di Indonesia yang memiliki kepala rumah tangga berprofesi sebagai nelayan. Jumlahnya sekitar 1,4 juta kepala rumah tangga nelayan.

Rata-rata jumlah anggota rumah tangga di Indonesia sekitar empat orang. Maknanya, ada sekitar 5,6 juta penduduk Indonesia yang kehidupannya bergantung kepada kepala rumah tangga yang berprofesi sebagai nelayan.

Sementara secara keseluruhan jumlah nelayan di Indonesia diperkirakan sebanyak 2,17 juta (hanya 0,87 persen tenaga kerja). Ada sekitar 700.000 lebih nelayan yang berstatus bukan sebagai kepala rumah tangga. Sebagian besar nelayan tinggal tersebar di 3.216 desa yang terkategori sebagai desa nelayan (mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan).

Secara geografis, nelayan ada di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini tidak mengherankan mengingat dua per tiga wilayah Indonesia adalah lautan serta memiliki potensi perikanan sangat besar.

Provinsi dengan jumlah nelayan paling banyak di Indonesia ialah Provinsi Jawa Timur (mencapai lebih dari 334.000 nelayan), diikuti Jawa Tengah (lebih dari 203.000 nelayan) dan Jawa Barat (sekitar 183.000 nelayan). Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Aceh berturut-turut menjadi provinsi dengan jumlah nelayan terbanyak ke-4, ke-5, dan ke-6 di Indonesia. Jumlah nelayan paling sedikit ditemui di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Maluku Utara.

Ironisnya, walaupun seafood menjadi salah satu makanan favorit yang mahal, tingkat kesejahteraan nelayan umumnya lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang

berprofesi bukan sebagai nelayan. Rata-rata pengeluaran nelayan hanya sekitar Rp 561.000 per bulan, lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang bukan nelayan dengan rata-rata pengeluaran sebesar Rp 744.000 per bulan.

Tingkat upah nelayan juga hanya sekitar Rp 1,1 juta per bulan, sedikit di bawah pekerja bukan nelayan yang memiliki upah Rp 1,2 juta per bulan. Namun, ada sedikit kabar menggembirakan, yaitu lebih dari 84 persen rumah tangga nelayan memiliki rumah sendiri. Bandingkan dengan kenyataan bahwa hanya 79 persen rumah tangga bukan nelayan yang memiliki rumah sendiri. Meskipun demikian, data ini sesungguhnya tidak menunjukkan bagaimana kualitas rumah yang dimiliki nelayan. Kenyataan lain, komunikasi bukan menjadi hambatan bagi para nelayan karena sekitar 83 persen nelayan memiliki telepon seluler.

Para nelayan kurang beruntung ditinjau dari aspek pendidikan, dengan hampir 70 persen nelayan berpendidikan sekolah dasar ke bawah dan hanya sekitar 1,3 persen yang berpendidikan tinggi. Pemerintah juga perlu memperhatikan aspek kesehatan para nelayan.

Makna jumlah nelayan

Survei Sosial dan Ekonomi Nasional 2013 menunjukkan bahwa sekitar 25 persen nelayan mengalami gangguan kesehatan dalam satu bulan terakhir saat disurvei. Sebagian dari mereka menyatakan bahwa gangguan kesehatan tersebut mengganggu aktivitas mereka mencari nafkah sehingga berdampak pada ekonomi rumah tangganya. Hanya 54 persen nelayan yang memiliki jaminan kesehatan sehingga istilah "sadikan" (sakit sedikit miskin) menjadi problem para nelayan.

Rumah tangga nelayan juga cenderung memiliki anak lebih banyak dibandingkan dengan rumah tangga bukan nelayan. Program Keluarga Berencana (KB) jelas penting bagi kehidupan para nelayan guna meningkatkan kesejahteraan mereka dalam jangka panjang.

Secara umum, jumlah tenaga kerja yang memilih pekerjaan sebagai nelayan kurang dari 1 persen dan mereka memiliki kehidupan yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan para pekerja lainnya secara rata-rata. Sementara data Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) tahun 2006 menyebutkan, ada sekitar 6,2 juta penduduk Indonesia terlibat dalam kegiatan perikanan.

Bagaimanapun, jumlah nelayan yang sedikit menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia tidak berorientasi pada laut sebagai sumber penghidupan. Menjadi nelayan bukanlah pilihan pekerjaan yang menarik karena mungkin nelayan identik dengan kemiskinan.

Tidak mengherankan apabila jarang sekali kita mendengar seorang anak bercita-cita menjadi nelayan. Padahal, kita meyakini bahwa dari laut kita bisa membangun kesejahteraan. Membangun negara maritim yang tangguh tentunya diawali dengan membangun nelayan yang sejahtera. Jika menjadi nelayan memberikan jaminan kesejahteraan, profesi ini dapat menjadi pilihan menarik bagi angkatan kerja di Indonesia yang berlimpah.

Nelayan kita terjebak dalam perangkap kemiskinan yang pelik. Mereka tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan dan kesehatan. Mereka juga kesulitan mendapatkan akses kredit karena sebagian besar bank beranggapan bahwa pinjaman bagi nelayan berisiko tinggi (survei Lembaga Demografi di Sulawesi Utara, 2014).

Hanya 2,34 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang berasal dari perikanan laut (BPS, 2013). Kontribusi sektor perikanan terhadap PDB selama periode 2010-2012 bahkan stagnan di angka 2,33 persen.

Kondisi ini jelas jauh dari memadai mengingat luas laut Indonesia mencapai 3.257.483 kilometer persegi (belum termasuk perairan zona ekonomi eksklusif/ZEE) dengan panjang garis pantai 81.497 kilometer. Bagaimanapun, peningkatan kesejahteraan nelayan dan kontribusi sektor maritim terhadap perekonomian menjadi salah satu barometer penting keberhasilan pemerintahan JKW-JK dalam membangun Indonesia yang lebih hebat.

Sonny Harry B Harmadi

Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia; Ketua Umum Koalisi Kependudukan

Sumber : [KOMPAS CETAK](#)

<http://NelayanKita-Kompas.com>. Diakses pada 24 Maret 2015

Nelayan, "Drone", dan Poros Maritim

Kamis, 6 November 2014 | 21:45 WIB

KOMPAS.com - DENGAN segala pengalamannya, nelayan Indonesia seharusnya dilihat sebagai salah satu entitas masyarakat yang paling memahami kondisi laut Indonesia. Kenyataannya, posisi nelayan masih dianggap sebagai kelompok ekonomi subsistem yang identik dengan kemiskinan.

Padahal, laut Indonesia adalah poros maritim dunia: berada di posisi strategis di persimpangan utama perdagangan laut dunia. Dari 80 persen perdagangan dunia yang melalui laut, 60 persennya—setara dengan 12.000 kapal setiap tahun—melewati laut Indonesia (Riza, 2014).

Potensi laut Indonesia mencapai Rp 14.994 triliun meliputi aktivitas perikanan (Rp 3.194 triliun), wilayah pesisir lestari (Rp 5.600 triliun), tambang (Rp 664 triliun), industri bioteknologi (Rp 4.000 triliun), pelabuhan (Rp 2.000 triliun), dan pariwisata (Rp 200 triliun) (Kompas, 6/11/2009).

Sayang, potensi ini belum digarap optimal. Aspek perikanan, misalnya, hanya menyumbang 3,1 persen atau Rp 227.761 miliar untuk produk domestik bruto (PDB). Sepanjang 2007-2011, kenaikan rata-rata nilai produksi perikanan hanya 16,20 persen atau Rp 76,357 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp 136,567 triliun pada tahun 2011 (KKP, 2012).

Faktor penghambat

Beberapa faktor penyebab adalah pembangunan infrastruktur pelabuhan perikanan yang tidak merata dan kurangnya penggunaan teknologi tepat guna untuk menunjang aktivitas perikanan.

Hingga saat ini, Indonesia hanya memiliki 816 pelabuhan perikanan yang meliputi pelabuhan perikanan samudra, pelabuhan perikanan Nusantara, dan pelabuhan perikanan pantai.

Dari total pelabuhan perikanan, hanya 564 yang beroperasi penuh dan lebih banyak yang beroperasi di bagian barat Indonesia (KKP, 2013). Padahal, potensi perikanan di bagian Indonesia timur jauh lebih melimpah dan belum dikelola maksimal.

Kedua, luasnya wilayah laut Indonesia merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah. Pengawasan terhadap segala aktivitas perikanan di laut menjadi sangat penting.

Namun, pengawasan dirasa kurang karena aktivitas perikanan ilegal (illegal fishing) sangat tinggi. Dari 27 kapal pengawasan yang dimiliki Indonesia, 10 kapal beroperasi di bagian barat dan 11 lainnya di bagian timur.

Sementara enam lainnya berukuran kecil, tiga beroperasi di bagian barat, dan sisanya di bagian timur. Kapal-kapal pengawas ini tidak memiliki kemampuan teknologi memadai sehingga tidak berdaya menghadapi kapal-kapal asing di perairan Indonesia.

Ketiga, keterlibatan masyarakat nelayan dalam aktivitas perikanan nasional masih sangat minim. Masyarakat nelayan kita masih dianggap sebagai obyek, bukan subyek di dalam undang-undang sehingga peran mereka hanya terbatas pada aktivitas penangkapan ikan semata.

Ketiga hal ini tentu menjadi pekerjaan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintahan baru, terutama dalam mewujudkan cita-cita menjadi poros maritim dan produsen pangan berbasis kelautan.

Peran nelayan

Undang-undang yang sama tentang perikanan (Pasal 1 Ayat 10), nelayan (kecil) memiliki arti orang yang mata pencariannya menangkap ikan menggunakan kapal maksimal 5 gros ton.

Definisi ini tentu mempersempit profesi nelayan yang dalam realitasnya memiliki banyak aktivitas selain penangkapan ikan. Definisi ini juga tidak dapat menjelaskan tentang nelayan tradisional yang berbeda dengan nelayan kecil.

Nelayan tradisional berarti nelayan yang secara turun-temurun menangkap ikan menggunakan perahu tradisional tanpa sentuhan teknologi modern.

Pemahaman ini memiliki implikasi penting. Pertama, Indonesia pernah menandatangani MoU Box tahun 1974 dengan Australia terkait aktivitas penangkapan ikan di wilayah perbatasan (Endang Retnowati, 2011). Kedua negara sepakat bahwa nelayan tradisional tidak dilarang menangkap ikan di beberapa wilayah Australia.

Namun, jika mengacu pada pengertian nelayan menurut undang-undang, Australia menganggap nelayan tradisional sebagai nelayan kecil (dilengkapi dengan mesin motor dan GPS) yang jika beraktivitas menangkap ikan ilegal wajib diproses berdasarkan hukum di Australia. Oleh karena itu, perlu perumusan kembali pengertian nelayan kecil dan nelayan tradisional.

Kedua, para nelayan tradisional, terutama di perbatasan, memiliki dimensi yang sangat luas. Secara historis ataupun sosio-kultural, mereka telah melakukan komunikasi lintas batas. Tentunya dimensi ini menjadi sangat penting untuk melihat realitas perbatasan laut sebelum kita menghakimi bahwa aktivitas-aktivitas mereka ilegal atau tidak.

Komunikasi nelayan lintas batas negara justru menjadi kekuatan diplomasi dan bisa mengawal laut bersama menghadapi ancaman aktivitas ilegal yang sesungguhnya.

Apalagi, secara ekonomi nelayan-nelayan di perbatasan tentu masih sangat bergantung pada kapal-kapal pengangkut ikan asing untuk menjual tangkapan. Mereka cenderung memilih transaksi di tengah laut dengan kapal asing daripada harus mengirim tangkapan ke pelabuhan. Apalagi, kapal asing menawarkan harga jauh lebih tinggi.

Maka, merumuskan kembali UU No 45/2009 dapat menjadi agenda utama dengan mempertimbangkan kondisi riil masyarakat nelayan kita.

Ini dilanjutkan dengan menjadikan nelayan sebagai subyek utama, sumber informasi tentang perubahan iklim, penangkapan ikan berlebihan oleh kapal-kapal besar, perdagangan ilegal yang melibatkan sindikat kejahatan lokal hingga transnasional, serta pencegahan arus imigran gelap melalui jalur laut.

Dengan demikian, nelayan kita mendapat tempat strategis dalam cita-cita menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia: sebagai drone atau bahkan guardian alamiah pertahanan maritim Indonesia.

Imam Syafi'i

Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI

Editor: Ingrid Dwi

Sumber: Kompas Siang

[http://Nelayan,\"Drone\",danPorosMaritim-Kompas.com](http://Nelayan,\). Diakses pada 24 Maret 2015

d. Kategori Berita Kesadaran Masyarakat Sebagai Negara Maritim

Dibanding Malaysia, Konsumsi Ikan Masyarakat Indonesia Tertinggal Jauh

Minggu, 30 November 2014 / 21:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagai negara maritim, Indonesia nampaknya harus benar-benar melihat realitas bahwa konsumsi ikan nasional per kapita per tahun jauh tertinggal dari negara lain. Bahkan, jika dibandingkan Malaysia saja, konsumsi ikan per kapita per tahun masyarakat Indonesia masih kalah jauh.

Menurut Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Laut (P2H) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Saut Hutagalung, konsumsi ikan nasional saat ini hanya 38 kg per kapita per tahun. Sementara itu, Malaysia sudah mencapai 70 kg dan Jepang 140 kg per kapita per tahun.

"Tahun lalu kita baru 35 kg per kapita per tahun. Tahun ini target kita 38 kg. Tapi itu pun masih jauh dari normal," kata dia saat ditemui setelah acara Hari Ikan Nasional (Harkanas) di Parkir Timur Senayan Jakarta, Minggu (30/11/2014).

Lebih lanjut kata dia, ada beberapa faktor penting mengapa konsumsi ikan nasional per kapita per tahun harus ditingkatkan. Pertama, kandungan protein yang besar dalam ikan akan mampu memperbaiki gizi masyarakat Indonesia yang saat ini rata-rata tinggi badan hanya 157 cm.

"Tinggi rata-rata laki-laki orang Indonesia hanya 157 cm. Itu dibawah rata-rata tinggi orang di ASEAN yaitu 168 cm. Perempuan Indonesia rata-ratanya 147 cm. Di ASEAN 153 cm," kata dia.

Faktor kedua mengapa konsumsi ikan harus dinaikan adalah faktor IQ orang Indonesia yang juga berada di bawah rata-rata orang di ASEAN. Menurut dia, rata-rata IQ orang Indonesia hanya sekitar 89, sementara itu rata-rata IQ orang di ASEAN sekitar 91,3.

"Makanya kita harus terus kampanyekan makan ikan karena menurut Kemenkes (Kementerian Kesehatan), hal itu karena masyarakat kita kurang protein hewani. Kan protein hewani bisa dari ikan atau daging sapi. Nah karena daging sapi mahal, harusnya kita digenjut dari ikan," kata dia.

Menurut Saud, pemerintah akan berusaha terus mendorong konsumsi ikan nasional dengan berbagai cara diantaranya dengan kampanye ayo makan ikan. Pemerintah pun kata dia sudah memiliki target di tahun 2019, konsumsi ikan nasional per kapita per tahun bisa mencapai 50 kg.

Penulis : Yoga Sukmana

Editor : Erlangga Djumena

<http://DibandingMalaysia,KonsumsiIkanMasyarakatIndonesiaTertinggalJauh-Kompas.com>. Diakses pada 23 Maret 2015

Ini Program Unggulan Wisata Bahari Versi KKP

Kamis, 11 Desember 2014 | 16:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Rencana memaksimalkan potensi wisata bahari juga digadang-gadangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil KKP, Rido Batubara saat Rapat Koordinasi Asosiasi Sail Wisata Indonesia yang diselenggarakan baru-baru ini.

"Kita sudah punya *quick wins* untuk tahun 2015 mendatang," ungkap Rido.

Beberapa langkah strategis sebagai program target KKP 2015 disebutkannya. Secara keseluruhan, ia mengungkapkan tiga hal.

"Pertama, pengembangan wisata dan perikanan Kabupaten Simeulue. Letaknya kurang lebih 150 kilometer dari lepas pantai barat Aceh. Selain keindahan wisata, tentu saja bidang perikanan harus dikembangkan. Dua hal ini menjadi bagian yang tak terpisahkan," paparnya.

Kedua, pengembangan wisata Pulau Mallo. Pulau ini terletak di Kabupaten Talaud. Potensi bawah laut di kawasan pulau tersebut memang menarik untuk dikembangkan. Dijelaskan olehnya, terumbu karang serta sumber bahari pulau tersebut masih terjaga dengan baik, ditambah lagi panorama alam yang mempesona sehingga menjanjikan sektor pariwisata.

"Untuk yang ketiga adalah pengembangan wisata bahari Pulau Maratua, Kabupaten Berau. Rencananya, 2015 akan diadakan *jazz and dive festival* untuk mendatangkan lebih banyak lagi wisatawan," tuturnya.

Diharapkan pula olehnya festival jazz yang diselenggarakan di beranda depan Indonesia itu, lambat laun menjadi *event* internasional dan berkelanjutan. "Dalam tiga tahun pertama akan dikawal agar menjadi *event* jazz internasional," katanya lagi.

Dari tiga hal yang diungkapkannya, Rido juga mengharapkan adanya integritas dari banyak pihak. "Sasaran kita semua adalah pengembangan ekonomi maritim dan kelautan. Wisata bahari menjadi salah satu potensi yang akan menjadi tanggung jawab bersama. Mari tingkatkan bersama-sama," ujarnya.

Lebih dari itu Rido juga menerangkan bahwa saat ini sebanyak 92 pulau yang diklasifikasikan sebagai Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) yang menyebar di seluruh Indonesia masih dapat digali potensinya. Sebanyak 61 pulau diantaranya, sampai saat ini tidak berpenduduk.

Penulis : Kontributor Travel, Sri Noviyanti

Editor : I Made Asdhiana

<http://IniProgramUnggulanWisataBahariVersiKKP-Kompas.com>. Diakses pada 24 Maret 2015

Kalimantan Selatan Habiskan Rp 4 Miliar untuk Hari Nusantara 2014

Senin, 15 Desember 2014 / 09:35 WIB

KOTA BARU, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sudah sejak Januari 2014 mempersiapkan event akbar Hari Nusantara 2014, yang puncaknya diselenggarakan pada Senin (15/12/2014). Pulau Laut di wilayah Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, dipilih sebagai tuan rumah pelaksanaan Hari Nusantara.

Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan Muhammad Arsadi mengungkapkan, untuk perhelatan akbar ini, dana pemerintah provinsi Kalimantan Selatan yang dihabiskan mencapai Rp 4 miliar.

"Totalnya mencapai Rp 4 miliar, dari dana pemprov," kata Arsadi saat dijumpai di lokasi.

Arsadi menuturkan, total dana keseluruhan yang habis untuk acara ini lebih besar dari itu. Posalnya, pendanaan dilakukan secara kolektif bersama pemerintah kabupaten dan kementerian-kementerian.

Untuk tahun 2014 ini, Arsadi mengungkapkan, ada 3.000 tamu undangan yang dibawa ke Pulau Laut yang merupakan pulau terbesar di Kalimantan Selatan. Dengan banyaknya anggaran yang habis untuk acara ini, Arsadi mengaku pemerintahannya tak merugi.

Hal ini karena timbal balik dari pelaksanaan acara Hari Nusantara 2014 diyakini positif. Beberapa yang sudah tampak, misalnya, adanya perbaikan infrastruktur jalan hingga bandara.

"Istilahnya kalau kita keluar 10, dapat baliknya 200. Ya, minimal, kalau keluar banyak kan ada perbaikan jalan, dermaga, sampai bandara kan," seloroh Arsadi.

Pantauan *Kompas.com*, dua hari sebelum pelaksanaan Hari Nusantara 2014 dilakukan, perbaikan jalan di sepanjang perjalanan menuju Pelabuhan Samudera, Batu Licin, kabupaten Tanah Bumbu masih dikebu. Dengan adanya pengaspalan ini, praktis jalan raya menuju pelabuhan yang menjadi tempat penyeberangan ke Pulau Laut mulus.

Arsadi mengakui dengan adanya acara-acara level nasional dilakukan di daerahnya, perekonomian masyarakat bergerak.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Budaya Kalimantan Selatan Mohandas Hendro Gunawan mengungkapkan, untuk acara Hari Nusantara, semua hotel bintang 1-4 habis dipesan para tamu.

"Sampai para staf juga akhirnya memesan rumah warga untuk ditinggali," ujar Arsadi.

Mohandas berharap pelaksanaan Hari Nusantara 2014 ini bisa mempromosikan pariwisata bahari yang ada di Bumi Sa'ajaan Kota Baru dan kabupaten sekitarnya seperti Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki Pantai Pagatan dan Pantai Angsana.

Hari Nusantara merupakan peringatan Deklarasi Djoeanda oleh Perdana Menteri Ir Djoeanda terkait wilayah teritorial laut RI pada 13 Desember 1957, yang menandai 12 mil batas lebar laut wilayah Indonesia dari garis pantai dari sebelumnya hanya 3 mil.

Dengan penetapan 12 mil wilayah laut dari garis pantai Indonesia, wilayah teritorial laut dari kepulauan di Indonesia disatukan.

Momentum peringatan puncak Hari Nasional akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Peringatan itu sejalan dengan program Presiden [Jokowi](#) yang akan menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Penulis : Sabrina Asril

Editor : Sandro Gatra

<http://KalimantanSelatanHabiskanRp4MiliaruntukHariNusantara2014-Kompas.com>
diakses pada 24 Maret 2015

Kapal Nelayan Meriahkan Festival Budaya Maritim Teluk Lampung

Senin, 1 Desember 2014 / 08:55 WIB

BANDARLAMPUNG, KOMPAS.com - Kebiasaan ruwatan sebagai bentuk tanda syukur para nelayan, kini diubah menjadi Festival Budaya Maritim Teluk Lampung. Dalam perlombaan yang berlangsung Minggu (30/11/2014), sebanyak 35 kapal nelayan dihias semenarik mungkin. Pengunjung dari berbagai tempat di Bandarlampung yang menghadiri festival itu turut berekreasi mengarungi Teluk Lampung dengan menumpang kapal-kapal nelayan yang sudah dihias itu.

Pengunjung yang ikut mengarungi laut tidak dipungut biaya sebagai bentuk promosi tahap awal. Ketua Himpunan Seluruh Nelayan Indonesia (HSNI) Provinsi Lampung Marzuki Yazid mengatakan Festival Budaya Maritim Teluk Lampung ini merupakan baru pertama kalinya terlaksana di Lampung.

"Biasanya para nelayan melakukan ruwatan dengan mempersembahkan sesaji untuk laut, diharapkan festival budaya maritim ini menjadi kegiatan rutin dan dapat berkembang menjadi salah satu tujuan wisata tahunan," katanya. Kegiatan ini sepenuhnya didukung Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung.

Penulis : Kontributor Lampung, Eni Muslihah

Editor : I Made Asdhiana

<http://KapalNelayanMeriahkanFestivalBudayaMaritimTelukLampung-Kompas.com>.
Diakses pada 25 Maret 2015

Menjelajahi Sisi Lain Wakatobi

Kamis, 4 Desember 2014 | 16:13 WIB

TERUMBU karang di Kepulauan Wakatobi, Sulawesi Tenggara mungkin sudah familiar di telinga para pejalan. Namun jauh di balik itu semua, keindahan di Wakatobi tak sekadar ada di bawah perairannya. Keempat pulau terbesarnya, Wangi-wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko juga menyimpan pesona tak kalah indah.

Saya mengelilingi keempat pulau terbesar di Wakatobi bersama rombongan dari Ekspedisi Liwuto Pasi. Masih banyak orang belum mengetahui bahwa Wakatobi merupakan kumpulan pulau-pulau. Apakah Anda salah satunya? Sebagai informasi saja, Wakatobi merupakan akronim dari empat pulau terbesar yakni Wangi-wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Wakatobi terletak pada segitiga terumbu karang bersamaan dengan perairan Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Timor Leste, serta

Kepulauan Solomon.

Sejak tahun 2007, World Wildlife Fund menjadikan terumbu karang sebagai salah satu prioritas konservasi utama kehidupan maritim. Kerajaan ikan yang terbentang di enam negara, termasuk Indonesia, didiami lebih dari 3.000 spesies ikan, 600 jenis koral atau setara 75 persen terumbu karang di dunia. Sedangkan terumbu karang di kawasan Wakatobi mencakup lebih dari 50 persen terumbu karang dunia.

"Menyelam dan melihat terumbu karang di Wakatobi, maka sama saja telah melihat 3/4 koral di dunia," ujar Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Wakatobi, Nadar.

Ya, benar sekali. Wakatobi selalu identik dengan pesona terumbu karangnya. Walau terkadang, orang-orang terlalu memuja suatu destinasi meskipun belum pernah mengunjungi. Hanya berbekal foto yang telah banyak tersebar, atau membaca blog perjalanan, orang kerap menggeneralisasikan bahwa pesona Wakatobi hanya ada di bawah laut saja. Snorkeling dan diving merupakan tujuan utama pejalan ketika berkunjung ke salah satu wilayah Amazon of the Seas, sebutan lain dari Segitiga Terumbu Karang.

Sebenarnya, ketika berkunjung ke Wakatobi dan hanya menikmati pesona bawah airnya, dapat diibaratkan Anda hanya berkunjung ke pekarangan rumah seorang sahabat saja. Ibaratkan Wakatobi sebagai rumah sahabat, jika ingin semakin dekat dengan sahabat, tentu kita tidak hanya berkunjung di pekarangan rumah saja bukan?

Dalami pesona Wakatobi dengan lebih menyelami kebudayaan serta kearifan lokal masyarakatnya. Anda tidak akan menyesal, justru akan jatuh hati. Keramahan masyarakat serta keunikan cara hidup yang jarang Anda temui di perkotaan akan menjadi hiburan tersendiri.

Masyarakat Wakatobi begitu dekat dan menjaga pesisir pantai serta perairan lautnya. Mereka selalu sadar untuk menjaga kelestarian lingkungan bawah laut. Kelestarian terumbu karang Wakatobi yang terus terjaga merupakan hasil jerih payah warganya.

Menurut Adit, salah satu pekerja kreatif atau seniman Ekspedisi Liwuto Pasi, terumbu karang di Kepulauan Seribu sama saja dengan di Wakatobi. Bedanya kearifan lokal masyarakat yang tetap berpegang teguh menjaga keindahan terumbu

karang. "Wakatobi sama saja dengan Kepulauan Seribu, tapi sebenarnya seribu kali lebih keren," ujar Adit.

Anda ingin berwisata di satu kawasan yang lengkap menyajikan berbagai keindahan alam dan kebudayaan lokal, maka kunjungi Wakatobi. Anda penikmat sunset dan sunrise? Wakatobi adalah lokasi yang menawan untuk menyaksikan terbit dan tenggelamnya sang surya. Salah satu spot terbaik menikmati matahari terbit dan tenggelam ialah Puncak Kahyangan di Pulau Tomia. Di ketinggian ini, Anda dapat menyaksikan keindahan Pulau Tomia serta menjelajahi benteng Patua, benteng pertahanan terluar Kerajaan Buton.

"Ada juga Puncak Waumpale. Di puncak ini, bisa melihat sunset dan sunrise sekaligus," ujar Camat Tomia, La Ode Safihudin, ditemui saat acara Festival Makanan salah satu rangkaian Ekspedisi Liwuto Pasi (28/11). Ia juga menambahkan, ada beberapa goa indah yang bahkan belum tersentuh manusia, seperti Goa Liatiti. "Goa ini menarik dan misterius. Ukurannya 50 x 50 meter dengan kedalaman 50 meter, bentuknya seperti sumur," tambahnya.

Selain keindahan alam di daratan, Anda juga dapat melihat aktivitas unik yang hanya dilakukan masyarakat Wakatobi. Anak-anak yang bermain di pinggir pantai, menganggap pesisir sebagai lapangan bermain. (*Elisabeth Novina*)

Editor : Ni Luh Made Pertiwi F

Sumber : [National Geographic Traveler](#)

<http://MenjelajahiSisiLainWakatobi-Kompas.com>. Diakses pada 24 Maret 2015

Wisata Maritim di Lempasing, Pulangnya Bisa Bawa Ikan

Senin, 1 Desember 2014 | 11:55 WIB

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS.com - Senangnya dapat mengikuti Festival Budaya Maritim Teluk Lampung di Pusat Pelelangan Ikan (PPI) Lempasing, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Seluruh masyarakat yang hadir kebanyakan dari ekonomi menengah ke bawah. Tak jarang pengunjung yang datang menggunakan angkutan umum. Mereka dari berbagai tempat di Bandar Lampung sengaja datang

untuk naik perahu hias gratis.

Yati (54) warga dari Wayhalim, Bandar Lampung datang bersama keluarganya untuk menikmati rekreasi maritim. "Saya mengajak anak, keponakan dan juga cucu, menyenangkan sekali. Saya juga bisa memperkenalkan tentang kelautan pada cucu," katanya, Minggu (30/11/2014).

Demikian juga dengan Notor (40), warga Garuntang, Bandar Lampung. Ia mengajak istri dan anaknya untuk rekreasi gratis mengarungi laut. "Saya dapat informasi ini dari koran, mumpung gratis dan tepat hari libur juga kenapa tidak mengajak keluarga bersenang-senang," ujarnya.

Festival Budaya Maritim Teluk Lampung sepenuhnya didukung oleh Lanal Provinsi Lampung. Salah satu rangkaian acaranya adalah lomba menghias perahu nelayan. Sedikitnya ada 35 kapal nelayan yang turut serta dalam festival tersebut. Kegiatan ini, baru terlaksana pertama kalinya di Lampung. Diharapkan, ini bisa menjadi kegiatan tahunan dalam rangka mempromosikan wisata bahari di Lampung.

Selain dapat menikmati keindahan alam Teluk Lampung yang dikelilingi pulau-pulau kecil, saat pulang, pengunjung juga dapat membeli ikan hasil tangkapan nelayan setempat.

Penulis : Kontributor Lampung, Eni Muslihah

Editor : I Made Asdhiana

<http://WisataMaritimdiLempasing,PulangnyaBisaBawaIkan-Kompas.com>. Diakses pada 23 Maret 2015



